



# **LAPORAN KEGIATAN**

## **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat**

**Bogor, 10 s.d. 13 Juli 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Demokrat mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A.1. Umum</b> .....	<b>1</b>
<b>A.2. Tujuan</b> .....	<b>3</b>
<b>B. PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	<b>5</b>
<b>B.1. Nama Kegiatan</b> .....	<b>5</b>
<b>B.2. Waktu dan Tempat</b> .....	<b>5</b>
<b>B.3. Peserta Kegiatan</b> .....	<b>5</b>
<b>B.4. Akomodasi Peserta</b> .....	<b>7</b>
<b>B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat</b> .....	<b>7</b>
<b>B.6. Uraian Kegiatan</b> .....	<b>7</b>
<b>B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta</b> .....	<b>7</b>
<b>B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i></b> .....	<b>7</b>
<b>B.6.3. Acara Pembukaan</b> .....	<b>8</b>
<b>B.6.4. Penyampaian Materi</b> .....	<b>8</b>
<b>B.6.5. Acara Penutupan</b> .....	<b>10</b>
<b>C. HASIL EVALUASI KEGIATAN</b> .....	<b>11</b>
<b>C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i></b> .....	<b>11</b>
<b>C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner</b> .....	<b>11</b>
<b>D. HAMBATAN</b> .....	<b>20</b>
<b>E. PENUTUP</b> .....	<b>20</b>
<b>F. LAMPIRAN</b> .....	<b>21</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Bahan Penjelasan Teknis
6. Panduan Penggunaan SIMULTAN
7. Panduan Moderator
8. Panduan Narasumber
9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
10. Kumpulan Materi Narasumber
11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
12. Surat Tugas Narasumber
13. Surat Perjanjian Kerjasama
14. Daftar Hadir Peserta
15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
16. Penilaian Hasil Praktek Peserta
17. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
18. Daftar Pertanyaan Peserta
19. Tata Tertib Peserta
20. Alur Kegiatan *Offline*

# PENDAHULUAN



## PELAKSANAAN KEGIATAN

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRAT

Senin s.d. Kamis, 10 s.d. 13 Juli 2023

#### A. PENDAHULUAN

##### A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) pengkhianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Demokrat sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

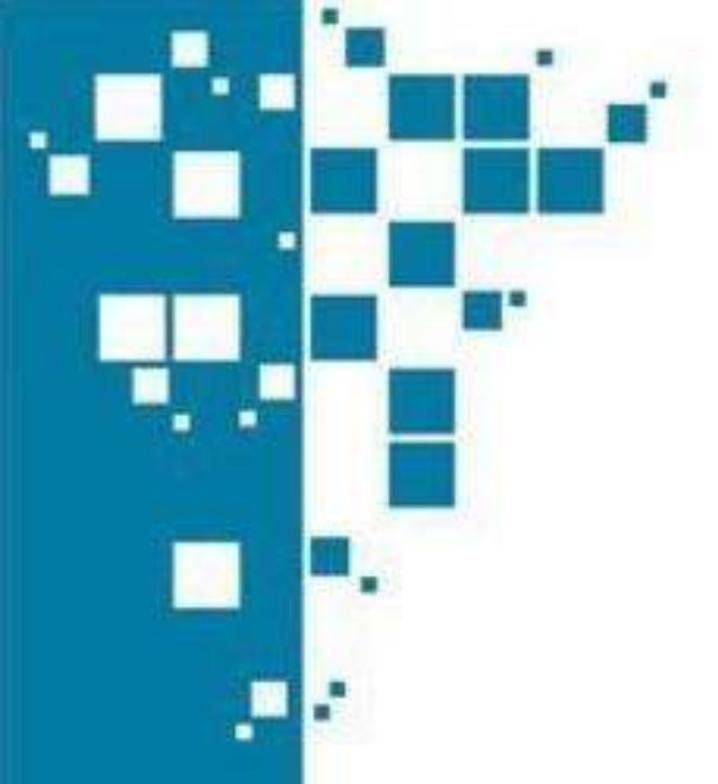
## A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;

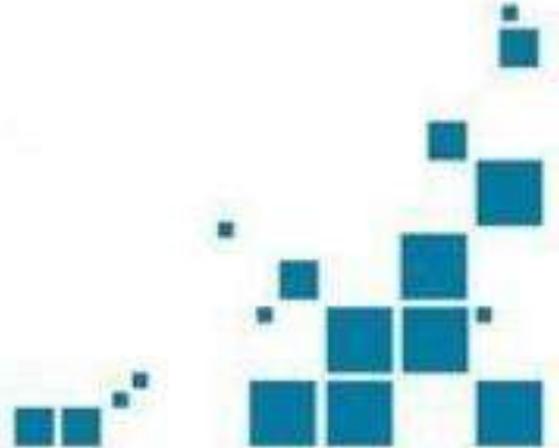


- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.





# PELAKSANAAN KEGIATAN



## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

### B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat”.

### B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

### B.3. Peserta Kegiatan

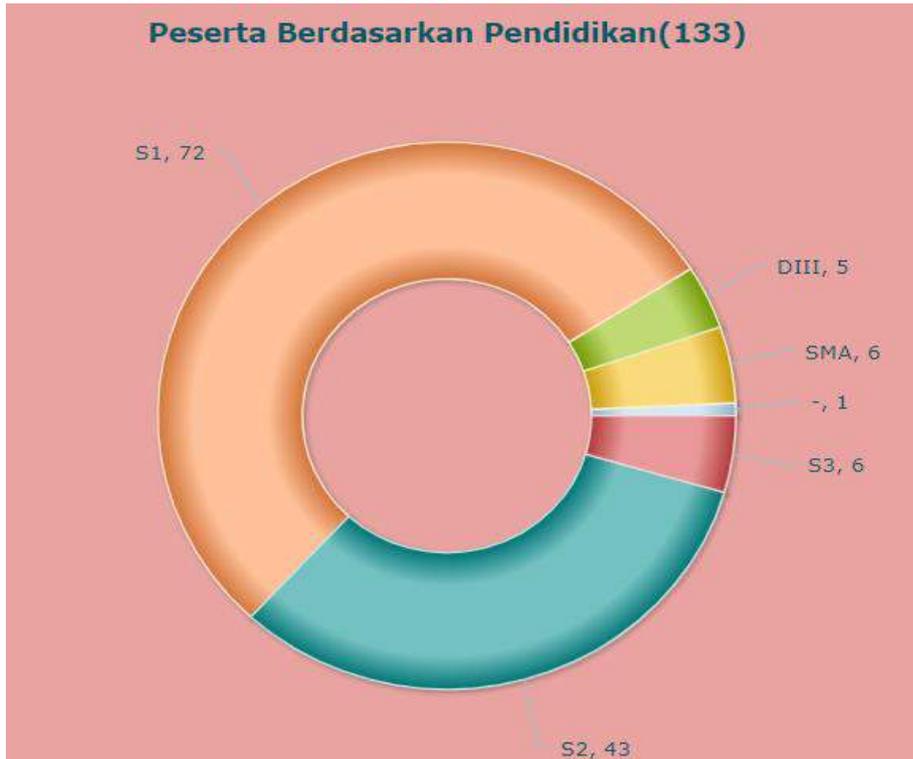
Peserta kegiatan sebanyak 133 orang pengurus dan/atau anggota Partai Demokrat. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat:

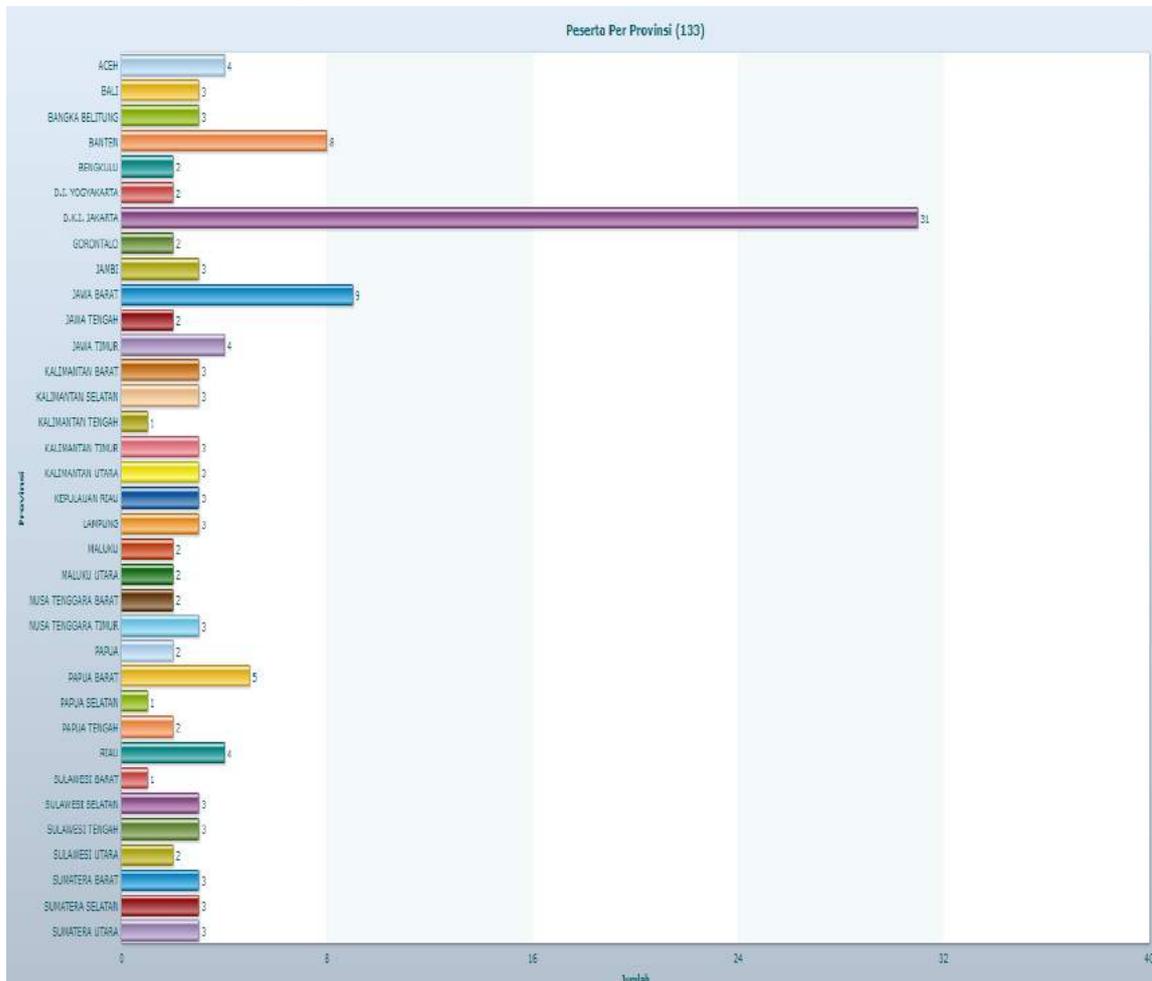
**Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin**



**Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan**  
**Peserta Berdasarkan Pendidikan(133)**



**Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah**



#### B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
  - Sandal kamar
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

#### B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
  - 1) Tas;
  - 2) *Id card*;
  - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
  - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
  - 5) *Block Note* dan pulpen;
  - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
  - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
  - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
  - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

#### B.6. Uraian Kegiatan

##### B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 10 Juli 2023 pukul 09.30 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

##### B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 10 Juli 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.



### B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H pada Senin, 10 Juli 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Ibu Elisabeth, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Bapak H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Mars Partai Demokrat, Laporan Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Partai Demokrat, Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

### B.6.4. Penyampaian Materi

#### 1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

**Tabel 1. Materi dan Narasumber**

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	<b>Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	1. YM Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA. 2. YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.
2.	<b>Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
3.	<b>Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
4.	<b>Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	1. Nur Rakhman, S.Kom. 2. Rachman Karim



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	<b>Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
6.	<b>Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.</li> <li>2. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.</li> <li>3. Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.</li> <li>4. Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.</li> </ol>
7.	<b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hani Adhani, S.H., M.H.</li> <li>2. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.</li> <li>3. Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.</li> <li>4. M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.</li> </ol>

## 2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PPHU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PPHU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PPHU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil

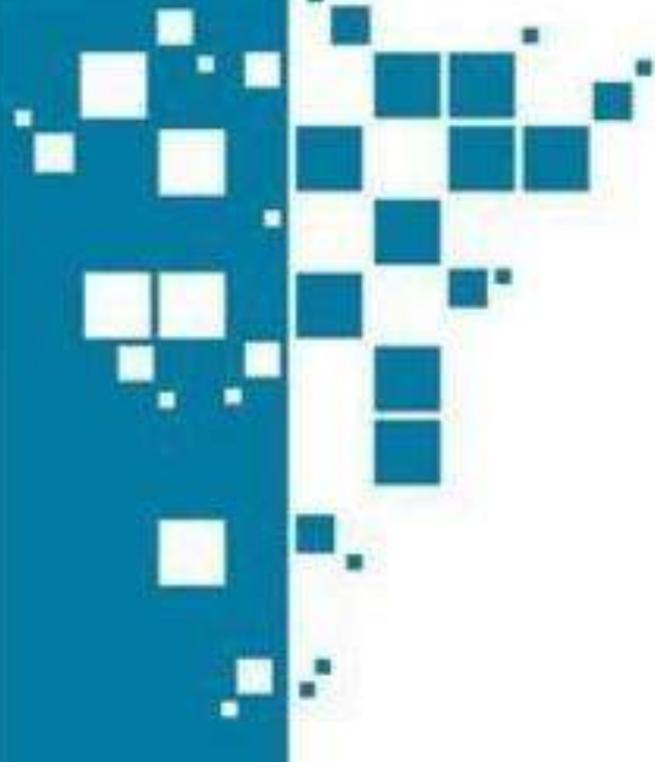


kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

#### **B.6.5. Acara Penutupan**

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 13 Juli 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.





# HASIL EVALUASI KEGIATAN



## C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

### C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 7,97 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 108 menunjukkan nilai sebesar 1,65909. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,45**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

### C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

### **C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan**

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,56 yang tergolong kategori Baik.**



## 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,57 yang tergolong kategori Baik.**

## 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,62 yang tergolong kategori Baik.**

## 4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,59 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



### C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,54 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,49 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,71 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,62 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**



keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,90 yang tergolong kategori Sangat Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,65 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,62 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

**Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Kualitas Materi/Bahan Ajar</b>			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,53	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,63	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,52	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar</b>		<b>3,56</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Narasumber dan Moderator</b>			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,59	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,57	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,55	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D	
	Moderator yang paling menarik	1. Bangkit Panji Anarogo 2. Angga Putri Gardina	
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator</b>		<b>3,57</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Metode Penyelenggaraan</b>			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,61	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,63	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan</b>		<b>3,62</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Petugas Penyelenggara</b>			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,59	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,61	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,60	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara</b>		<b>3,60</b>	<b>Baik</b>
<b>Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan</b>		<b>3,59</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Layanan Akomodasi</b>			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,58	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,49	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi</b>		<b>3,54</b>	<b>Baik</b>



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Kualitas Layanan Konsumsi</b>			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,43	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,55	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi</b>		<b>3,49</b>	<b>Baik</b>
<b>Kualitas Layanan Sarana Pendidikan</b>			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,59	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,64	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan</b>		<b>3,61</b>	<b>Baik</b>
<b>Layanan Keamanan</b>			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,72	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,70	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan</b>		<b>3,71</b>	<b>Baik</b>
<b>Sistem Informasi Pendidikan</b>			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,61	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,63	Baik
<b>Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan</b>		<b>3,62</b>	<b>Baik</b>



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Layanan Keuangan</b>			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,90	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,65	<b>Baik</b>
	<b>Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi</b>	3,62	<b>Baik</b>

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Partai Demokrat. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,45 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,9. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,62 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu  $(3,62+2,9)/2 = 3,26$ .

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,26**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem



informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  - a) Perlu menghadirkan semua Hakim Konstitusi sebagai narasumber;
  - b) Pengaturan waktu perlu disusun lebih efektif;
  - c) Ditambah lagi hiburannya;
  - d) MK harus melakukan pelatihan ke daerah-daerah;
  - e) Waktu penyelenggaraan kegiatan dapat ditambah menjadi satu minggu.
  
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
  - a) Perlu ditingkatkan variasi makanan;
  - b) Sarana penunjang perlu ditingkatkan;
  - c) Colokan listrik di dalam kamar harus diletakkan di titik yang mudah diakses dan diperbanyak;
  - d) Air kamar mandi di dalam kamar mati sehingga peserta terlambat masuk kelas;
  - e) Kualitas WiFi perlu ditingkatkan karena sering terputus;
  - f) Mushola perlu dilengkapi dengan pengeras suara untuk adzan dan iqomah sebagai pertanda waktu sholat telah tiba;
  - g) *Shower* di dalam kamar perlu diperbaiki;
  - h) Peserta perlu mendapatkan uang saku;
  - i) Dilengkapi fasilitas gym untuk menjaga kebugaran peserta;
  - j) Bet tenis meja perlu diganti;
  - k) Perlu adanya sejadah di dalam kamar;
  - l) Sistem klaim tiket transportasi dapat diperbaiki dan dipermudah lagi;
  - m) Perlu adanya TV di dalam kamar.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 131 orang dari 133 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis



operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

#### D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.

#### E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,  
Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi

**Teguh Wahyudi**  
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 22 Agustus 2023

Kepala Bidang Program dan  
Penyelenggaraan

**Nanang Subekti**  
NIP. 19741118 200604 1 002



## DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA dan YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.



Materi Praktis Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

**LAPORAN KEUANGAN**  
**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun**  
**2024 Bagi Partai Demokrat**  
**(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>NOMINAL</b>
1	Marwan Hamzah dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 405,839,000
2	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
3	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 41,188,770
5	CV Azizah	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 125,820,000
6	Honor Narsum		Rp 8,500,000
<b>TOTAL</b>			Rp 584,647,770

**JADWAL KEGIATAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI DEMOKRAT**

**Hari, Tanggal** : Senin s.d. Kamis, 10 s.d. 13 Juli 2023  
**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor  
**Peserta** : Pengurus dan Anggota Partai Demokrat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 10 Juli 2023</b>	09.30 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check in</i></b>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>	Kabid. Program dan Penyelenggaraan	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<b><i>Pre-Test</i></b>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Pembacaan Naskah Pancasila</li> <li>3. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>4. Mars Partai Demokrat</li> <li>5. Laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi</li> <li>6. Sambutan Ketua Umum DPP Partai Demokrat</li> <li>7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>8. Hymne Partai Demokrat</li> <li>9. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>10. Pembacaan Doa</li> </ol>	YM Ketua MK <b>Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.</b>  Ketua Umum DPP Partai Demokrat <b>Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.</b>  Plt Kapusdik <b>Elisabeth</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7

	19.00 – 21.00 WIB	<b>Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
<b>KEDUA</b>				
<b>Selasa, 11 Juli 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
<b>KETIGA</b>				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	<b>Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Aula Grha Konstitusi 3

Rabu, 12 Juli 2023	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
<b>KEEMPAT</b>				
Kamis, 13 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	<b>Post-Test dan Evaluasi Kegiatan</b>	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	<b>Kabid Program dan Penyelenggaraan</b>	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



# **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

---

## **PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRAT**

---

**Bogor, 10 s.d. 13 Juli 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Demokrat yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Juli 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Elisabeth**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>2</b>
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi .....	3
4. Profil Hakim Konstitusi .....	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal .....	8
<b>II PANDUAN KEGIATAN.....</b>	<b>9</b>
1. Latar Belakang .....	9
2. Tujuan Kegiatan .....	10
3. Nama Kegiatan .....	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan .....	10
5. Peserta Kegiatan .....	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum .....	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat .....	14
8. Akomodasi .....	14
9. Konsumsi .....	14
10. Pembiayaan .....	14
11. Biaya Transportasi .....	15
12. Lain-lain .....	16
13. Kontak .....	16
<b>III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS .....</b>	<b>17</b>
<b>IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>27</b>
<b>V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....</b>	<b>29</b>
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

## **BAB I**

### **SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - 3) Memutus pembubaran partai politik;
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

## 3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

#### 4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

##### a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta  
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM  
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
  - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
  - Kepala Biro Kepegawaian MA
  - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

##### b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas  
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research  
Universitas Malaya, Malaysia  
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
  - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
  - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - Komisaris Utama PT Semen Padang

**c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Universitas Airlangga  
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro
- Karir :
  - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
  - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

**d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
  - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
  - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
  - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
  - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
  - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

**e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah  
IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

**f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
- S2 – Universitas Tarumanegara
- S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

**g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
- S2 – Universitas Sumatera Utara
- S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

**h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)  
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)  
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

**i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran  
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).  
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

## 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

### a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Kelahiran : 9 Juni 1969  
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

### b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi  
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961  
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum  
Universitas Jakarta  
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum  
Bisnis  
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

## BAB II

### PANDUAN KEGIATAN

#### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

## 2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

## 3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat”.

## 4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
<b>PERTAMA</b>		
<b>Senin, 10 Juli 2023</b>	09.30 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check In</i></b>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>
	15.30 – 16.00 WIB	<b>Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i></b>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>Pembacaan Teks Pancasila</li> <li>Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>Mars Partai Demokrat</li> <li>Laporan Sekretaris Jenderal MK</li> <li>Sambutan Ketua Umum Partai Demokrat</li> <li>Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>Pembacaan Doa</li> </ol>

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	<b>Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>
<b>KEDUA</b>		
<b>Selasa, 11 Juli 2023</b>	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>
<b>KETIGA</b>		
<b>Rabu, 12 Juli 2023</b>	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	<b>Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>
<b>KEEMPAT</b>		
<b>Kamis, 13 Juli 2023</b>	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	<b>Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024</b>
	10.00 – 10.30 WIB	<b>Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i></b>

	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</li> <li>3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</li> <li>4. Pembacaan Doa</li> </ol>
--	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Demokrat, yang terdiri dari:

- a. 36 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 114 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

## 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD</li> <li>b. Para Pihak</li> <li>c. Objek Permohonan</li> <li>d. Pengajuan Permohonan</li> <li>e. Permohonan</li> <li>f. Alur Penarikan Kembali Permohonan</li> <li>g. Jawaban Termohon</li> <li>h. Keterangan Pihak Terkait</li> <li>i. Keterangan Bawaslu</li> <li>j. Jenis Alat Bukti</li> <li>k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan</li> <li>l. Putusan</li> <li>a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi</li> </ol>	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi dan Kewenangan MK</li> <li>b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK</li> <li>c. Asas-Asas Hukum Acara MK</li> <li>d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK</li> </ol>	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024</li> <li>b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring</li> <li>c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak</li> </ol>	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya ( <i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i> )	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

## Proses Pembelajaran

### 1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

### 2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

### 3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

## 7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:  
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

## 8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
  - Sandal kamar.
  - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

## 9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

## 10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

## 11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

*Boarding pass* berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Rescheduling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
  - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
  - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

## 12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

## 13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

## BAB III

### TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

#### 1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

#### 2. Sistem Informasi

##### a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

##### b. Pedoman Penggunaan

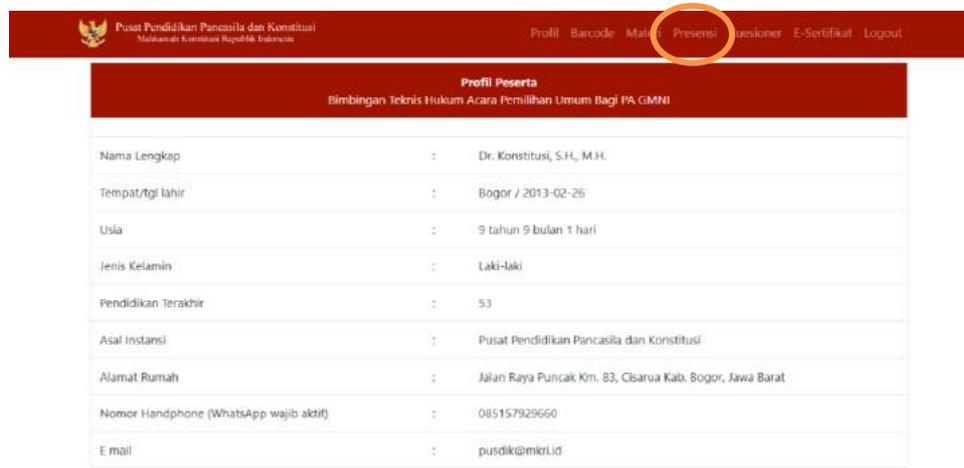
1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



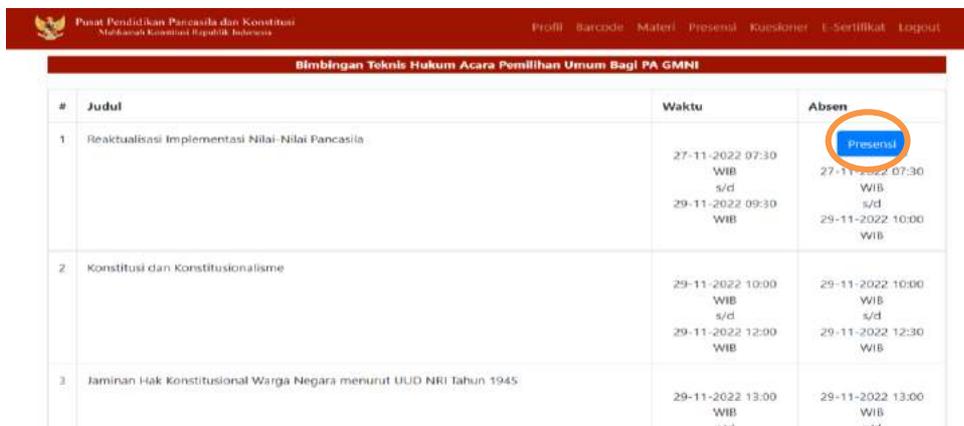
2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
	Nilai Pre Test			6
	Nilai Post Test			0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

 Badan Pengawas Pemilu,  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,  Komisi Pemilihan Umum,  Mahkamah Konstitusi, and  Pemantau Pemilu. At the bottom, there is a copyright notice: '© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.'" data-bbox="227 414 832 624"/>

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat!

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

 Putusan,  Putusan Sela,  Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website),  Pengajuan permohonan secara daring (online),  Persidangan jarak jauh (video conference),  Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming), and  Semua benar. At the bottom, there is a blue button labeled 'Simpan' circled in black." data-bbox="227 676 839 895"/>

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

### 3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

### 4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 1

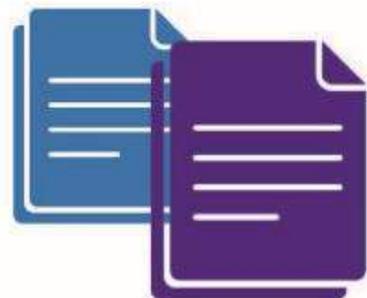
### Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

#### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

#### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

#### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
  - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - Memenuhi target minimum kehadiran;
    - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

### 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

### 4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



### 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

### 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan  
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan  
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,  
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

### 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



**BAB IV****HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

*---Music---*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

## **Mars Mahkamah Konstitusi**

*Syair : Taufiq Ismail*

*Lagu : Dwiki Dharmawan*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

*---Music---*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

## BAB V

### INFORMASI MENGENAI PUSDIK

#### 1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



**Elisabeth, S.E.**

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan  
Konstitusi



**Nanang Subekti, S.E., M.S.E**

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



**Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.**

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



**Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



**Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



**Santhy Kustrihardiani, S.Psi.**

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

\*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

## 2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



### a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**b. Grha Konstitusi 2**

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

**c. Grha Konstitusi 3**

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

**d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5**

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

**e. Grha Konstitusi 6**

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

**f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla**

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

### g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat\_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3\_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

### 3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



# PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum  
Tahun 2024 bagi Partai Demokrat

Senin, 10 Juli 2023



SELAMAT DATANG DI

# ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN  
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN  
UNTUK PELAYANAN YANG  
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



[www.mkri.id](http://www.mkri.id)



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/@officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/@mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,  
Bantu Kami  
Menjaga Integritas  
dengan  
tidak memberi Uang  
atau  
pemberian apapun

**Integritas Kami  
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
upg@mkri.id

# UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI





## **MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

**M. GUNTUR HAMZAH**

# PAKTA INTEGRITAS



## **Pusdik Pancasila dan Konstitusi:**

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



## **Peserta:**

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



## **Narasumber:**

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 1 Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;  
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

## 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

## 4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



## 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

## 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000  
- Whatsapp: 085157929660  
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)  
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)  
- Melalui Kotak Saran  
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

### 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.

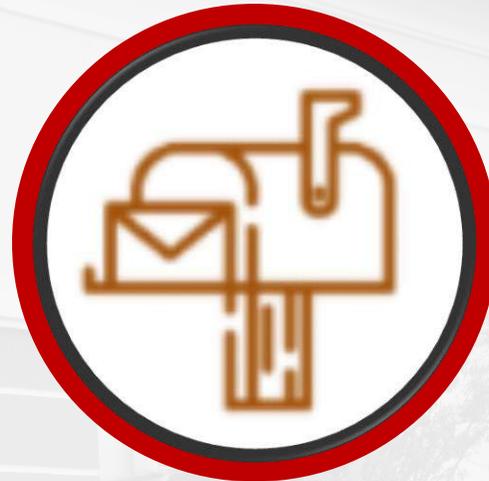


5

# Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner  
Online**



**Masukan dan Saran  
di Microsite  
[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**



**Kotak Saran**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)

# Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



# Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



**Elisabeth**

Plt. Kepala Pusdik  
Pancasila dan  
Konstitusi



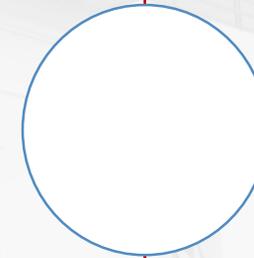
**Nanang Subekti**

Kabid Program  
dan  
Penyelenggaraan



**Nanda Adityansyah**

Jabatan Fungsional  
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah  
Salim**

Kasubid  
Program dan  
Evaluasi



**Santhy  
Kustrihardiani**

Kasubid  
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma  
W**

Kasubag Tata  
Usaha



**Bambang  
Sukmadi**

Kasubag  
Sarana dan  
Prasarana



# Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



**Bangkit Panji Anarogo**



**Edwin Aditya Irawan**



**Fazlur Rahman El Islamy**



**Suhardi**



**Muhlis Nova**



**Angga Putri Gardina**



**Hadian Taofik Rohman**



**Chafid Sugianto**



**Yahya Amarullah Taufik**



**Edwin Rivano**

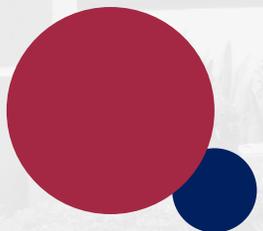
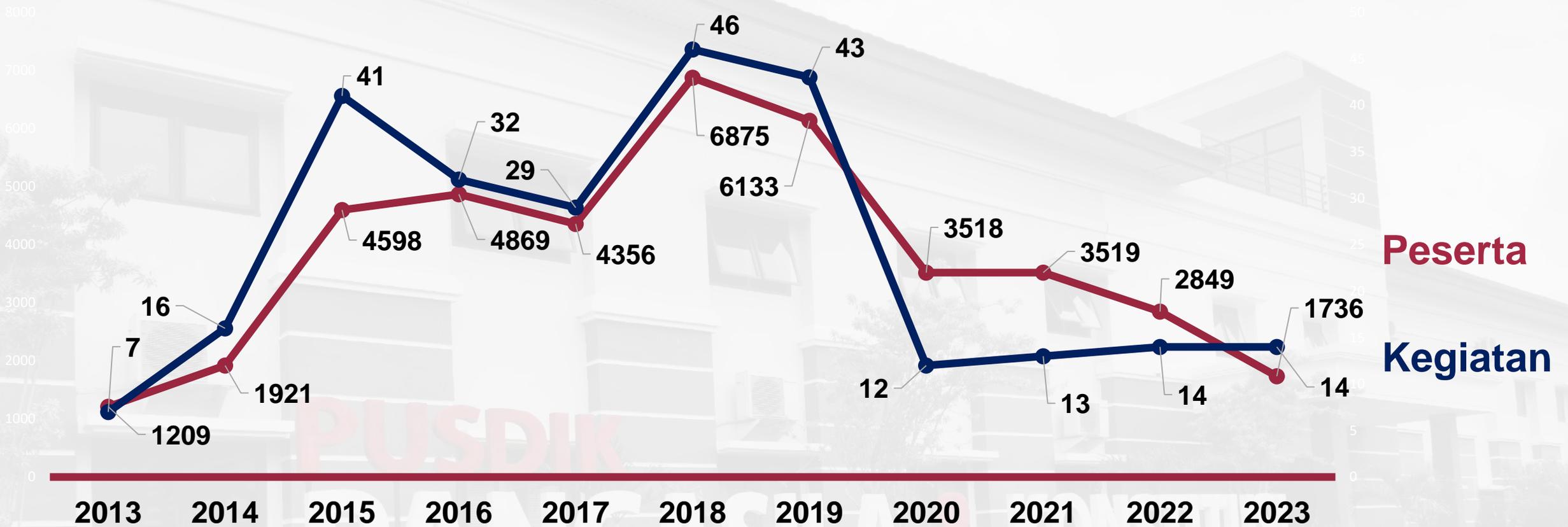


# KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



# KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **29.015** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **36.591** orang

# PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis  
10 s.d. 13 Juli 2023
- **Tempat** :  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,  
Jawa Barat

# JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
<b>Senin, 10 Juli 2023</b>	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi dan Mars Partai Demokrat 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Umum DPP Partai Demokrat 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Partai Demokrat dan Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 <b>Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. &amp; Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.</b>

HARI	WAKTU	KEGIATAN
<b>Selasa, 11 Juli 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi <b>Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Muda III – Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik <b>Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 12 Juli 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 <b>Narasumber: Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.</b>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi</b>
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 13 Juli 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 <b>Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi</b>
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa



# PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Demokrat, terdiri dari:
  - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
  - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Presiden atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

# KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



# BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

## ❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

## ❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia DPP Partai Demokrat

## AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
  - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
  - Sandal kamar; serta
  - Gula, kopi, teh dan air mineral.

## KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

# PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



# MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
  - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
  - 2) *Boarding pass* kedatangan;
  - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.



# MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

## ❖ **Boarding pass**

*Boarding pass* berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

## ❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



# MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

## ❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

# SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

***pusdik.mkri.id***

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



## LAYANAN WI-FI

**Nama Wi-Fi** : *Pusdiklat\_MKRI*

**Password** : *pusdikmk*

**Nama Wi-Fi** : *GK3\_PUSDIKLAT*

**Password** : *pusdikmkri*

**Nama Wi-Fi** : *MK-TAMU*

**Password** : *Konstitusi123*





**FASILITAS  
DI PUSAT  
PENDIDIKAN  
PANCASILA  
DAN  
KONSTITUSI**

## Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

## Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir



## Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

## Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



## Grha Konstitusi 4



## Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



## Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

## Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

## Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



## Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

## Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas  
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift  
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi  
di Grha Konstitusi 4



## Fasilitas Lainnya



Poliklinik  
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital  
di Grha Konstitusi 2



**T  
E  
R  
I  
M  
A**

**K  
A  
S  
I  
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA**  
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024**

**SIMULTAN**  
**(Sistem Informasi Manajemen Peserta**  
**Langsung dan Transparan)**



## LAYANAN WI-FI

**Nama Wi-Fi** : *Pusdiklat\_MKRI*

**Password** : *pusdikmk*

**Nama Wi-Fi** : *GK3\_PUSDIKLAT*

**Password** : *pusdikmkri*

**Nama Wi-Fi** : *MK-TAMU*

**Password** : *Konstitusi123*



# FUNGSI SIMULTAN



## Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



## Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



## Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



## Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



## E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

## Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam  
Akun Sistem Informasi  
Peserta (SIMULTAN),  
Peserta Scan QR Code  
yang Ada pada Tanda  
Peserta (ID Card  
Peserta)**

## Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular image of the building. A green button is visible on the left side of the main content area.

**PusdikMK**

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)

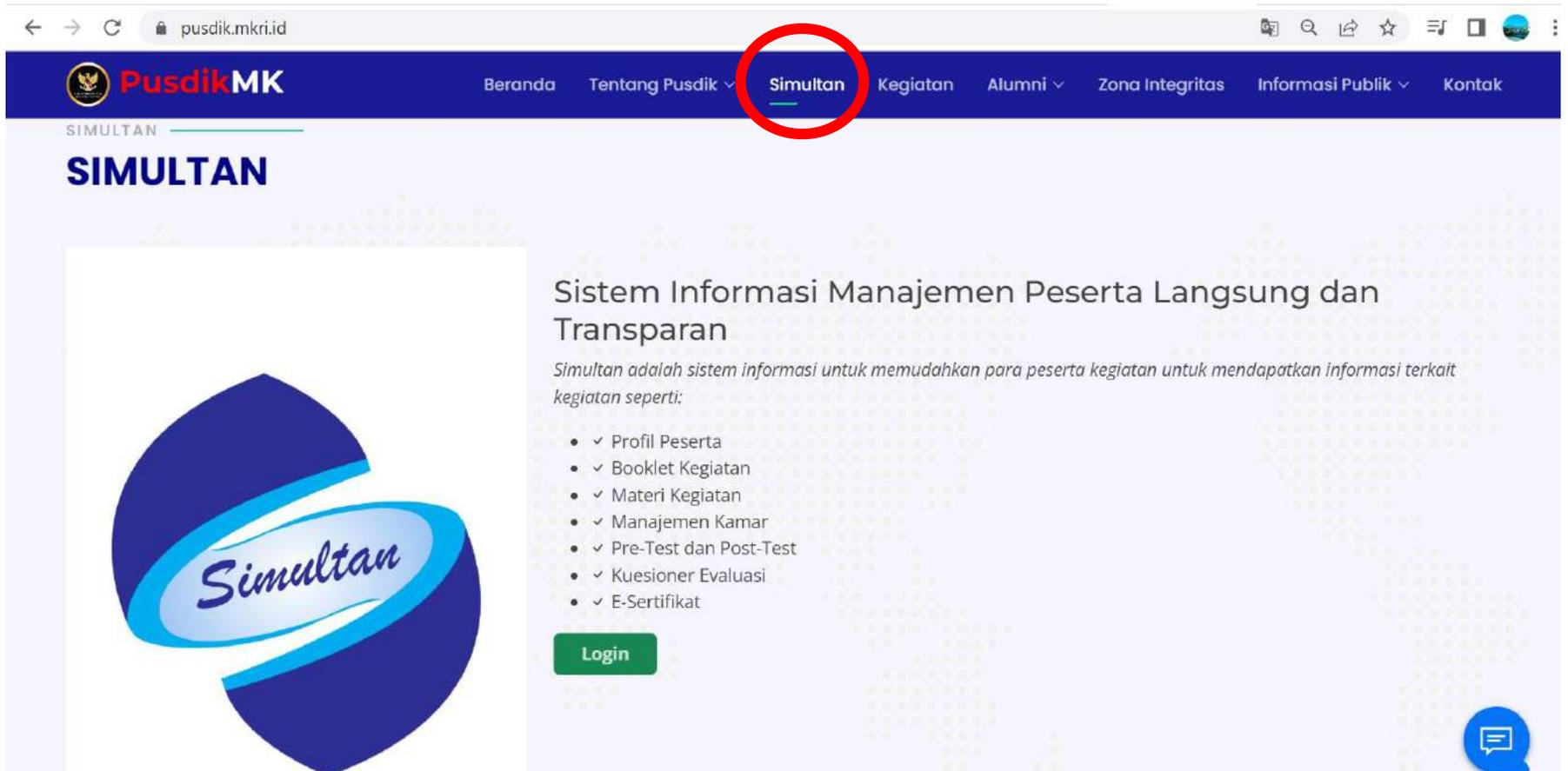
# Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK  
PANCASILA & KONSTITUSI**

# Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id). The navigation bar includes links for Beranda, Tentang Pusdik, **Simultan** (circled in red), Kegiatan, Alumni, Zona Integritas, Informasi Publik, and Kontak. The main content area features the 'SIMULTAN' logo and a description of the system as a direct and transparent participant management information system. A list of features is provided, and a 'Login' button is visible at the bottom of the content area.

**PusdikMK**

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

## SIMULTAN

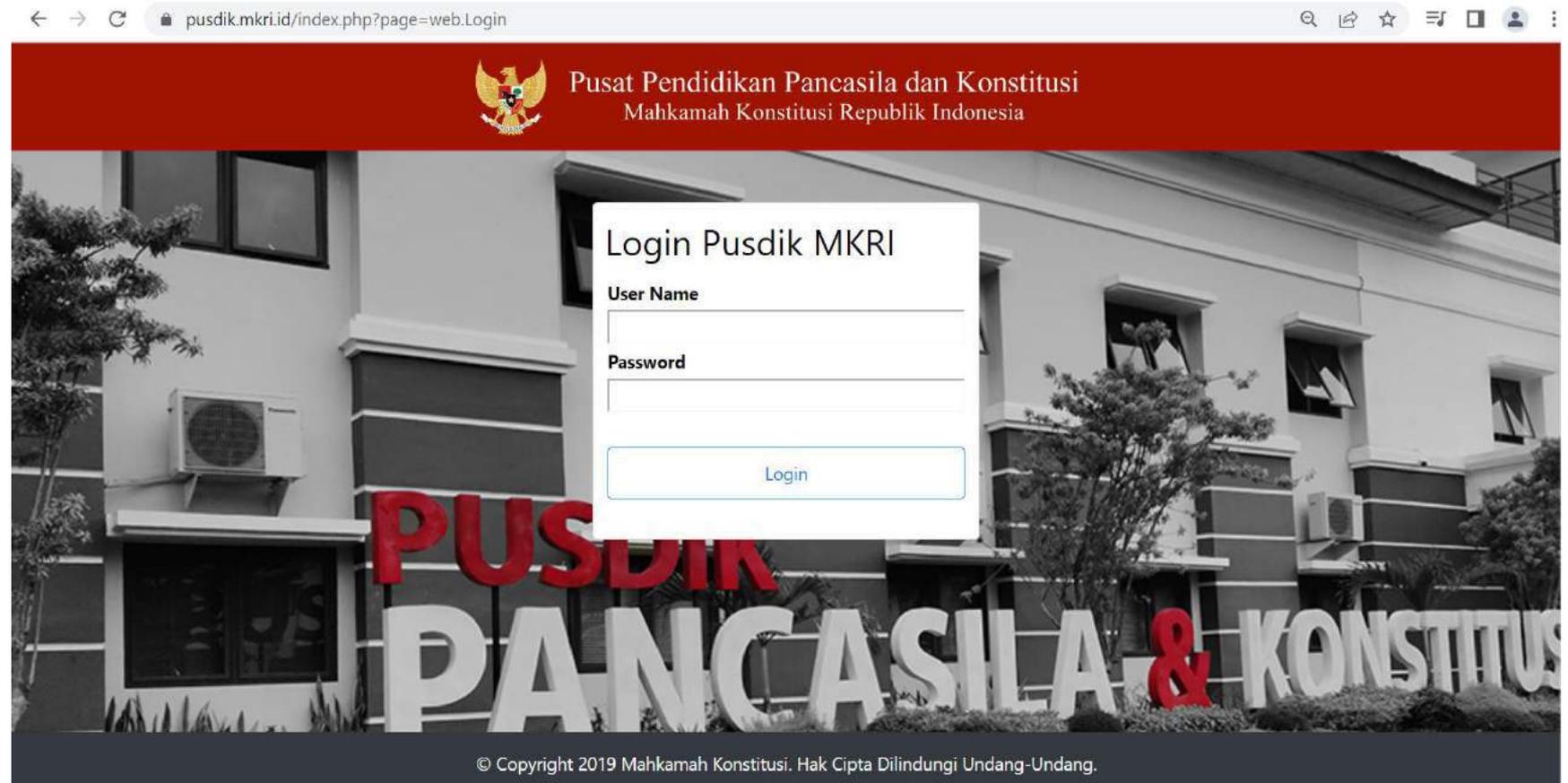
### Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

*Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:*

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

# Masukan Username dan Password



← → ↻ [pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login](https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login) 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

## Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



### Profil Peserta

#### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

### Profil Peserta

# Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

## Klik “Edit Profile”

**Catatan:**

***Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat***

**Edit Profil Peserta**  
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK \* :

Gelar Depan \* :

Nama Lengkap \* : Safira Putri Purnama  
Usulkan Perbaikan Nama :  
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang \* : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir \* : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin \* : Perempuan

Pendidikan \* : S2

Instansi \* : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan \* : Programmer Utama

Alamat \* :

Desa/Kelurahan \* : Desa Satriamekar

Provinsi \* : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota \* : KOTA JAKARTA TIMUR

HP \* :

Email \* :

[Update Data](#)

## Meng-edit Profil Peserta

### Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

## Meng-edit Profil Peserta

**Profil Peserta**  
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama <b>(Ishak Purnama)</b> menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	MAHKAMAH KONSTITUSI	<a href="#">File</a>

**Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber**



## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	<a href="#">Presensi</a> 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

### Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

\*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

\*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



## Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	<a href="#">Sudah Absen</a> 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



## Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi **Kuesioner** Sertifikat Logout

### Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan  
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



### SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

# Halaman

## “Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

\*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

## Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

## Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



### Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>

**Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber**



### Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

#### Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Halaman

## “Kuesioner Evaluasi Narasumber”

**\* Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

# Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

\* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



### Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

**Mengisi Evaluasi kegiatan**



## Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

### Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Materi yang paling menarik**

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

### Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

**Mengunduh e-Sertifikat**



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

# TERIMA KASIH

## PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

### A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

### B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
  - Jumlah total peserta;
  - Asal organisasi peserta;
  - Asal daerah peserta.

### C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

### D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

### E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

### F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

### G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
  - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
  - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
  - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
  - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
  - Materi apa dan siapa pematernya;
  - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SESI PRAKTEK**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek**

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SESI EVALUASI & PRESENTASI**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi**

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrat**  
**Senin s.d. Kamis, 10 s.d.13 Juli 2023**

YM Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. & YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	9	55	3,44	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	peserta yg duduk dibelakang agak kesulitan membaca tulisan di layar karena kurang besar, jauh, maupun terlindung sehingga saran jarak duduk jangan terlalu jauh, layar ditambah dan diperbesar lagi sehingga lebih maksimal tampilan slidennya.
6	4	4	4	4	3	2	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	58	3,63	Jika bisa, suasana pemberian materi lebih interaktif....metode pemberian materi...seperti classroom
7	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	9	56	3,50	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Intaksi dan waktu mesti nya yg dibatasi ,, dan bagus nya siang atau pagi
10	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	7	51	3,19	
11	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	58	3,63	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih sudah menghadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi dari sumbernya Terimakasih sudah menghadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi dari sumbernya
13	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	4	3	9	43	2,69	
14	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	bagi saya sebagai peserta Bimtek MK , waktunya klo bisa ditambah karena saya peserta yang awam ttg hukum
16	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
17	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	8	55	3,44	Dr Enny sangat bagus suara dan penyampiannya
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
19	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	57	3,56	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	9	47	2,94	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	9	61	3,81	
22	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	9	58	3,63	Sangat baik Sangat baik
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	Sangat puas yang menjadi pemateri. Sangat Singkat, Padat. Dan dapat sangat di mengerti
24	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
25	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	61	3,81	Ok
26	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	53	3,31	waktu utk tanyak jawab perlu ditambah agar pendalam materi dapat diperoleh detelisasi materi perlu di urai sebagai bentuk interprestasi dari berbagai perkara yg riil
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ok Ok
28	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Sudah baik dan di pertahankan , interaksi lebih jauh akan di dilanjutkan materi selanjutnya itu sistematika silabus yang baik
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	55	3,44	Diberikan waktu yang panjang untuk sesi tanya jawab. Terima kasih
31	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Semoga istiqomah dalam memberikan keilmuan dan pengalamannya. Sangat membantu untuk menambah ilmu, Barakallah.
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat luar biasa
33	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	8	43	2,69	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3,94	Sering-Sering Bintek supaya lebih paham alur hukum.
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	WAKTU TERLALU SINGKAT
37	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	0	50	3,13	
38	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	7	60	3,75	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	51	3,19	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Baik semua Baik
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	- -
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	- -
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	MantaPD MK
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	MantaPD MK

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Cukup Baik
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Waktu terlalu sempit berbanding Peserta yang terlalu banyak Peserta dibagi kedalam 2 kelompok Pemateri berganti kelas, dengan durasi Waktu yang sama
54	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Pertahankan
55	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	49	3,06	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	0	54	3,38	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat bagus harap dipertahankan
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	WAKTUNYA BISA DIPERPANJANG LAGI AGAR MATERI YANG DITERIMA BISA MENAMBAH PENGETAHUAN PESERTA
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
65	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	6	52	3,25	Seandainya sesi nya lama, pasti akan sangat mencerahkan harus diperbanyak ice breaking supaya peserta tidak ngantuk
66	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	paparan materi yang menghadirkan YM Hakim Konstitusi perlu dihadirkan pagi hari agar uraian materinya lebih mudah ditangkap oleh peserta. kalau malam cukup sulit, karena peserta sudah pada lelah. pengaturan/penjadwalan agar lebih baik lagi.
68	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	8	60	3,75	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penyajian materi sangat baik
70	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
71	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	
72	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	Secara Umum Sudah Sangat Baik Secara Umum Sudah Sangat Baik
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Lebih interaktif dan menggunakan EO atau pihak ke 3 sehingga tidak terlalu jenuh dan menjenuhkan
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Perbanyak terkait Hukum acara kedepan, hal teknis
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	9	54	3,38	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Secara keseluruhan sudah baik dan sangat sangat memberikan ilmu dan pengalaman kepada Kami. sangat sangat berterimakasih kepada MK yang sudah memberikan ilmu dan pengalaman. semoga kedepannya bisa bekerjasama kembali seperti ini . Terimakasih
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mkri. Pusdik luar biasa .... Mkri pusdik luar biasa
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik sehingga harus tetap dipertahankan
84	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	61	3,81	waktu di perbanyak
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah Baik... selipkan contoh2nya
86	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	8	56	3,50	Agar dapat Diberikan perbandingan antara Hukum Acara Tertulis dan kesalahan dalam praktek yang perlu dikoreksi.
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Cukup baik
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kualitas sinyal internet kadang timbul tenggelam
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
96	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	8	53	3,31	Soal yg diberikan kepada peserta harusnya lebih susah
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
98	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	Penyampaian materi di jam rawan (siang hari) disampaikan dengan intonasi yang lebih semangat dan membangkitkan forum yang lebih komunikatif . Agar peserta yang mulai mengantuk di jam rawan bisa kembali segar untuk menerima pendidikan dari para narasumber.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
99	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	54	3,38	Untuk narasumber sudah sangat bagus dalam memberikan materinya namun Untuk sesi materi berikutnya Narasumber kalau bisa lebih menghidupkan suasana kegiatan.
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
102	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	
	3,57	3,56	3,55	3,55	3,48	3,51	3,43	3,54	3,55	3,53	3,58	3,54	3,52	3,50	3,56	3,57			3,53	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrat**  
**Senin s.d. Kamis, 10 s.d.13 Juli 2023**

*Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik Sangat baik
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Semoga kedepan jumlah waktu penyajian di perpanjang secara teknis
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
5	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	53	3,31	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik sangat baik
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	WAKTUNYA DI TAMBAH LAGI
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	0	51	3,19	
10	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	59	3,69	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
14	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	8	58	3,63	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap
16	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	8	56	3,50	sistem pembelajaran sangat baik
17	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
18	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih, mohon dijaga dan ditingkatkan kualitas keilmuan dalam bidang ilmu Mahkamah Konstitusi. Terimakasih
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	8	59	3,69	baik dan pemateri komunikatif
24	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
25	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	8	58	3,63	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	9	56	3,50	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	9	51	3,19	baik sekali materinya
31	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	9	59	3,69	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Yg muda yg berkarya, 👍👍
33	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	9	61	3,81	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	61	3,81	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	55	3,44	
39	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	Tidak ada Tidak ada
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	- -
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	MantaPD MK
42	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	53	3,31	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik
44	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	8	52	3,25	cukup dinamis dan dialogis wawasan yg sangat baik utk penangan perselisihan
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	55	3,44	Bagus
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
48	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	0	53	3,31	
49	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	55	3,44	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	8	56	3,50	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	62	3,88	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	pemaparannya cukup baik dan mudah diserap untuk dimengerti
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	PENYAMPAIAN MATERI BAGUS DAN MENARIK BAGI PESERTA, SEMOGA BISA DITINGKATKAN LEBIH BAIK LAGI
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sajian materinya sudah bagus. simulasinya konteksnya juga relevan. dipertahakan model penyajian materinya
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	9	61	3,81	Secara Umum Sudah Sangat Baik Secara Umum Sudah Sangat Baik
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat bagus penyajian materinya , mohon untuk tetap dipertahankan
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah Baik Sudah Baik
66	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	2	3	2	5	51	3,19	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Saat ini sangat baik sekali baik itu dalam materi maupun penyampaian ddn penjelasannya jadi sampai saat ini sangat baik smuanya
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	9	59	3,69	lebih banyak waktu
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah baik ditingkatkan
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sudah baik
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pematerinya luara biasa dan materinya mudah dipahami
85	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	
88	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	8	53	3,31	saran dan pebaikan saya aula.. kursi para peserta dan meja kalau bisa di anti yang bagues... dan sebisa mungkin di sediap peserta ada mike di meja peserta masing masing.
	3,69	3,63	3,63	3,66	3,60	3,66	3,61	3,58	3,61	3,65	3,68	3,58	3,59	3,53	3,65	3,66			3,63	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrat  
Senin s.d. Kamis, 10 s.d.13 Juli 2023**

*Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	penambahan Materi teknis yang lebih diperdalam
3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	9	56	3,50	sangat memuaskan sangat memuaskan
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	BAGUS SEMUA NYA TIDAK ADA SARAN
7	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	53	3,31	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	9	47	2,94	Tidak ada Tidak ada
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
16	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	6	50	3,13	Maafkan bunda Tambunan, agak sedikit muter2 penjelasannya, terimakasih
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	8	53	3,31	
19	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantap pembawa materinya, sehingga peserta menjadi aktif
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	MantaPD kali bu Ida Ria Tambunan Horas ibu
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Jelas, lugas, asyik, happy, lucu. Salam sayang sehat selalu
23	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
24	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	52	3,25	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	cukup baik cara penyampaian nya ada humor dan caandaannya
26	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	Penjelasan yang praktis dan mudah difahami
27	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	9	54	3,38	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
32	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	8	51	3,19	cukup representatif dengan materi dan peristiwa yg ad di lapangan bagus dan apresiatif
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	8	55	3,44	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Cukup Bagus
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	--
40	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	49	3,06	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	5	44	2,75	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
47	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	0	57	3,56	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat bagus penyajian materinya mohon untuk dipertahankan
49	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	54	3,38	
50	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	Para Peserta menilai bahwa PPHU itu diajukan pemohonannya oleh Caleg langsung ke MK oleh Principal / Kuasa Hukum, padahal dalam sengketa Pileg di MK yang bersengketa adalah Parpol Peserta Pemilu yang tentunya Pemohonnya adalah Ketua Umum & Sekjen atau sebutan lain utk itu....Mohon dijelaskan kepada Para Peserta bahwa Caleg tidak bisa serta merta langsung mengajukan permohonan PPHU ke MK tanpa adanya Pemohonan dari Pimpinan Parpol (Ketum/Sekjen) suatu Partai tersebut....Demikian saran dari Saya, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih: Homat Kami: BHPD DPP Partai Demokrat Muajir
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	PENYAMPAIAN MATERI SUDAH BAIK, DAN SEDERHANA. SEMOGA BISA BERMANFAAT BAGI PESERTA BIMTEK PUSDIK MK
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sajian materi dan simulasi agar lebih baik lagi. terlalu monoton. snack harap bisa disajikan di dalam ruangan. terutama kopi
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	9	62	3,88	Secara Umum Sudah Sangat Baik Secara Umum Sudah Sangat Baik
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pecah suasananya Terimakasih
57	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Cukup Baik
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Lebih interaktif sehingga tidak monoton dalam penyajian materi
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik Sudah baik
64	3	3	4	4	3	3	2	2	3	4	3	3	3	4	3	3	6	50	3,13	
65	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	50	3,13	
66	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
69	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Sudah sangat baik harus tetap dipertahankan
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	lebih banyak waktu
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah baik Ditingkatkan
73	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	8	54	3,38	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Di pertahankan
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	7	47	2,94	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
87	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	
88	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	8	53	3,31	saran dan perbaikan.... Medepan upayakan lebih baik
	3,47	3,51	3,53	3,46	3,43	3,48	3,51	3,48	3,47	3,57	3,56	3,51	3,45	3,48	3,49	3,53			3,50	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrat  
Senin s.d. Kamis, 10 s.d.13 Juli 2023**

Nur Rakhman, S.Kom. & Rachman Karim

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	9	56	3,50	sangat memuaskan sangat memuaskan
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	- -
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	8	50	3,13	
11	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	BAGUS SEMUANYA
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
20	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	8	61	3,81	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
22	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	8	57	3,56	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	49	3,06	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	PENJELASAN MATERINYA AGAR LEBIH SIMPEL, JELAS, DAN MENARIK BAGI PESERTA. SEMOGA BISA DITINGKATKAN LEBIH BAIK LAGI
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	cara penyampaian harus dengan peragaan langsung atau praktik langsung. agar mudah pemahamannya untuk materi teknis, perlu lebih banyak simulasi
26	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	5	45	2,81	mohon supaya di bikin slide yang menarik kekinian supaya tidak membosankan dan interkasi dengan peserta diperbaiki
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	2	3	2	3	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Materi yang disampaikan sebenarnya bagus tp cara penyampaian terlihat monoton dan terlalu textbook. sehingga membuat terlihat kurang menarik dalam penyampaian materinya. apalagi hal ini sebenarnya terkait dg IT, seharusnya dapat dikemas dg baik dalam penyampaian. kedepan semoga dalam hal penyampaian dapat lebih menarik lagi, jika terkait dg teknis/IT sebaiknya diperbanyak dg contoh praktiknya.
29	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	8	56	3,50	Baik dan sangat asyik dan bagus cara penyampaian materi
30	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	8	54	3,38	
31	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	7	51	3,19	
32	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	47	2,94	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	8	56	3,50	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	3	5	27	1,69	
37	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	58	3,63	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Ok
39	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	7	45	2,81	Secara Umum Baik untuk pemateri 1 Secara Umum Cukup Baik untuk pemateri 2
40	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	7	55	3,44	
41	2	2	2	2	3	3	1	3	3	3	2	3	3	3	3	3	5	41	2,56	
42	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Lebih interaksi dan simulasi untuk ilmu terapan dengan pendekatan learning by doing Interaksi dengan interaktif
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	okay
48	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13	Baik dan bermanfaat
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	53	3,31	Cukup Baik
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Kedepan terhadap Aplikasi diberikan solusi terhadap terjadinya kelemahan sitem serta simpel terhadap bentuk file Word tahun nya tidak dijelaskan,
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	MantaPD MK
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Tidak ada Tidak ada
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat bagus materinya mohon dipertahankan
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik Sudah baik
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
61	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Waktu penyajian materi ditambah Untuk optimalisasi penyerapan materi Ditambah dengan latihan
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah baik Ditingkatkan
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Di pertahankan
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	9	58	3,63	tamba waktu
71	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	8	43	2,69	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	40	2,50	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
80	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
81	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
82	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
85	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	9	52	3,25	Mika berkenaan kedepan nanti langsung di lakukan praktek oleh para peserta
	3,32	3,34	3,28	3,33	3,36	3,36	3,29	3,32	3,42	3,41	3,39	3,39	3,40	3,42	3,40	3,40			3,37	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrat  
Senin s.d. Kamis, 10 s.d.13 Juli 2023

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	9	55	3,44	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	8	57	3,56	Materinya sangat menarik dan penyampaian baik sekali
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	9	56	3,50	sangat memuaskan sangat memuaskan
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	waktu ditambah untuk diskusi lebih banyak lagi
14	3	3	2	3	2	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	2	6	45	2,81	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	8	52	3,25	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	8	56	3,50	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat bagus penyajian materinya , mohon untuk dipertahankan
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	ok
26	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	BAIK
27	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	waktu untuk pertanyaan bagi peserta tetap harus diberikan misal minimal 2 paling tidak ada diberi kesempatan bertanya
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Secara keseluruhan sangat baik pemateri 1 Secara keseluruhan sangat baik pemateri 2
35	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	63	3,94	Tidak ada Tidak ada
37	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	9	51	3,19	sangat baik cukup bagus pengarahannya
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik Sudah baik
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Waktu penyajian materinya bisa di perpanjang agar peserta benar-benar bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih terhadap maksud dan tujuan materi tersebut
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	BAGUS SEMUA
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Ok
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	52	3,25	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih Terimakasih
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mkri luar biasa pertahankan Mkri luar biasa pertahankan
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	60	3,75	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Ditingkatkan
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Di pertahankan
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	Baik dan komunikatif materi ajarnya
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	9	58	3,63	waktu di tambah
62	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	--
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	8	55	3,44	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Patent
76	3	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
77	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
78	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
82	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
84	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	9	53	3,31	kedepan nanti langsung di lakukan pelatihan sedang.
	3,56	3,56	3,48	3,50	3,55	3,54	3,55	3,54	3,57	3,55	3,52	3,50	3,50	3,49	3,55	3,54			3,53	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrat  
Senin s.d. Kamis, 10 s.d.13 Juli 2023**

*Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H., Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M., & Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	--
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	59	3,69	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	9	55	3,44	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik pematerynya
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	8	57	3,56	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	9	62	3,88	Pemateri nya baik dan hebat
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada/Sangat baik the best Tidak ada
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	cukup bagus bagi peserta dalam mengikuti materi ini dan materi lainnya cukup bagus
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	9	56	3,50	sangat baik sangat baik
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Penyajian materinya sudah cukup baik dan harapan agar ke depannya bisa ditingkatkan lagi.
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	bagus semua
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	PEMATERI 1, SECARA KESELURUHAN SUDAH SANGAT BAIK PEMATERI 2, SECARA KESELURUHAN SUDAH SANGAT BAIK
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ok
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
39	3	4	3	3	4	3	4	2	3	3	3	3	4	3	3	3	7	51	3,19	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	57	3,56	
46	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	52	3,25	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	8	50	3,13	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan Perubahan dan Perbaikan
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	7	51	3,19	
52	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	8	52	3,25	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Ditingkatkan
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Di pertahankan
56	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	59	3,69	memberikan pemanduan yang baik
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	9	58	3,63	tamba waktu
60	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
68	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	8	60	3,75	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	8	57	3,56	Kedepan tugas yg diberikan agar lebih susah sebagai latihan peserta
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	MantaPD MK
76	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
82	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	9	54	3,38	saran saya Masih sama yaitu... jika di mungkin langsung latihan persidangan.
	3,62	3,59	3,61	3,59	3,62	3,52	3,61	3,59	3,62	3,63	3,63	3,61	3,61	3,60	3,60	3,60			3,60	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrat  
Senin s.d. Kamis, 10 s.d.13 Juli 2023**

*Hani Adhani, S.H., M.H., Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H., Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H., & M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.*

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	0	50	3,13		
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00		
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
7	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	7	58	3,63	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	bagus semua	
11	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	8	57	3,56		
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
13	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	8	54	3,38	Substansi nya cukup baik dan menarik untuk dipelajari dan di cema	
14	3	2	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	6	49	3,06		
15	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06		
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
19	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	8	58	3,63		
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
23	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13		
24	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94		
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
26	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75		
27	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06		
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	PEMATERI 1 SUDAH SANGAT BAIK SECARA KESELURUHAN. PEMATERI 2 SUDAH SANGAT BAIK SECARA KESELURUHAN.	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
32	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	9	56	3,50	sangat memuaskan sangat memuaskan	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Yang Sudah baik lanjutan, yang belum baik diperbaiki. Terimakasih. Perubahan dan Perbaikan	
35	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	8	55	3,44		
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mkri luar biasa pertahankan Mkri luar biasa pertahankan	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Harus ada acara rekreasi Makanan enak hanya gak ada bubur dan buah kurang	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Di pertahankan	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	MOHON KETEGASAN, KALAU SUDAH DILARANG DI AREA TERSEBUT TIDAK BOLEH MEROKOK MOHON DIKONTROL AGAR BISA MELARANG APABILA ADA YANG MEROKOK, DEMIKIAN DISAMPAIKAN....SEMOGA MAHKAMAH KONSTITUSI TERUS SEMAKIN BAIK DALAM MENGAJAL KONSTITUSI.	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Baik Ditingkatkan	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Air kamar mandi supaya diperbaiki karena air panasnya tdk ada dan airnya kecil sekali dan tempat olahraga Pimpongnya sangat menunjang Olahraga pagi dan mengisi waktu Senggang sehingga ada keaktifan kita sebagai peserta Pendidikan maaf Saran kami Menu makanannya enak tapi Pering Nasi tdk siap sehingga harus antri nunggu piring nasinya lagi di cuci dulu dan Kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua perhatian dari Pusdik Pancasila & Konstitusi sehingga menambah Wawasan dan Ilmu bagi kami utk diteruskan kepada Masyarakat yang perlu Pengetahuan tentang Hukum	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
45	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	9	59	3,69	evaluasi materi yang bermanfaat	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
47	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	9	59	3,69	tamba waktu	
48	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	55	3,44		
49	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31		

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	53	3,31	semua okay
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	- -
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	8	51	3,19	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	62	3,88	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	8	57	3,56	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	MantaPD MK
76	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Penyajian materinya bisa dibuat lebih menarik lagi agar peserta bisa menerima isi materi dengan baik
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
82	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	8	52	3,25	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
84	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	9	55	3,44	semoga Mede-an lebih bogus
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik
	3,60	3,56	3,60	3,60	3,58	3,61	3,58	3,59	3,59	3,59	3,58	3,58	3,61	3,60	3,61	3,61			3,59	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrat  
Senin s.d. Kamis, 10 s.d 13 Juli 2023**

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	3	7	70	3,33	
2	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
3	4	4	3	11	4	3	4	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	4	4	11	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	73	3,48	
4	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	3	4	7	67	3,19	
5	4	4	4	12	4	4	4	12	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sudah baik Terus tingkatkan mantap
6	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
7	4	4	4	12	3	4	4	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
8	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
9	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sangat memuaskan Harus ada rekreasi Hiburan kurang
10	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	
11	3	3	3	9	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.		3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	75	3,57	semua fasilitas sdh baik
12	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	3	7	4	0	4	4	4	8	78	3,71	SECARA UMUM SEMUANYA SANGAT BAIK, PERLU DITINGKATKAN VARIASI MAKANAN DAN SARANA PENUNJANG
13	3	4	4	11	4	4	4	12	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
14	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	3	4	10	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	4	7	3	3	6	73	3,48	
15	3	3	3	9	3	3	3	9	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
16	4	4	4	12	4	4	4	12	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	kedepan lebih baik lagi di kamar kami tempat menginap tidak ada colokan listrik sehingga kami tidk dapat charge hand phone jaya selalu pusdiklat MK sangat bermanfaat bagi banyak orang
17	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Bagus
18	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	4	4	8	74	3,52	
19	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	melakukan pelatihan ke daerah-daerah
20	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
21	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
22	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Melakukan pelatihan ke daerah-daerah Melakukan pelatihan ke daerah-daerah Melakukan pelatihan ke daerah-daerah

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
23	3	3	3	9	3	3	3	9	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	---
24	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
25	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	perlu menyelenggarakan BIMTEK PHPU tentang Pilkada diharapkan bisa menghadirkan semua hakim konstitusi untuk menjadi pemateri perlu pengaturan waktu yang lebih efektif
26	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
27	3	4	4	11	4	4	3	11	Syukri Asy'ari, S.H., M.Hum.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	80	3,81	
28	4	4	4	12	4	4	4	12	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
29	4	4	4	12	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	72	3,43	
30	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
31	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
34	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
35	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Air di Graha Konstitusi sempat Mati, sehingga mengakibatkan telat masuk kelas
36	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	2	6	81	3,86	Internet perlu ditingkatkan karena sering terputus otomatis
37	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Air di GK 4 sempat mati, jadi telat masuk kelas, mohon diperbaiki
39	3	4	4	11	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Mkri luar biasa pertahankan Mkri luar biasa pertahankan Mkri luar biasa pertahankan
40	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
41	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
42	4	3	3	10	3	4	3	10	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	4	3	3	10	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	3	7	71	3,38	
43	3	3	3	9	3	3	3	9	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	71	3,38	Perlu di jaga dan di pertahankan
44	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Mohon diperhatikan air kadang sering macet, tapi setelah hari berikutnya sudah normal kembali. untuk kegiatan sudah berjalan dengan baik dan petugas ramah-ramah. Rangkaian kegiatan berjalan dengan sukses
45	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sinyal internet di kamar agak lemah Mushola yg tdk ada pengeras suara tuk azan & iqomah sbgi wktu sholat tiba
46	3	3	3	9	3	3	3	9	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	4	7	70	3,33	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
47	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
48	2	3	2	7	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Angga Putri Gardina	3	2	5	2	3	3	8	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	58	2,76	Cukup Perbaikan fasilitas km (shower)
49	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
50	3	4	4	11	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	74	3,52	Colokan charger dikamar tidak memadai. Mungkin bisa diperbanyak
51	4	4	3	11	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Sdh OK
52	3	3	3	9	3	3	3	9	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	4	7	70	3,33	
53	4	4	4	12	3	3	3	9	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	Uang saku harus diadakan kembali seperti Bimtek terdahulu Fasilitas Gym utk menjaga kebugaran peserta
54	4	4	3	11	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Sdh OK
55	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanda Adytiansyah	4	3	7	4	3	3	10	3	2	5	2	3	5	4	3	7	4	3	7	3	3	6	66	3,14	Agar fasilitas kamar lebih dilengkapi , dan ditambahkan colokan listrik
56	4	3	3	10	4	3	4	11	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Bangkit Panji Anarogo	3	4	7	4	4	3	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	73	3,48	Perlu dipertahankan kualitas dan pembelajaran . makanan kalau bisa diperbanyak variasinya dan tidak tiap hari disajikan ayam. Yang lain is ok
57	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Perlu di pertahankan
58	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
59	4	3	3	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Suhardi	4	4	8	3	4	3	10	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Saya merasa sangat beruntung bisa mengikuti program bimtek MK ini walaupun bukan dari hukum semoga kesempatan thn depan berkenan saya diikutsertakan Ada meja tenis kebetulan saya hobi tapi bat nya yg perlu diganti Hiburan malam terakhir memuaskan
60	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	83	3,95	Kualitas internet timbul tenggelam Tidak ada sejadah di kamar
61	3	4	3	10	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	
62	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	2	5	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	Cukup Perbaikan fasilitas km
63	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Lanjutkan Perubahan dan Perbaikan Terimakasih
64	3	4	3	10	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	3	4	7	3	4	3	10	3	3	6	3	4	7	3	4	7	4	4	8	3	4	7	73	3,48	Pelaksanaan yang sudah baik hendaknya dipertahankan
65	4	4	4	12	4	4	4	12	Nur Rakhman, S.Kom.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
66	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	83	3,95	Kualitas sinyal internet kadang timbul tenggelam Mohon siapkan sejadah di kamar
67	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
68	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Mengenai klaim tiket datang dan pulang bisa dipermudah dan diperbaiki lagi ke depannya Bimbingan Teknis ini ke depan bisa diperpanjang waktunya menjadi satu minggu agar materi yang diterima benar-benar bisa bermanfaat bagi peserta sebelum kembali ke Kantor DPD masing-masing daerah.
69	3	4	3	10	3	3	4	10	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	3	3	10	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	67	3,19	fasilitas kamar seperti tv dan handuk harus di perhatikan dan kelancaran air mandi pun di perhatikan
70	3	4	4	11	3	4	3	10	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	3	4	10	3	3	6	2	3	5	3	4	7	3	2	5	3	4	7	69	3,29	
71	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Sudah Bagus
72	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	70	3,33	
73	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
74	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Diharapkan kepada MK, menjadikan alumni bimtek sebagai salah satu perpanjangan tangan informatif MK dari unsur Partai Politik sehingga tidak hanya usai begitu saja. Adanya penambahan spot potu untuk bisa diakses dan dipublikasikan secara visual agar MK tidak dilmejkan mengenkan lalaa familiar tapi bermartabat.
75	3	3	3	9	4	4	4	12	Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	2	5	71	3,38	
76	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	TERIMA KASIH BANYAK PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI - MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Terima kasih banyak untuk kepala pusdik.mkri, para pegawai, para narasumber, para moderator, para panitia, dll
77	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
78	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
79	4	4	4	12	4	3	4	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
80	4	4	4	12	4	4	4	12	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mantap
81	3	4	3	10	4	3	3	10	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	4	7	70	3,33	
82	3	3	3	9	3	3	3	9	Hani Adhani, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	68	3,24	semuanya sudah ok, semg bisa dipertahankan
83	3	4	3	10	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	4	3	10	3	3	6	3	4	7	3	4	7	4	4	8	3	4	7	73	3,48	
	3,53	3,63	3,52	3,56	3,59	3,57	3,55	3,57			3,61	3,63	3,62	3,59	3,61	3,60	3,60	3,58	3,49	3,54	3,43	3,55	3,49	3,59	3,64	3,61	3,72	3,70	3,71	3,61	3,63	3,62	79,01	3,59	



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TAHUN 2023**

# DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD

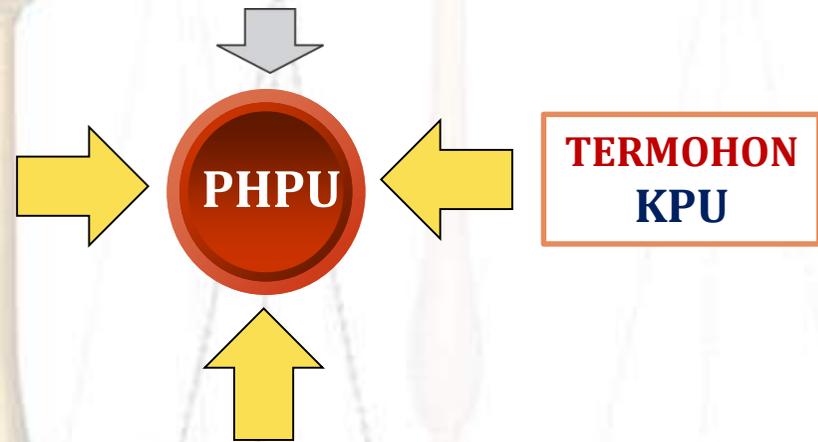


# PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

## PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

## PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



## PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

# OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan  
perolehan suara  
hasil Pemilu Anggota  
DPR dan DPRD secara  
nasional oleh KPU**

**yang memengaruhi**

**Perolehan kursi  
Pemohon dan/atau  
terpilihnya  
anggota  
DPR dan/atau DPRD  
di suatu daerah  
pemilihan**

# PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
  - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
  - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. permohonan;
  - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
  - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
  - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
  - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

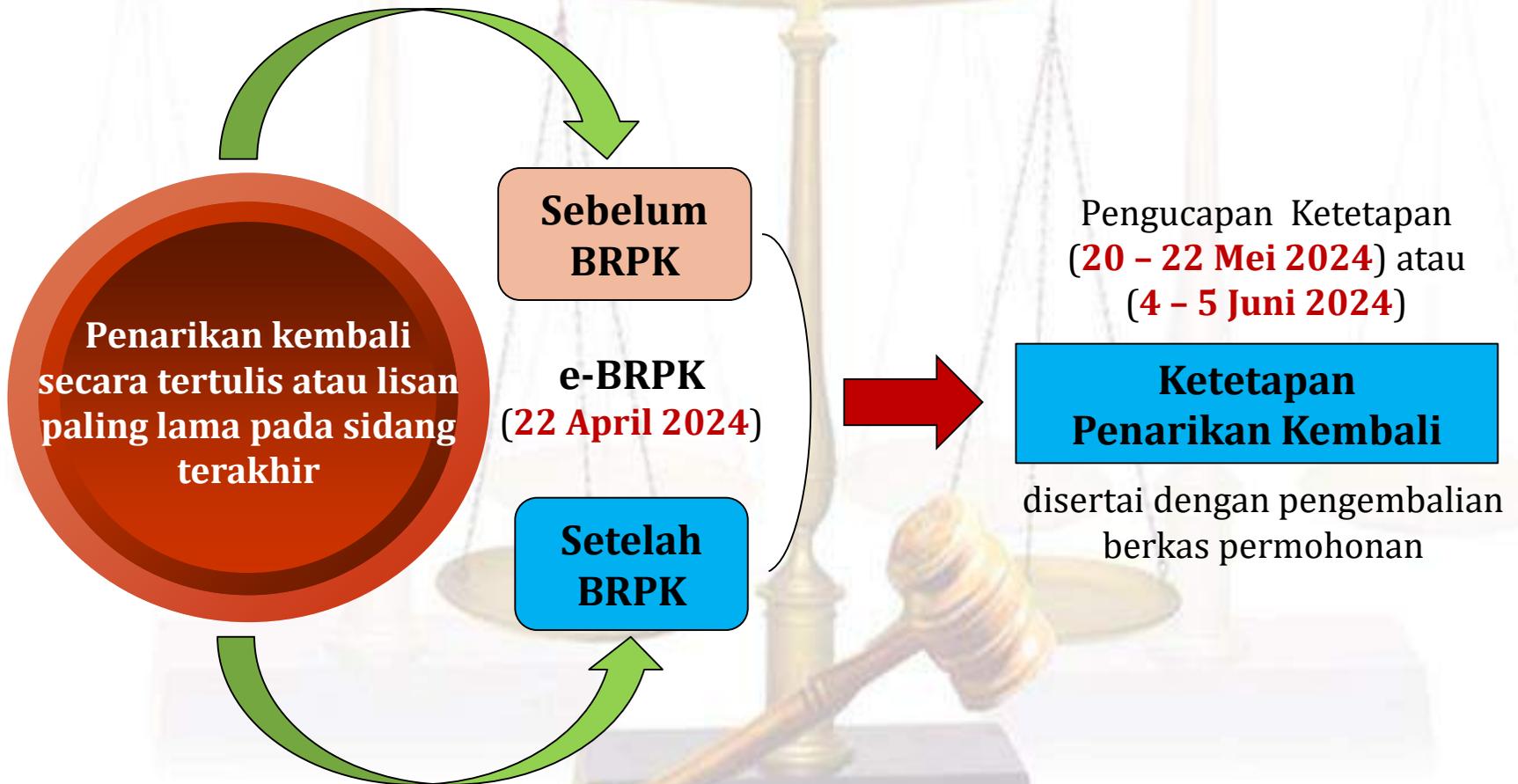
# PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - b.1 kewenangan Mahkamah
    - b.2 kedudukan hukum Pemohon
    - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
    - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

## Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik.

# PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



# JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
  - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
    1. kewenangan Mahkamah
    2. kedudukan hukum Pemohon
    3. tenggang waktu pengajuan permohonan
    4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
    5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

## Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik.

# PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



# KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan  
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum  
Pemeriksaan  
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

## Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *pdf*.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik.

# KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
  - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
    1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
    2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

## Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TAHUN 2023**

# DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

# PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

# PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

## Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

# PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

## Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

# JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

# ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD) (Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
  - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
  - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
  - b. KPU/KIP kabupaten/kota
  - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
  - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

## Lanjutan ...

**Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

**Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

**Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

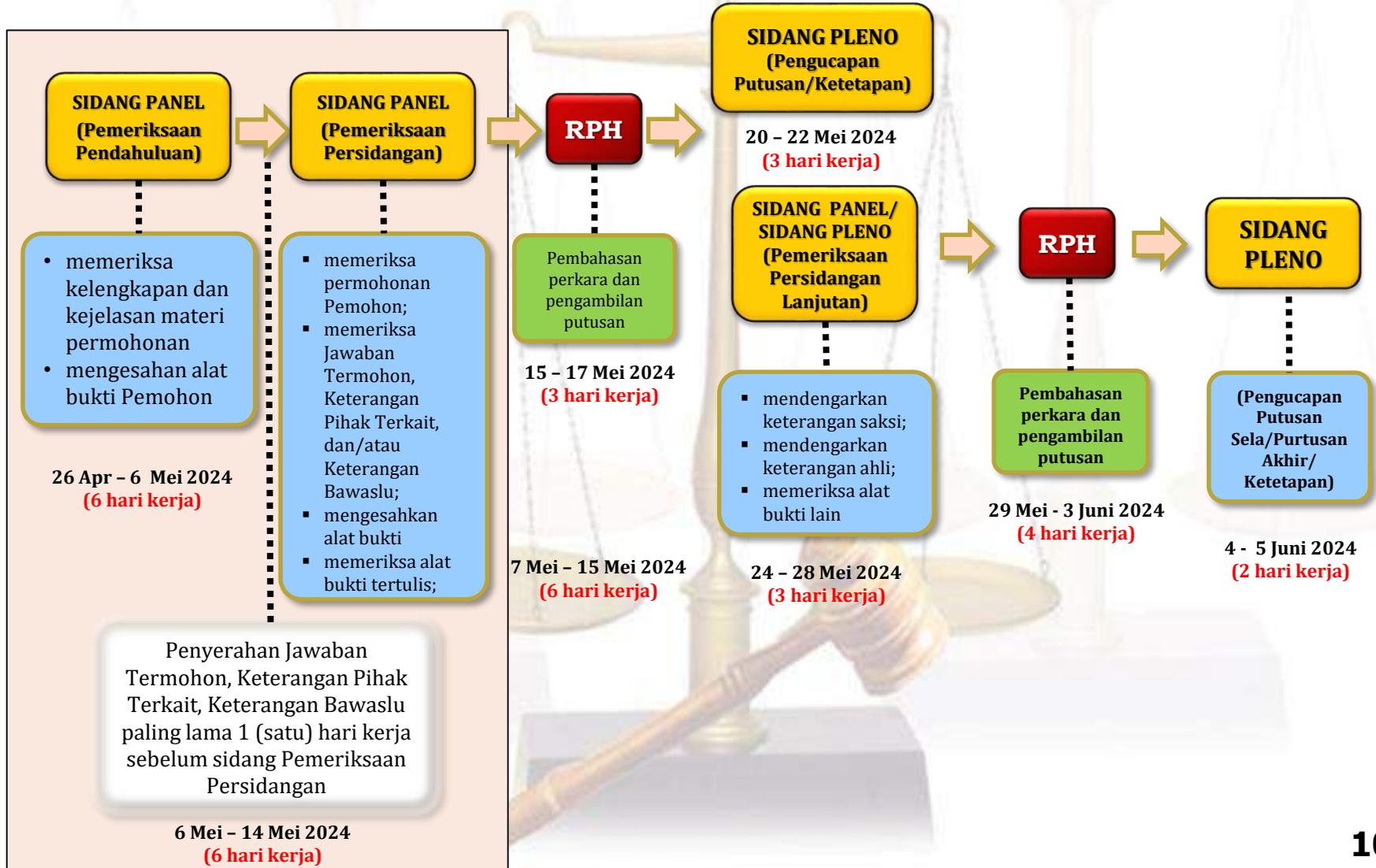
## Lanjutan ...

**Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

**Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

**Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

# PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



# PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

**Putusan Mahkamah**, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan

## **Putusan Sela Mahkamah:**

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

## Lanjutan ...

### **Amar Putusan:**

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

### **Ketetapan Mahkamah:**

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

### **Amar Ketetapan:**

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

# PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**“MAHKAMAH KONSTITUSI  
DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM”**

**Oleh:**

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.  
Asisten Ahli Hakim Konstitusi**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi RI**

# Materi Pemaparan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Struktur dan Mekanisme Kerja

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Perkembangan dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

# Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung  
Amerika Serikat  
*Marbury v Madison*  
(1803)**

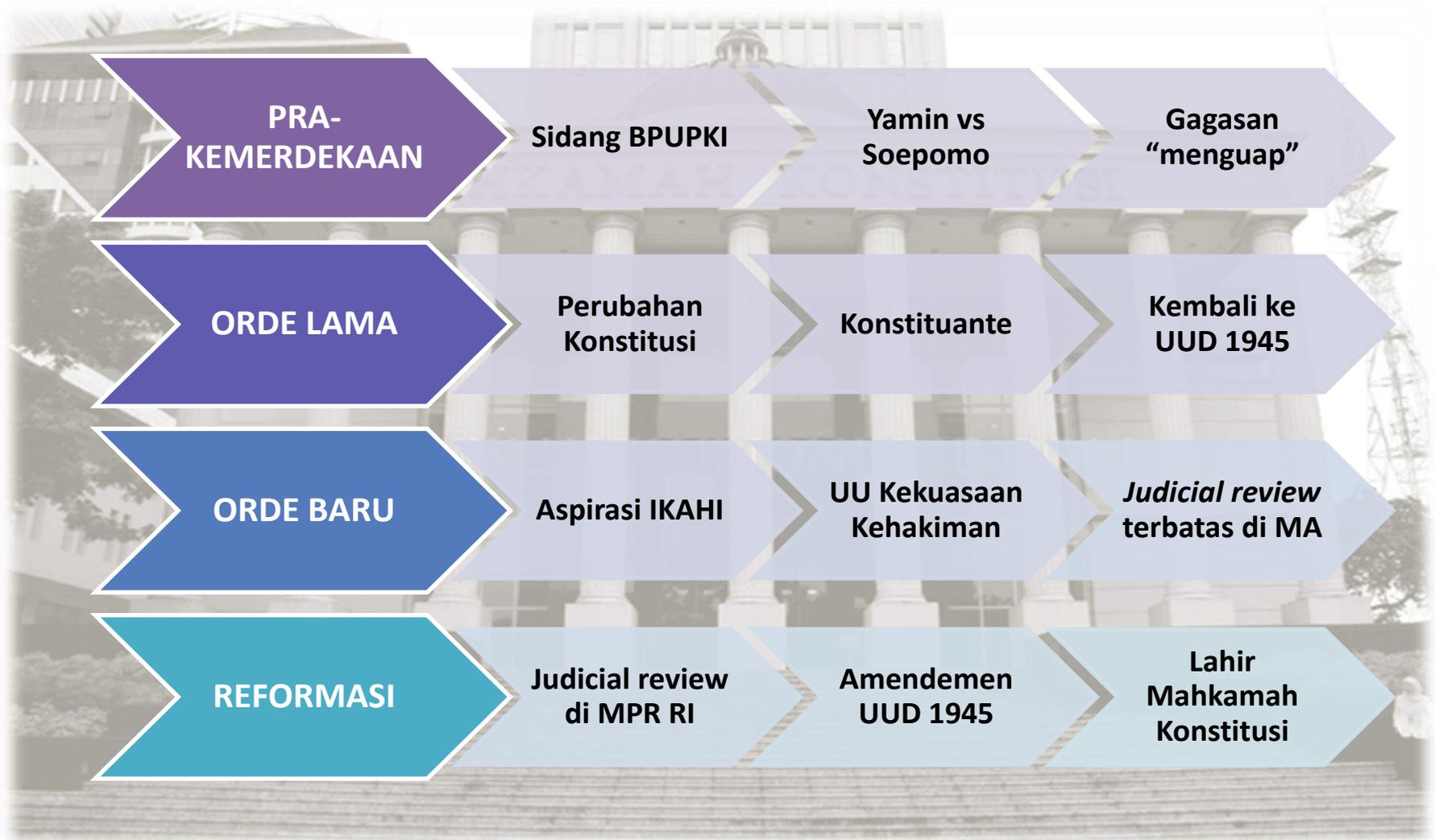


**Mahkamah  
Konstitusi Austria  
(1920)**

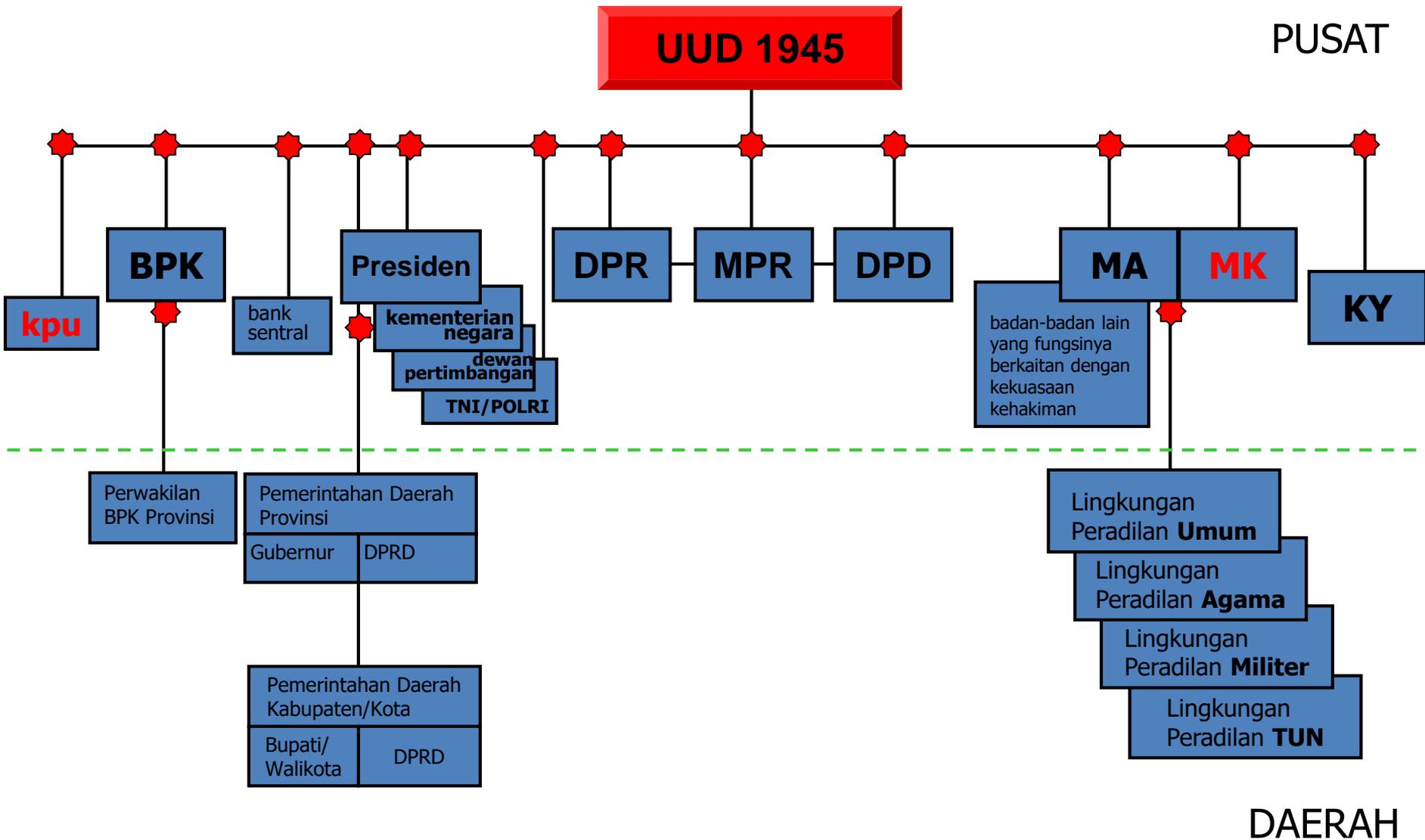


**Mahkamah  
Konstitusi Republik  
Indonesia  
(2003)**

# Sejarah Pembentukan MK Indonesia



# Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



# Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik

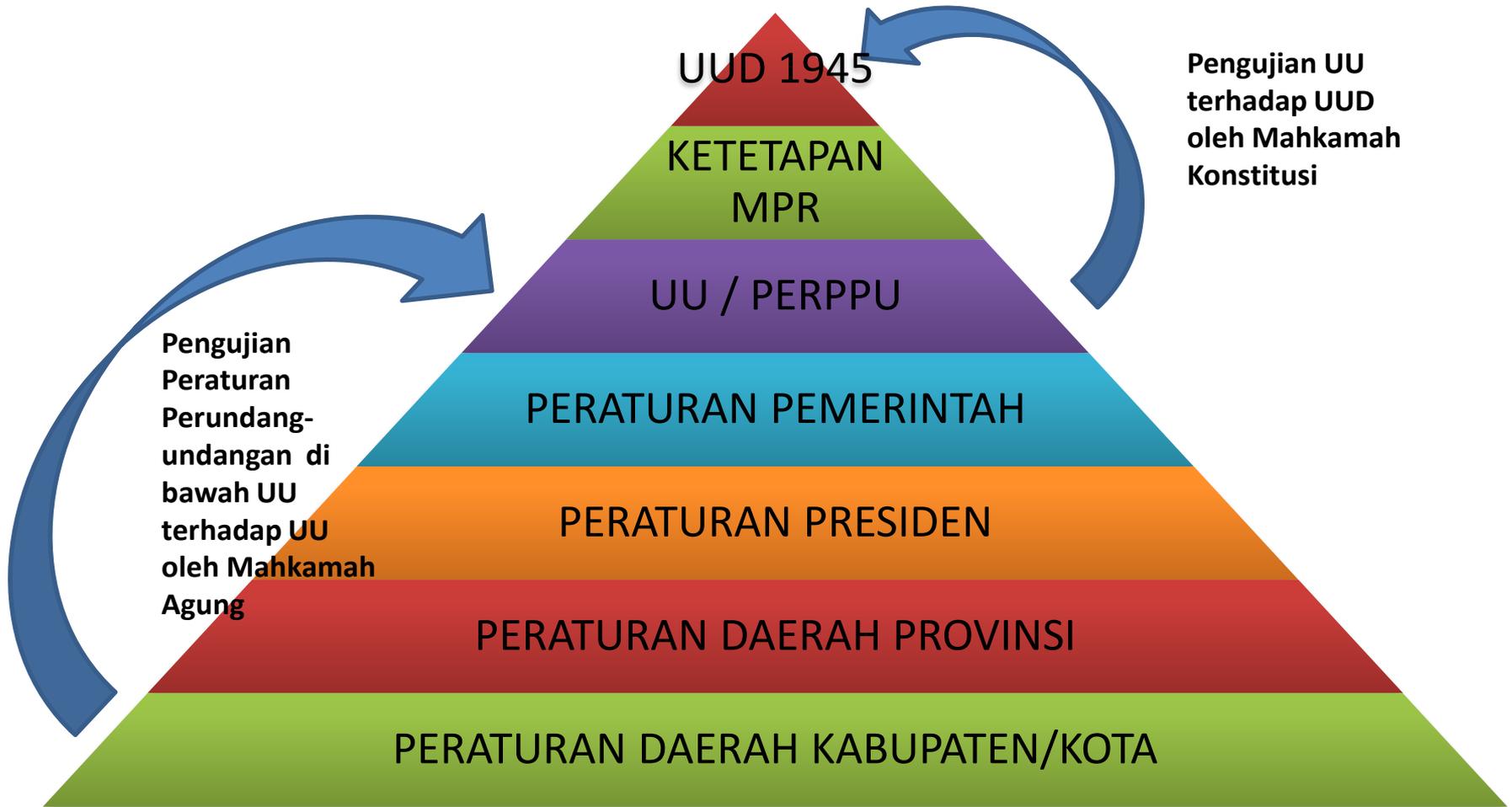
4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

# Supremasi Konstitusi di Indonesia



# Fungsi Mahkamah Konstitusi



*The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy*



*The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights*



*The Final Interpreter of the Constitution*

# ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



# PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Pasif dan Aktif
- Asas Pembuktian



# Rekapitulasi Putusan MK

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
PUU	1.651	302	624	516	170	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	0	1
Pemilu Legislatif	671	53	423	148	13	34	0
Pemilu Presiden	5	0	5	0	0	0	0
Pemilu Kepala Daerah	1.136	83	495	509	35	7	7

**Keterangan:** Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

# Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



# Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
  - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
  - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
  - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
  - Pilpres dengan dua Pasangan Calon
  - Syarat menjadi anggota KPU



# Contoh Putusan PUU di MK

- **Lanjutan:**
  - Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
  - Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
  - Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
  - Pelaksanaan Pemilu Serentak
  - Syarat Calon Anggota DPD
  - Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
  - Pengadilan Khusus Pemilu/Pilkada
  - dsb.



# Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu

## ❑ PEMOHON:

1. **Pemilu Presiden:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **Pemilu Legislatif:**
  - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu. Bagaimana dengan Caleg?
  - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **Pemilu Kepala Daerah:**
  - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

## ❑ TERMOHON:

1. KPU Pusat
2. KPU Provinsi
3. KPU Kabupaten/Kota

## ❑ PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU





**Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**  
(Penyelesaian di MK: 14 hari kerja)



**Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD**  
(Penyelesaian di MK: 30 hari kerja)



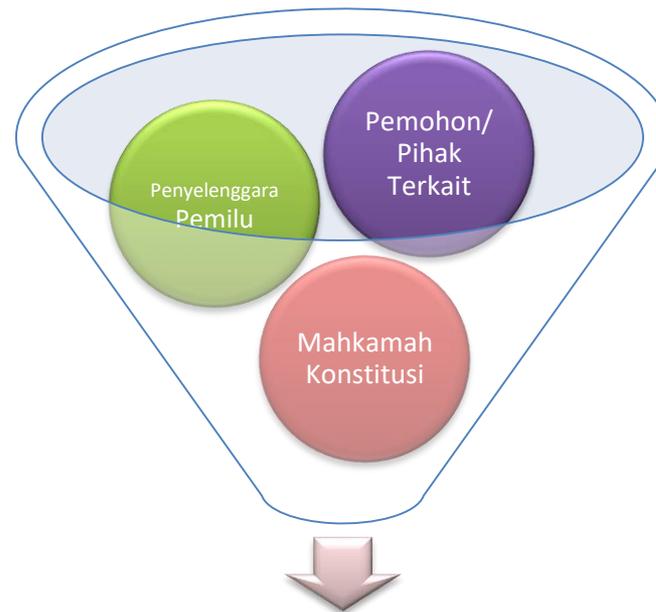
**Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**  
(Penyelesaian di MK: 45 hari kerja)

# Pemilihan di Indonesia

# Adanya Perbedaan Perspektif



## Dinamika Penanganan PHPU



**Progresivitas Hukum Acara dan  
Putusan MK**

# Pergeseran Paradigma Penanganan Sengketa Hasil Pemilu



## Keadilan Prosedural

Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



## Keadilan Substantif

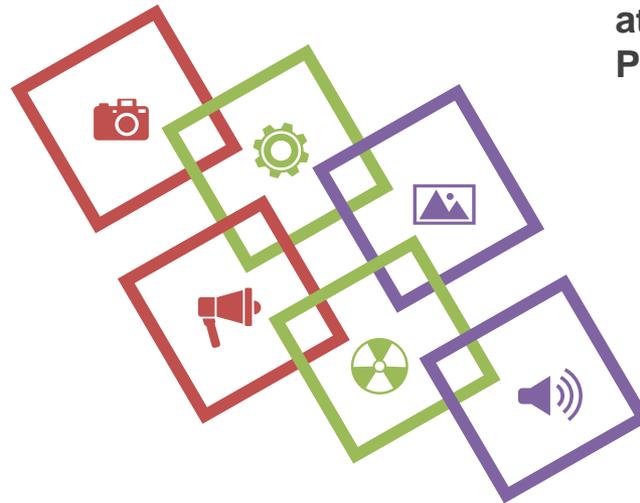
Pendekatan progresif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur

# Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- Money Politics (Vote Buying)

- Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara

- Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu



- Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu

- Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik

- Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT

- dan lain sebagainya

# Pelanggaran TSM dan Signifikan

## Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

## Sistematis

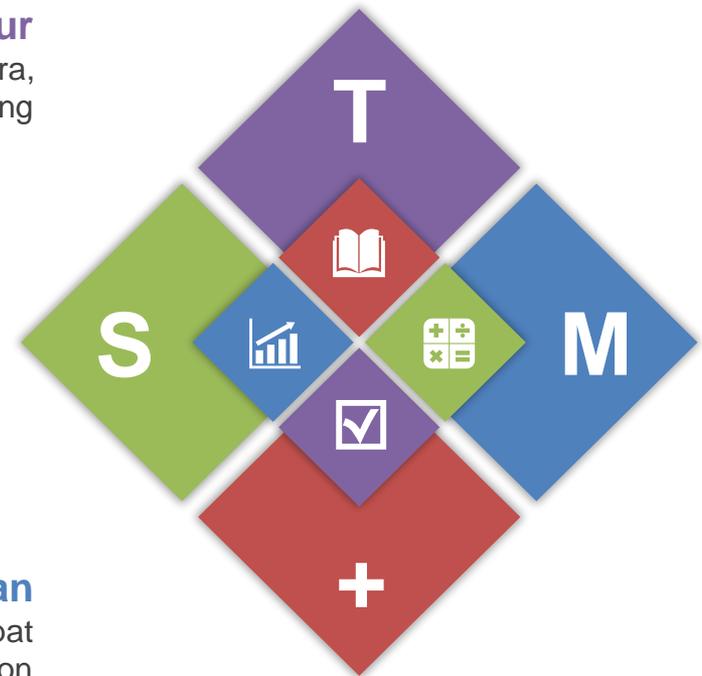
Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

## Masif

Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

## Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



# Transformasi Sistem Noken

Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009



Pemilu 2009: Noken di Yahukimo Konstitusional

Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014



Pemilu 2014: Penerapan Noken pada Wilayah Terbatas

Putusan Nomor 1/PHPU.Pres-XII/2014



Mendorong terjadinya integrasi sistem Pemilu secara nasional

16 Kabupaten  
(< 2018)

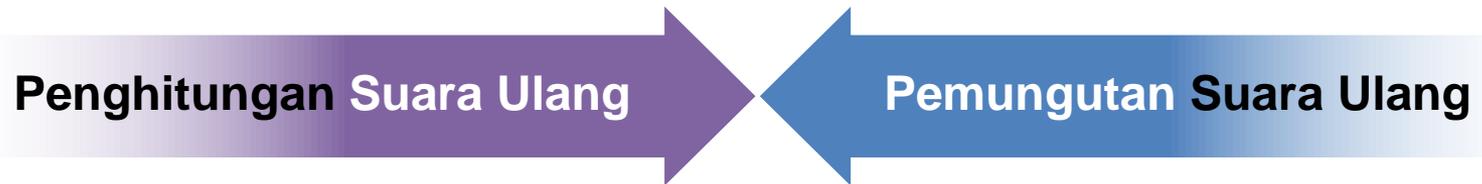
14 Kabupaten  
(2018)

12 Kabupaten  
(2019)

1 Kabupaten  
(2020)

# Amar Putusan: PSU

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Putusan Sela



Putusan Akhir

# Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

## ▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

## ▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Terima Kasih

faiz@mkri.id | [www.panmohamadfaiz.com](http://www.panmohamadfaiz.com)



## Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



[faiz@mkri.id](mailto:faiz@mkri.id)



[www.panmohamadfaiz.com](http://www.panmohamadfaiz.com) (Website dan Karya Tulis)



[@panmohamadfaiz](#) (Media Sosial)

- Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI
- *External Research Fellow* di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia
- Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
- Dosen Pengajar di FH Universitas Brawijaya, FH UGM, FH UI, dan FH Universitas Jember
- Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
- Trainer Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
- Editor-in-Chief dari Constitutional Review Journal (Scopus dan Sinta-1)
- Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN  
JADWAL PENANGANAN PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TAHUN 2023**

# DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

# **TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

# PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan  
permohonan ke MK  
paling lama **3 x 24 jam**  
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu  
Serentak Tahun 2024  
**15 Feb – 20 Mar 2024**

**Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB**

**Kamis 15 Feb 2024,  
10.00 WIB**

1 x 24  
jam

**Jumat 16 Feb 2024,  
10.00 WIB**

2 x 24  
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,  
10.00 WIB**

3 x 24  
jam

**Minggu 18 Feb 2024,  
10.00 WIB**

**Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB**

**Rabu 20 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

1 x 24  
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

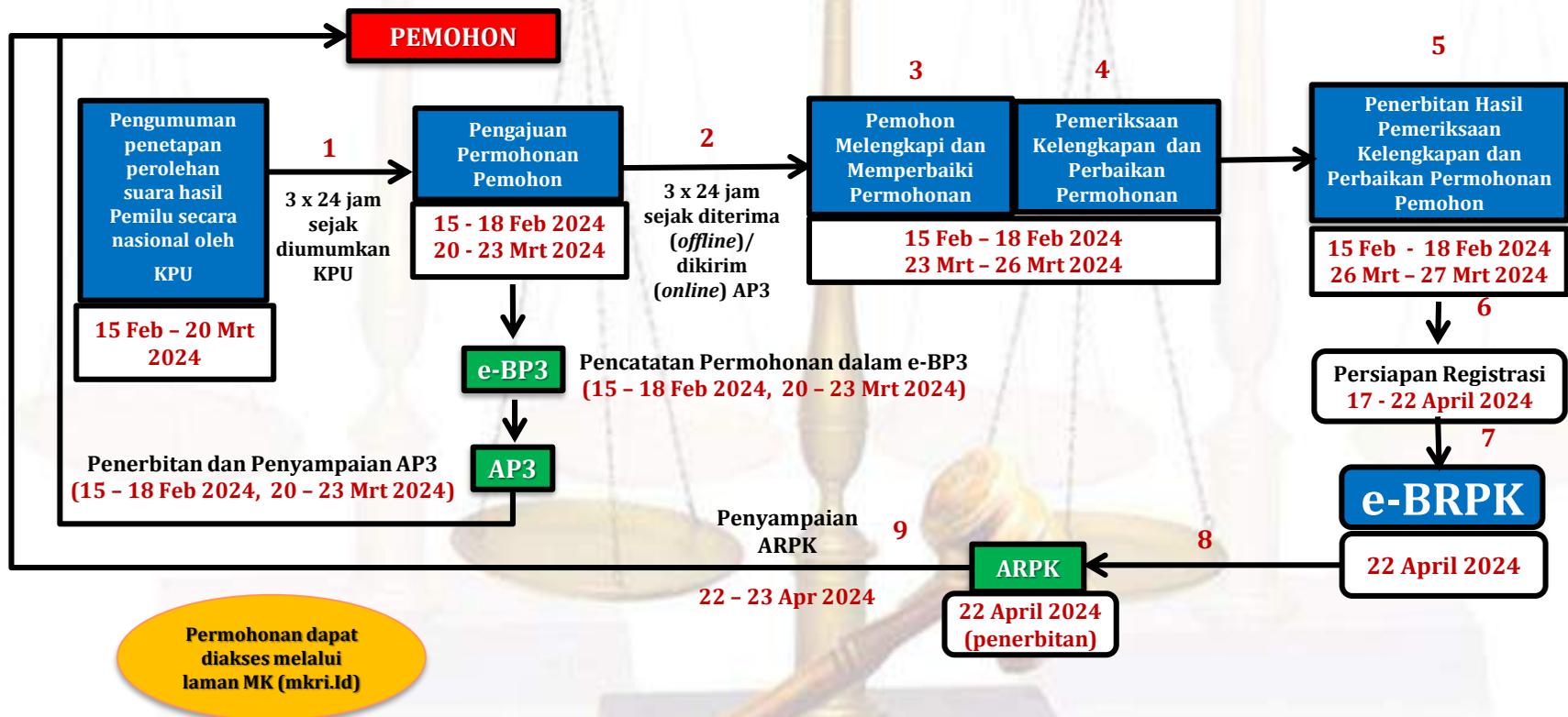
2 x 24  
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

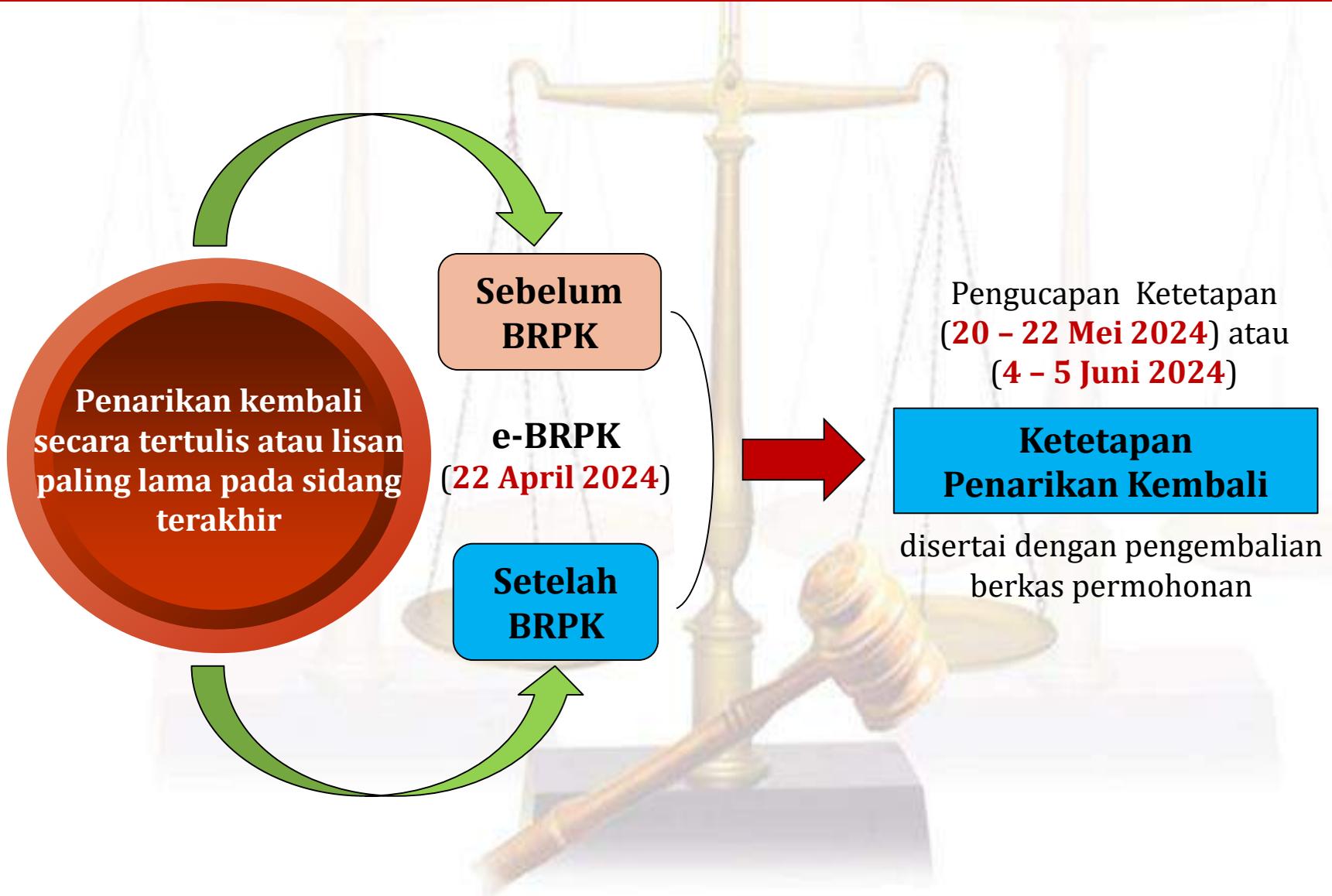
3 x 24  
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

# MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

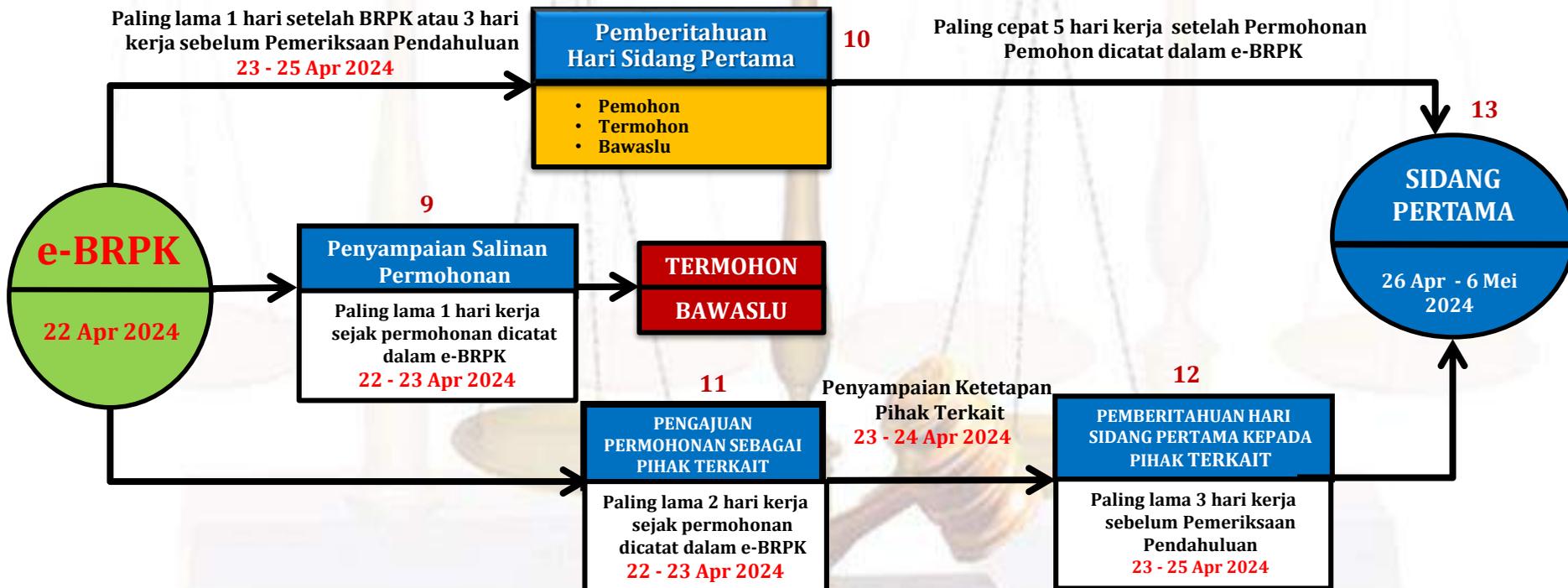


# MEKANISME PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

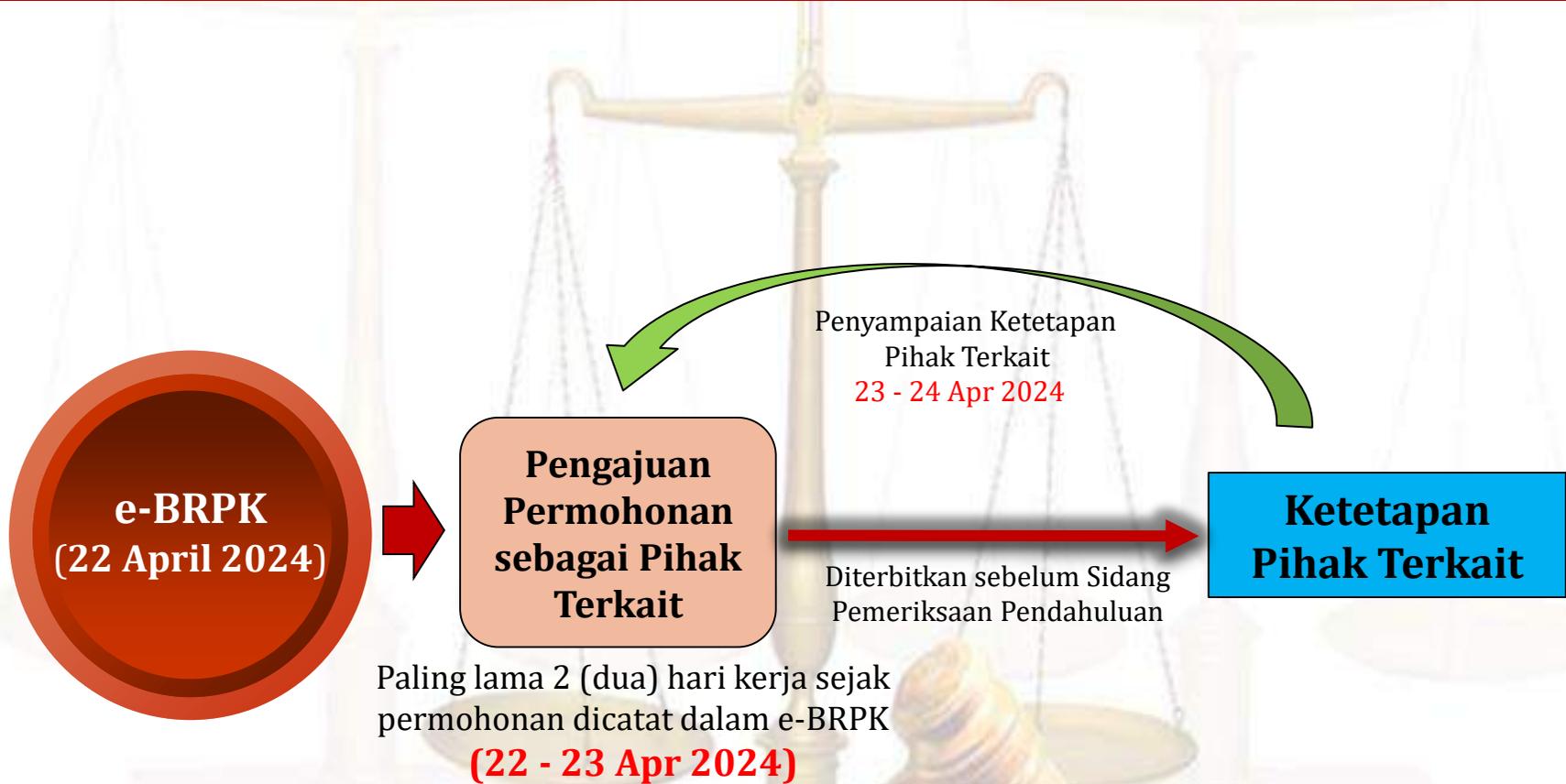


# MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

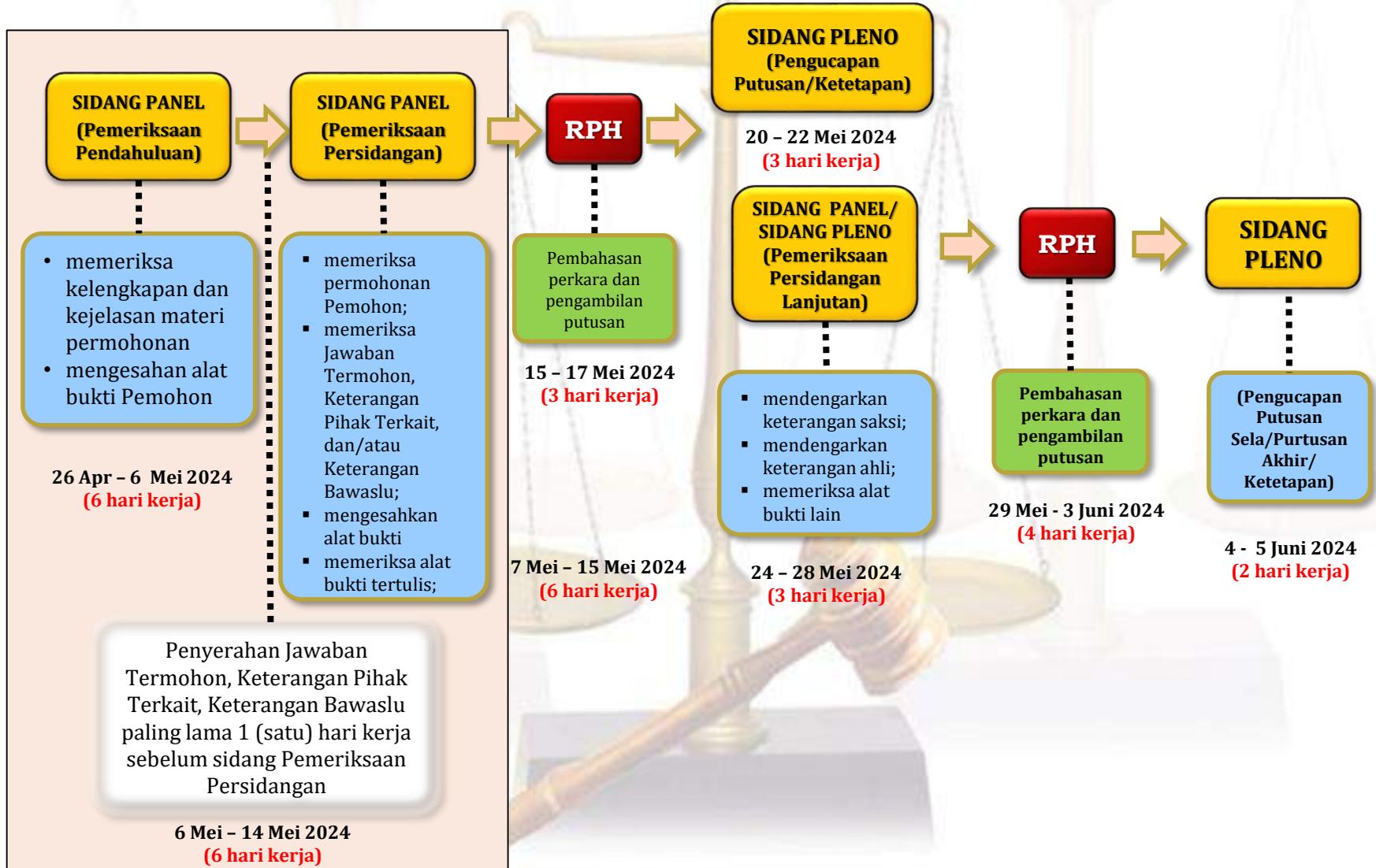
(PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



# MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



# MEKANISME PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

# AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



**1**

Dasar Infrastruktur TIK,  
Persidangan Jarak Jauh dan  
Streaming Persidangan Mahkamah  
Konstitusi

**2**

Sistem Informasi Penanganan  
Perkara Elektronik  
([simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id))

**3**

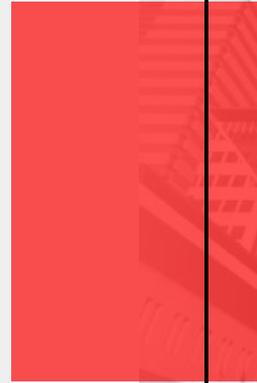
Website Mahkamah Konstitusi,  
Case Tracking dan Case Retrieval

**4**

Click MK

# PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.

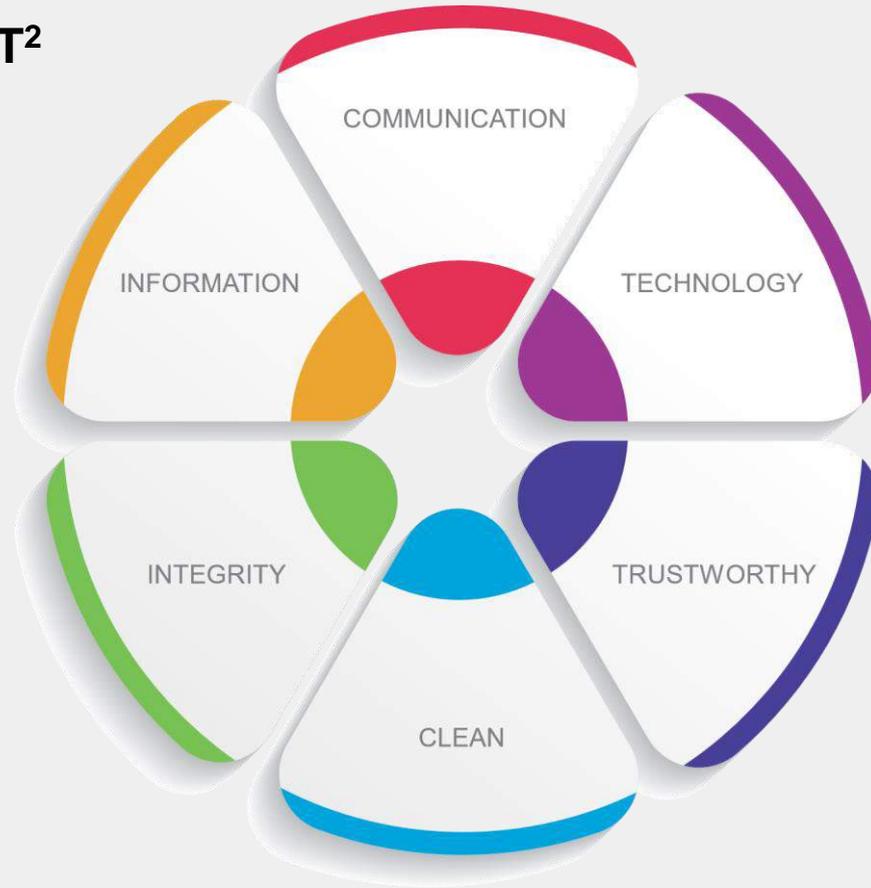




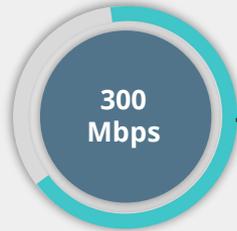
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

# PENGERTIAN ICT<sup>2</sup>



# JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300  
Mbps

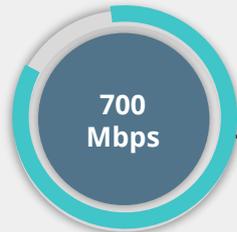
**Bandwith 300 Mbps  
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700  
Mbps

**Bandwith 700 Mbps  
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1

## PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan

3

## ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth

2

## IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

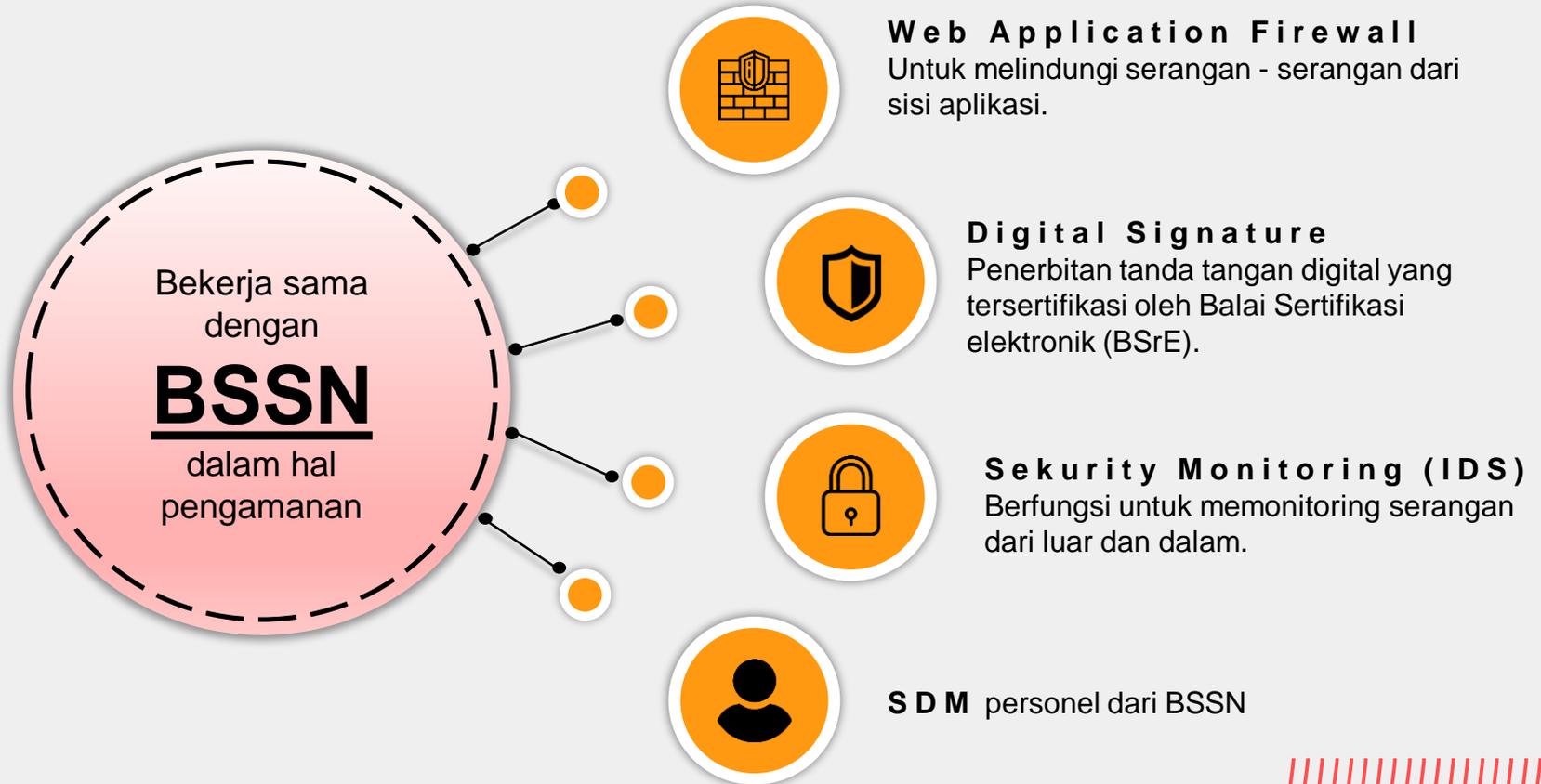
4

## MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

#### RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

#### KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK:**

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

#### **SAKSI DAN AHLI:**

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

#### PERKEMBANGAN ICT:

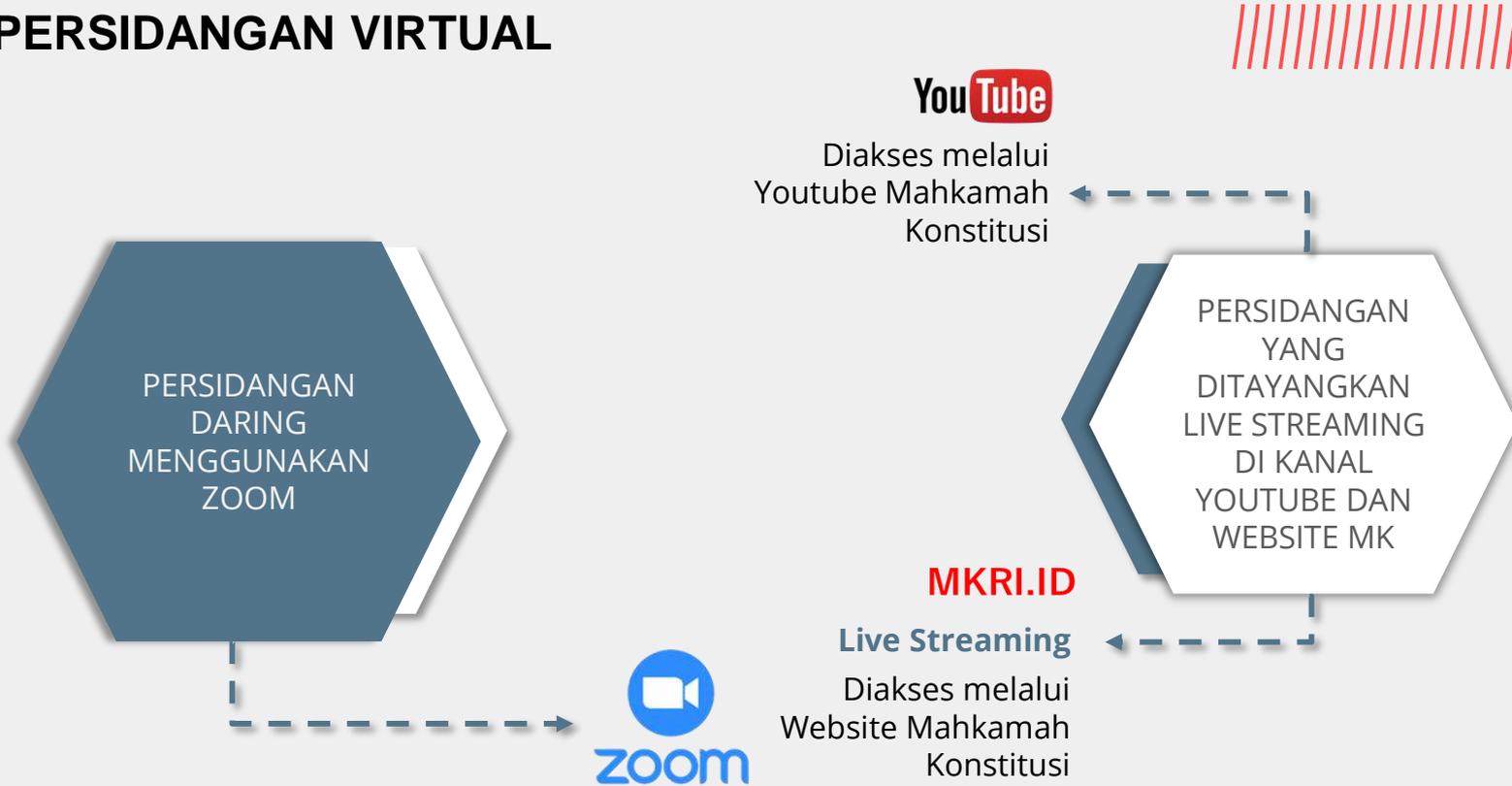
Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

#### LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



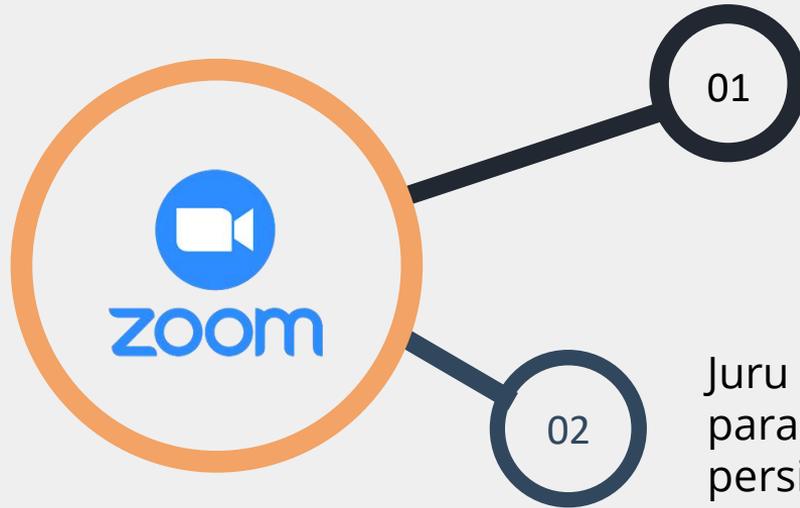
# PERSIDANGAN VIRTUAL



## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



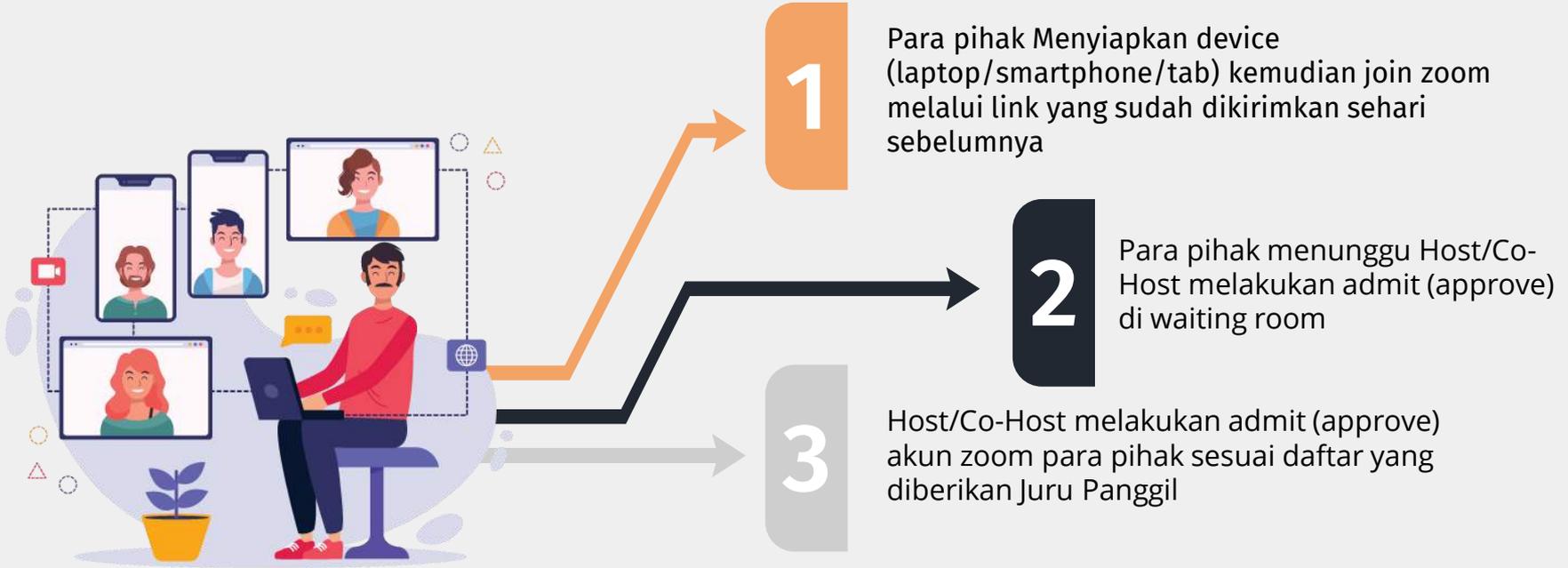
### TAHAP PERSIAPAN



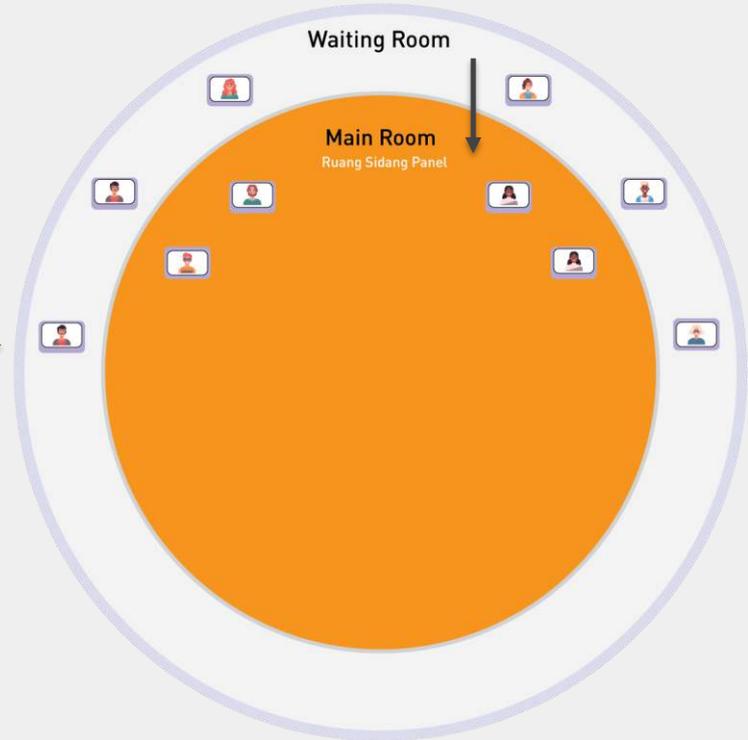
01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

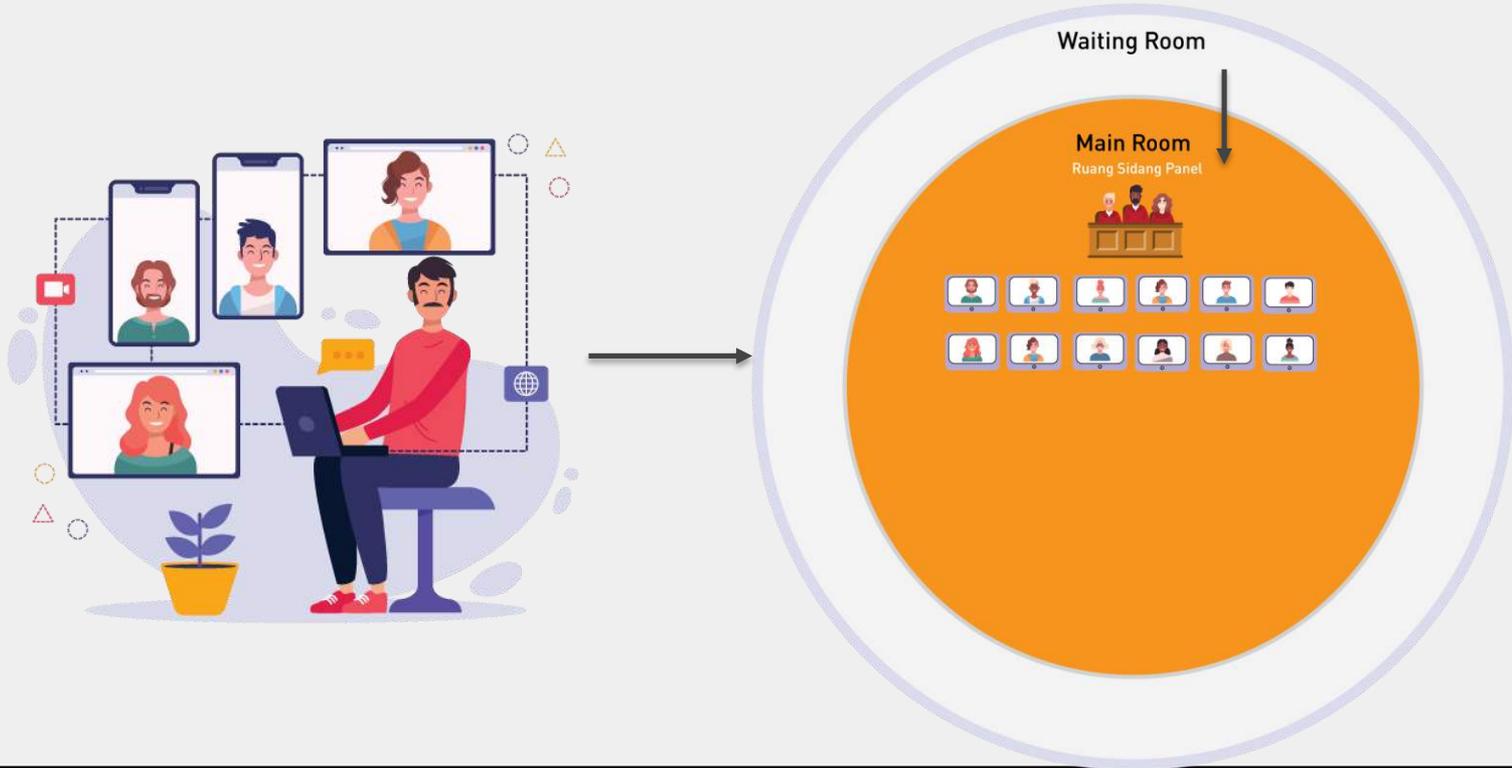
# ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



# SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3  
Windows Slot-in PC for  
ViewBoard®

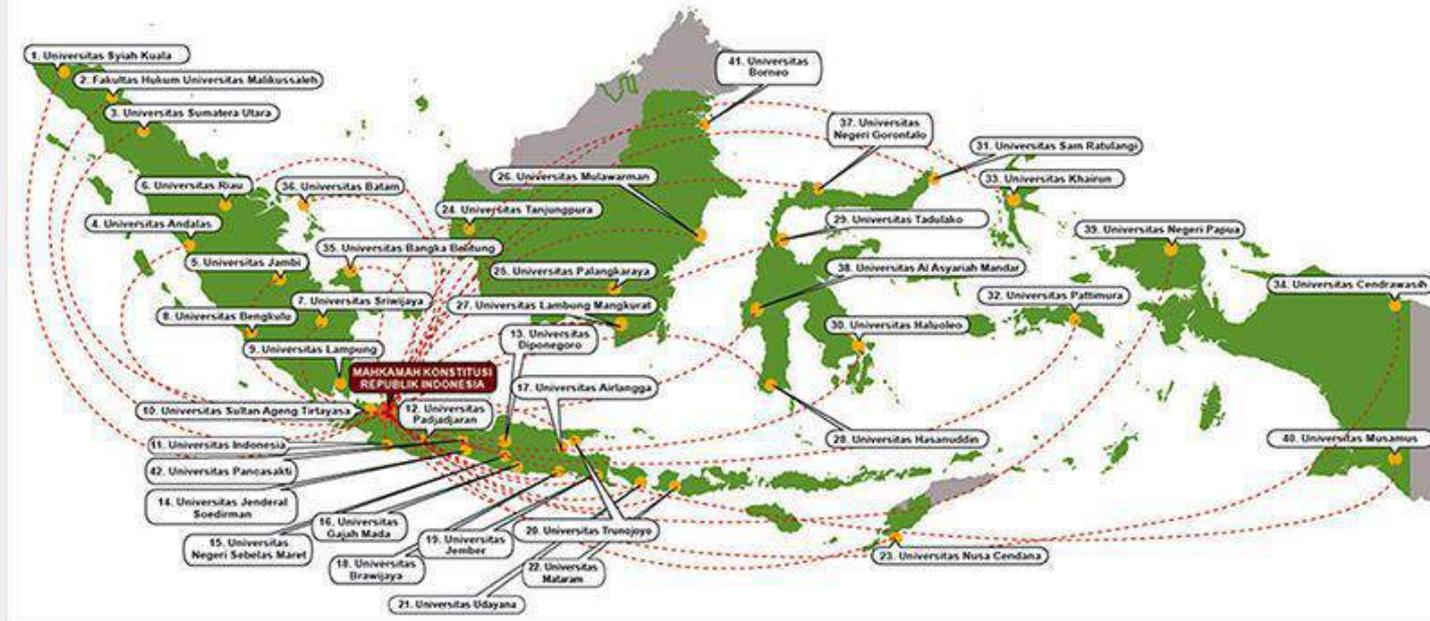


VB-STND-001  
Rolling Trolley Cart Stand for  
ViewSonic ViewBoard®



# PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

## LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kertingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



**Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja**



# PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan  
Symposium Nasional / International



# PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76<sup>TH</sup> INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI 43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Penguapan Putusan 1:25:45

Sidang Perkara Nomor 3:08:10

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUwM07LAvqk15LFgxw/editing/images... : Dr. Suhartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)**

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

## **PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)**

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang  
***“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”***

## **Pasal 9 Ayat (1):**

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

## **Pasal 11 Ayat (1):**

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

## **Pasal 12 Ayat (1):**

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



# SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)**

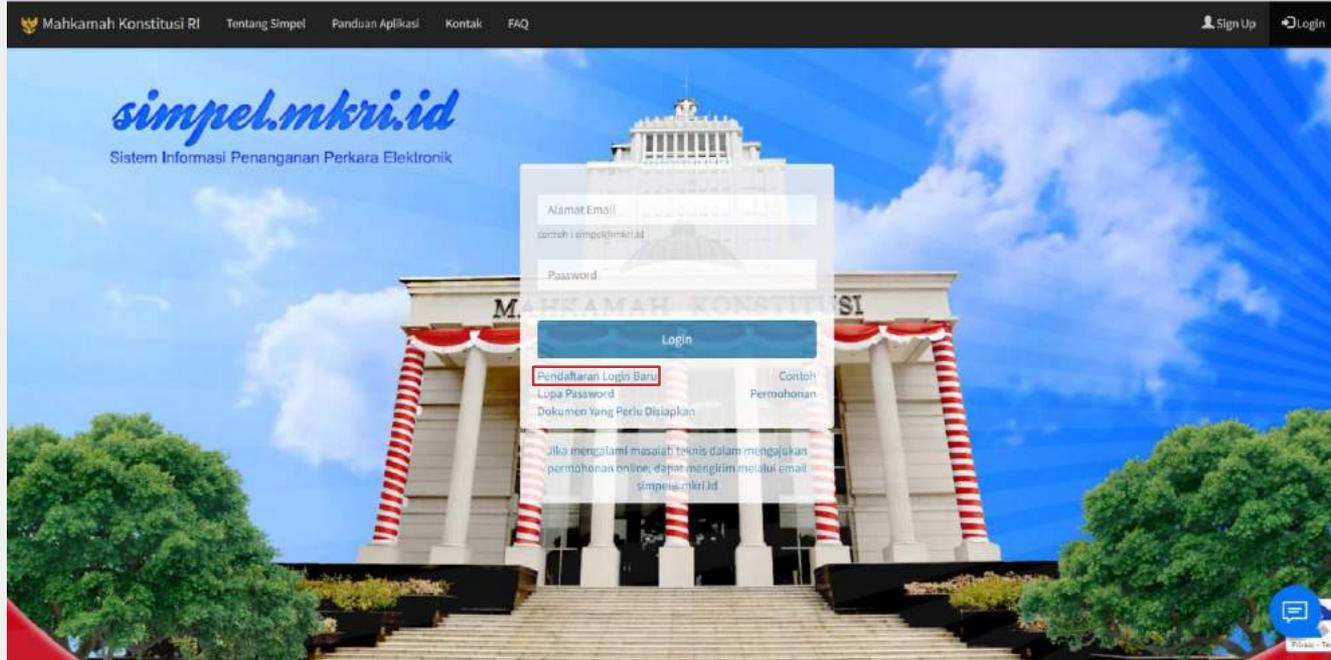
*“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”*

## **Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online**



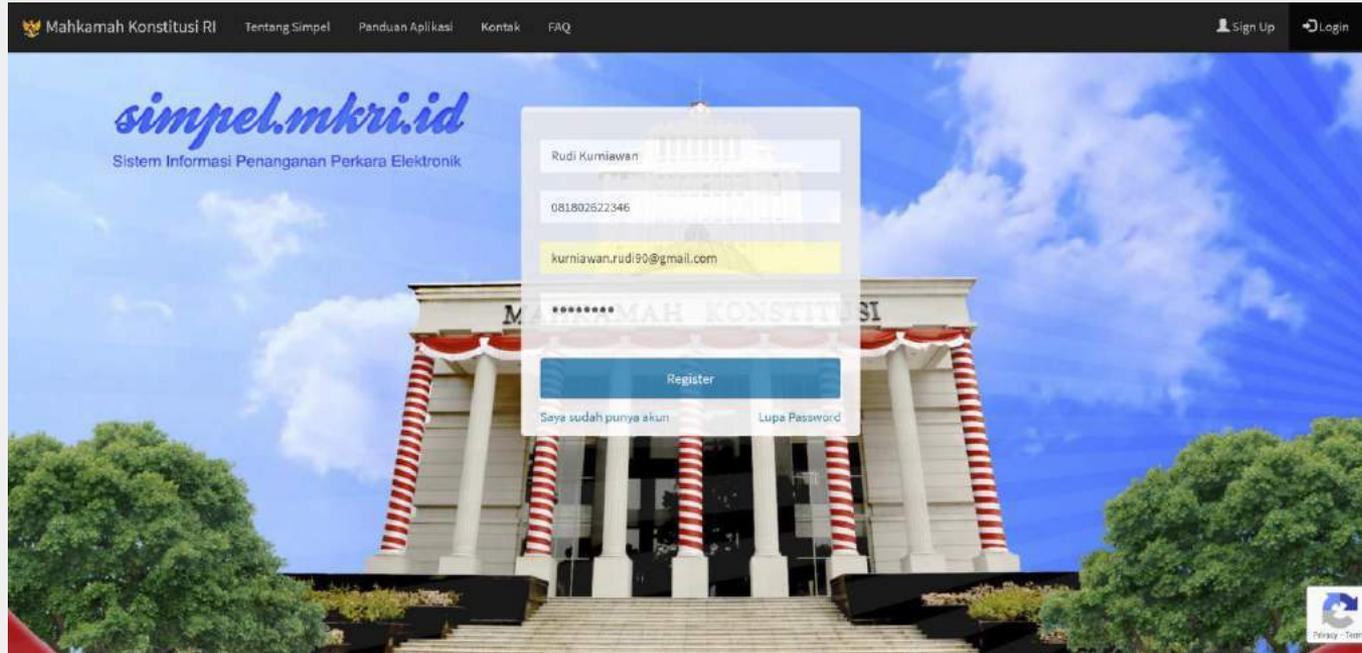
Permohonan Online ([simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id)) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



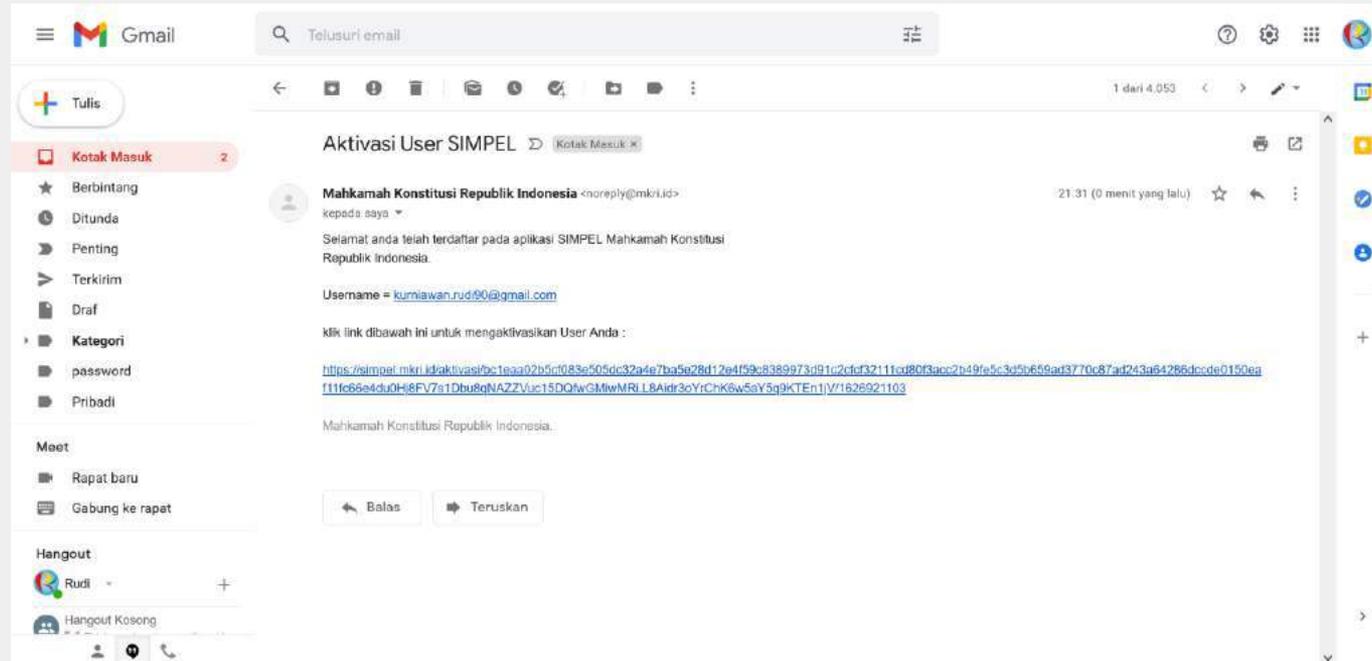
Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"  
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile icon for 'Rudi Kurniawan', and a 'Dashboard' link. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Dashboard', 'PUU', 'SKLN', 'PHEU', 'PHP Kepala Daerah', 'Kunjungan Sidang', 'Bantuan', and 'Kontak'. The main content area is titled 'Profile' and 'Profile User'. It features a user profile card for 'Rudi Kurniawan' with a profile picture placeholder. Below the card is a form with the following fields:

- Nama \***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP \***: 081662622566
- Nomor KTP \***: 123456789011121
- File KTP \***: [Diunggah](#) [nt digital.org](#)  
[File type: image/jpeg, 47.68 kb](#)  
Belum ada file KTP
- Alamat**:

At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel). The footer of the page contains the text: 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1'.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL dashboard interface. At the top, the user is identified as Rudi Kurniawan. The main area is titled 'Permohonan' and features four large cards representing different types of applications: PPU (Pengajuan Undang-Undang) with a count of 1, SKLN (Sengketa Kompetensi Lembaga Negara) with 0, PPHU (Perwakilan Hasil Pemilihan Umum) with 0, and PHP Kepala Daerah (Perwakilan Hasil Pemilihan Umum) with 0. Below this, there is a section for 'Persepsi Hasil Pemilihan Kepala Daerah' and a 'Kalender Sidang' (Meeting Calendar) for July 2021. The calendar shows dates from 1st to 31st, with a legend for 'Sidang' (Meeting), 'Publik' (Public), and 'Khususnya' (Especially).

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PPU atau SKLN atau PPHU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for Rudi Kurniawan, and a notification bell. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It features three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab is active, showing a text input field for the application title. Below the input field is a list of required documents, including KTP, Email, KTP Kuasa, Surat Kuasa, File KTABAS, Permohonan (pdf/doc), and Daftar alat bukti. A "Keterangan" section explains that asterisks indicate required documents. At the bottom, there are "Batal" and "Simpan" buttons. The footer contains copyright information for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and the version number 2.1.

**SIMPEL** Rudi Kurniawan Online

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Proses Pengisian Pokok Permohonan Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa Proses Upload Dokumen

Permohonan \*

Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)

Dokumen yg harus disiapkan:

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) \*\*
- Email Kuasa \*\*
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) \*\*
- File KTABAS (bagi advokat) \*\*
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alat/dokumen bukti

Keterangan:  
\*\* Jika menggunakan kuasa pemohon

Batal Simpan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

**SIMPTEL**

Rudi Kurniawan  
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Versio 1.2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

**Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)**

Edit Pokok permohonan :  
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang .....

**Data Pemohon** [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

**Data Kuasa** [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main section is titled 'Permohonan Online' and 'PUU(Pengujian Undang-Undang)'. It displays a progress bar with three stages: 'Proses Pengisian Pokok Permohonan', 'Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa', and 'Proses Upload Dokumen'. The current stage is 'Berkas Permohonan', which is a table listing required documents for upload.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the table, there is a '+ Tambah Berkas' button. Below the table are four action buttons: 'Kembali (Edit Permohonan)', 'Batal (Hapus Permohonan)', 'Simpan Sementara', and 'Kirim Permohonan'. The footer contains the copyright information: 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, All rights reserved.' and the version number 'Version 2.1'.

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

### TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

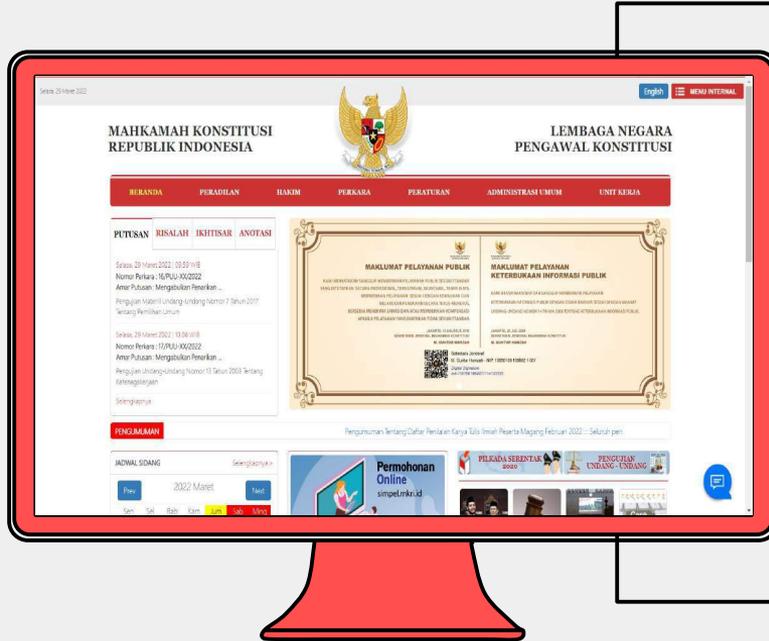
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020  
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.  
Kuasa Pemohon : -  
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

# WEBSITE MK (MKRI.ID)



# MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



## LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

**BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA**

**PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB  
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB  
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...  
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**  
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PELAYANAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENEMPA SANGSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPLIKASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019  
SUHARNO HARJO, JENJANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH

**MAKLUMAT PELAYANAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**  
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020  
SUHARNO HARJO, JENJANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001051006021001  
Zuhair Zuhair  
nip.1917081004201114102335

**PENGUMUMAN** Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh perni.

**JADWAL SIDANG** Selengkapnya >  
Prev 2022 Maret Next  
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab MING

**Pemohonan Online**  
simplm.kri.id

**PILKADA SERENTAK 2020**

**PENGUJIAN UNDANG - UNDANG**



# PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA  
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**  
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PELAYANAN SECARA TERBUKA, TERSEDIA DAN BERKUALITAS, BERSEDEKA MENYERAHKAN DAN/ATAU MEMBERIKAN KEPUTUSAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2019  
SUHARNO HARJO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaria Jenderal  
M. Guntur Hanzah - NIP. 19200105 100602 1 001  
Zuhair Zuhair  
nip.197008 1904201114 102335

**MAKLUMAT PELAYANAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2019  
SUHARNO HARJO, JENJRAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

Pemohonan  
Online  
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK  
2020

PENGUJIAN  
UNDANG - UNDANG



# JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

## Permohonan Online

simpel.mkri.id

### BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

### PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consvrev



SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



# BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpel.mkri.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

**PILKADA SERENTAK 2020** | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



# PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ⌚ Libur



Permohonan Online  
simpel.mkri.id

**BERITA** **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



**PILKADA SERENTAK 2020** **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consvrev



SP4N-LAPOR!

# MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ⌚ Libur

 Agenda Sidang

 Siaran Pers

 Berlangganan

 ILM

 Konsultasi

 Dewan Etik

**Permohonan Online**  
simplp.mkri.id



simplp.mkri.id

**BERITA** **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

**PILKADA SERENTAK 2020** **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN AACC LPSE MAHKAMAH KONSTITUSI JDIH

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

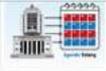
Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sejarah Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consrev SP4N-LAPOR!



# LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

## Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Sela...



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa...



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...

 **2352-9000**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177, Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

KIRIM SURAT



TANYA-JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



# CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online  
simpel.mkri.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!



# CASE TRACKING



Cari

**CASE TRACKING**

MKRI PUU SKLN PHPU PHPKADA

**Jenis dokumen**

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

**Jenis perkara**

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

**Amar putusan**

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan**

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945**

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022



CLICK MK



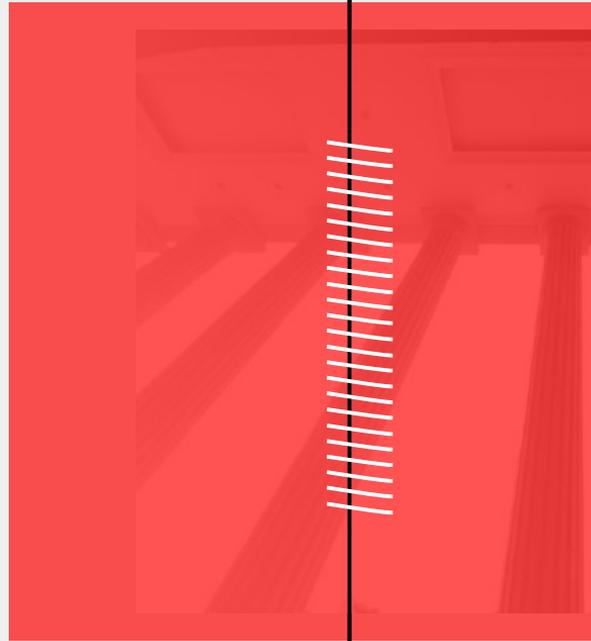
CLICK MK



CLICK MK



**TERIMA KASIH**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:  
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM  
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"  
CISARUA – 12 Juli 2023**

# PARA PIHAK DALAM PPHU ANGGOTA DPR DAN DPRD

## **A. Pemohon**

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

## **B. Termohon**

Penyelenggara Pemilu

## **C. Pihak Terkait**

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

# OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara **PHPU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

# TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

## PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

## PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

# PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan  
permohonan ke MK  
paling lama **3 x 24 jam**  
**sejak** diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu  
Serentak Tahun 2024  
**15 Feb - 20 Mar 2024**

**Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB**

**Rabu 20 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

1 x 24  
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

2 x 24  
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

3 x 24  
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,  
10.00 WIB**

# SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

# **SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
  - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
  - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
  - 1. Kewenangan Mahkamah;
  - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
  - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
  - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

# Identitas Pemohon & Termohon

**Identitas Pemohon** memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
  - b. nomor telepon/seluler;
  - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- \*) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

# Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama : .....
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor : .....
- nomor telepon/HP.....
- email .....
- 
2. Nama : .....
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor : .....
- nomor telepon/HP.....
- email .....

# Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
nomor telepon/HP.....  
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,  
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD  
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...  
Daerah Pemilihan .....

# Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

## **Jika menggunakan Kuasa Hukum:**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...  
*email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

# Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat  
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta  
Pusat,  
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

# Identitas Pihak Terkait

**Identitas Pihak Terkait** memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

\*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

# Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama : .....
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor : .....
- nomor telepon/HP.....
- email .....
- 
2. Nama : .....
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor : .....
- nomor telepon/HP.....
- email .....

# Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat Kantor : .....  
nomor telepon/HP.....  
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,  
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...  
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh  
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan  
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

# Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

## **Jika menggunakan Kuasa Hukum:**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...  
*email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

# Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
  - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
  - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
  - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
  - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

# Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

# Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
  - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
  - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

# Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

*Jika permohonan diajukan perseorangan:*

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

# Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
  - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
  - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
  - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

# Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

# Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

# Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

## Pemohon Parpol:

*Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.*

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

# Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

## Pemohon Perseorangan:

*Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.*

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

# Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

# Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

**DALAM EKSEPSI** (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

## **V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)**

# Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

## DALAM POKOK PERMOHONAN

*Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

# Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

## DALAM POKOK PERMOHONAN

*Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel*

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
3.	...	...	...	...

*Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:*

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

# Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

# Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.	...	...
2.	...	...
3.	...	...

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

# Uraian Petitum Pihak Terkait

***Petitum*** memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

# Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ....., bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,  
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

# PARTAI DEMOKRAT (PHPU 2019)

## Permohonan:

A. 23 Permohonan.

B. Jika dilihat dari Dapil: 75 Dapil dengan rincian sbb:

1)DPR: 10 Dapil dari 80 Dapil DPR RI

2)DPRD Provinsi: 16 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi

3)DPRD Kabupaten/Kota: 49 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

## Putusan

a) 0 Dapil dikabulkan

b) 3 Dapil ditarik kembali

c) 2 Dapil gugur

d) 14 Dapil ditolak;

**e) 56 Dapil tidak dapat diterima;**

# Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1127/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

04 Juli 2023

Kepada,  
**YM. Hakim Mahkamah Konstitusi**  
**Bapak Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 10 Juli 2023  
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-2044281763230627093532

Lampiran I

Nomor : 1127/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 04 Juli 2023

**JADWAL KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRAT**

Hari, Tanggal : Senin, 10 Juli 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
<b>Senin, 10 Juli 2023</b>	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<b>Narasumber:</b> - YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1125/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

04 Juli 2023

Kepada,  
**YM. Hakim Mahkamah Konstitusi**  
**Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 10 Juli 2023  
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-2100319190230627093716

Lampiran I

Nomor : 1125/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 04 Juli 2023

**JADWAL KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRAT**

Hari, Tanggal : Senin, 10 Juli 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
<b>Senin, 10 Juli 2023</b>	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<b>Narasumber:</b> - YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1167/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 Juli 2023

Kepada Yth,  
**Saudara Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 11 Juli 2023  
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di  
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Elisabeth**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature  
mk-347045827230627093842



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1119/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

04 Juli 2023

Kepada Yth.,  
**Panitera Muda III**  
**Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 11 Juli 2023  
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Elisabeth**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature  
mk1608199274230627093952



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1147/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Juli 2023

Kepada Ykh. Saudara:

**1. Nur Rakhman, S.Kom.**

**2. Rachman Karim**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 11 Juli 2023  
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Elisabeth**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1173/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 Juli 2023

Kepada Yth,  
**Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 12 Juli 2023  
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024  
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Elisabeth**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature  
mk-521275559230710114550



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1174/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 Juli 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Wilma Silalahi**
  - 2. Nurlidya Stephanny Hikmah**
  - 3. Rima Yuwana Yustikaningrum**
  - 4. Ananthia Ayu Devitasari**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** bagi **Partai Demokrat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 12 Juli 2023  
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Elisabeth**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature  
mk1139064555230710114734



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1175/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 Juli 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Hani Adhani**
- 2. Dian Chusnul Chatimah**
- 3. Mohammad Mahrus Ali**
- 4. M. Lutfi Chakim**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** bagi **Partai Demokrat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 13 Juli 2023  
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor  
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan  
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Elisabeth**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1120/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator  
Evaluasi**

04 Juli 2023

Kepada Yth.,  
**Panitera Muda I**  
**Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.**  
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 13 Juli 2023  
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB  
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Elisabeth**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 118/DK.06.00/01/2023  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian  
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

19 Januari 2023

Kepada Yth.

**Ketua Umum DPP Partai Demokrat**

**Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Demokrat yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 26 Juni 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-623103489230119082223

Lampiran I

Nomor : 118/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**KETENTUAN KEPESERTAAN**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN**  
**HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Demokrat yang terdiri dari:
  - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
  - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Demokrat memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **26 Juni 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Akomodasi**

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

#### 4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

#### 5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
  - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
  - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
  - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
  - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
  - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

#### d. *Boarding pass*

*Boarding pass* berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

#### e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



**f. Transport Darat/Laut**

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
  - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
  - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
  - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

**6. Lain-lain**

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

**7. Kontak**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 118/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**Jadwal Kegiatan**  
**Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**  
**Bagi Partai Demokrat**

**Hari, Tanggal** : **Senin s.d. Kamis, 10 s.d. 13 Juli 2023**

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

**Peserta** : Pengurus dan Anggota Partai Demokrat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Senin, 10 Juli 2023</b>	09.30 – 11.30 WIB	<b>Registrasi Peserta dan <i>Check in</i></b>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<b><i>Pre-Test</i></b>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<b><i>Coffee Break</i></b>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	<b>YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik</b>	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Ketua Partai Politik</li> <li>6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>8. Pembacaan Doa</li> </ul>		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
<b>KEDUA</b>				
<b>Selasa, 11 Juli 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
<b>KETIGA</b>				
<b>Rabu, 12 Juli 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Kamis, 13 Juli 2023</b>	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024</b>	Narasumber: <b>Mahkamah Konstitusi</b>	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<b>Post-Test dan Evaluasi Kegiatan</b>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Penutupan</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	<b>Sekjen MK Plt. Kapusdik</b>	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 118/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

-----

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 118/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

## FORMAT SURAT TUGAS

---

### SURAT TUGAS

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis  
10 s.d. 13 Juli 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,  
DPP Partai Demokrat  
ttd  
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 167/DK.00/01/2023

09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis  
Hukum Acara Penyelesaian  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

**Ketua Umum DPP Partai Demokrat**

**Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**

**di Tempat**

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature  
mk308460557230109040336



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1126/DK.06.00/07/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

04 Juli 2023

Kepada Yth.

**Ketua Umum DPP Partai Demokrat**

**Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 10 Juli 2023

Waktu : 16.30 –18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-2102673169230627093329

Lampiran I

Nomor : 1126/DK.06.00/07/2023

Tanggal : 04 Juli 2023

**Jadwal Kegiatan**  
**Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**  
**Bagi Partai Demokrat**

**Hari, Tanggal** : **Senin, 10 Juli 2023**

**Tempat** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

**Peserta** : Pengurus dan Anggota Partai Demokrat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 10 Juli 2023	16.30 – 18.00 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Demokrat 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Demokrat 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Demokrat 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	<b>YM Ketua MK</b> <b>Ketua Umum Partai Demokrat</b> <b>Sekjen MK</b>	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS  
NOMOR 521/ST.SPD/2000/07/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

**Daftar Nama Terlampir**

**Dari** : Gedung Mahkamah Konstitusi

**Tempat, Kota Tujuan** : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

**Dalam rangka** : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Demokrat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 10 Juni 2023  
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,  
Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

Tembusan Yth.  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



*Digital Signature*  
mk611967926230711114537

**Lampiran Surat Tugas**

Nomor : 521/ST.SPD/2000/07/2023

Tanggal : 10 Juli 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAGI PARTAI DEMOKRAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENUGASAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1	Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	10 Juli 2023
2	Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Narasumber	10 Juli 2023
3	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	10 Juli 2023
4	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Narasumber	11 Juli 2023
5	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Narasumber	11 Juli 2023
6	Nur Rakhman, S.Kom.	Narasumber	11 Juli 2023
7	Rachman Karim	Narasumber	11 Juli 2023
8	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Narasumber	12 Juli 2023
9	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Narasumber	12 Juli 2023
10	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Narasumber	12 Juli 2023
11	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Narasumber	12 Juli 2023
12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Narasumber	12 Juli 2023
13	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	13 Juli 2023
14	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Narasumber	13 Juli 2023
15	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber	13 Juli 2023
16	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Narasumber	13 Juli 2023
17	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Koordinator	13 Juli 2023
18	Elisabeth, S.E.	Narasumber	10 dan 13 Juli 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI DEMOKRAT

## PERJANJIAN KERJA SAMA

### KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI DEMOKRAT TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRAT

NOMOR : 31/PK/2023

NOMOR : 01/PK/DPP.PD/I/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kapaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**, Ketua Umum Partai Demokrat, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 2**

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
  - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
  - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
  - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Demokrat sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis



Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
  - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **26 Juni 2023**.

#### **Bagian Kedua**

##### **Hak**

##### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **26 Juni 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat.

#### **BAB IV**

##### **BIAYA**

##### **Pasal 5**

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

**BAB VI**  
**BEA MATERAI DAN PAJAK**

**Pasal 7**

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



**PIHAK KESATU,**  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI



**Elisabeth**  
Plt. Kepala Pusat

*Elisabeth*  
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**PIHAK KEDUA,**  
Partai Demokrat

*Agus Harimurti Yudhoyono*

**Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**  
Ketua Umum



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI DEMOKRAT

## PERJANJIAN KERJA SAMA

### KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI DEMOKRAT TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRAT

NOMOR : 31/PK/2023

NOMOR : 01/PK/DPP.PD/I/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**, Ketua Umum Partai Demokrat, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 2**

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban**

**Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
  - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
  - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
  - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Demokrat sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis



Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
  - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **26 Juni 2023**.

**Bagian Kedua**  
**Hak**  
**Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **26 Juni 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat.

**BAB IV**  
**BIAYA**  
**Pasal 5**

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Demokrat ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

**BAB VI**  
**BEA MATERAI DAN PAJAK**

**Pasal 7**

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



**PIHAK KESATU,**  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI



**Elisabeth**

Plt. Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**PIHAK KEDUA,**  
Partai Demokrat



**Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**  
Ketua Umum

## Penjelasan Teknis

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Nina Kurniasari Sutarman	10/07/2023 15:03:31 WIB
2	Alfa Avesiana Romdhoni	10/07/2023 15:03:47 WIB
3	Reza Puji Juliana	10/07/2023 15:31:31 WIB
4	Sapril Rahman	10/07/2023 15:35:43 WIB
5	Leksadharna Kengsiswoyo	10/07/2023 15:36:25 WIB
6	Bayu Listiawan	10/07/2023 15:39:40 WIB
7	Ikrar	10/07/2023 15:40:00 WIB
8	Maulana Hasanudin	10/07/2023 15:42:02 WIB
9	Muhammad Jamal	10/07/2023 15:42:25 WIB
10	Pebri Yunanda	10/07/2023 15:42:44 WIB
11	Wijaya Dewantara	10/07/2023 15:44:11 WIB
12	Imam Sofian	10/07/2023 15:45:07 WIB
13	Bujang Musa	10/07/2023

	15:46:47 WIB
14 Hery Purwanto	10/07/2023 15:49:33 WIB
15 Ridwan Comeng	10/07/2023 15:52:43 WIB
16 Rudy Fadillah	10/07/2023 15:53:50 WIB
17 Khairul Anwar	10/07/2023 15:54:11 WIB
18 N. Sulisty Setiawan	10/07/2023 15:54:48 WIB
19 Zaenal Fandi	10/07/2023 15:55:16 WIB
20 Muhammad Muallimin	10/07/2023 15:55:19 WIB
21 Ai Hisanru Sebastian Manurung	10/07/2023 15:55:22 WIB
22 Jonaidi	10/07/2023 15:55:49 WIB
23 Eka Buana Putra	10/07/2023 15:56:37 WIB
24 Oskhar Rawindra Sumual	10/07/2023 15:56:41 WIB
25 Neng Yayat Nurhayati	10/07/2023 15:56:58 WIB
26 Gregorius Retas Daeng	10/07/2023 15:57:17 WIB
27 Akhmad Ryan Firmansyah	10/07/2023 15:57:42 WIB
28 M. Khoiri	

	10/07/2023 15:58:04 WIB
29 Deri Hafizh	10/07/2023 15:58:06 WIB
30 David Richard Stheven Runtuwarouw	10/07/2023 15:58:24 WIB
31 Papang Sapari	10/07/2023 15:58:31 WIB
32 MHD. Fadhli	10/07/2023 15:58:58 WIB
33 Herlita	10/07/2023 15:59:02 WIB
34 Andy Wiyanto	10/07/2023 15:59:40 WIB
35 M. Ardiyansyah	10/07/2023 16:00:00 WIB
36 HM. Rusdy	10/07/2023 16:00:08 WIB
37 M. Marwan Hamzah	10/07/2023 16:00:25 WIB
38 Pangeran	10/07/2023 16:00:42 WIB
39 Aidin Rahmatullah	10/07/2023 16:00:46 WIB
40 Achmad Gozali	10/07/2023 16:01:02 WIB
41 Bambang Santoso	10/07/2023 16:01:50 WIB
42 Oyong Darwan	10/07/2023 16:02:03 WIB

43 Rizaldi Nazaruddin	10/07/2023 16:02:13 WIB
44 Muji Rahayu	10/07/2023 16:02:20 WIB
45 Agatha A. Lidyawati Rafli	10/07/2023 16:05:32 WIB
46 Made Sabda Adi Nugraha	10/07/2023 16:06:27 WIB
47 Muh. Dirfan Akbar Za	10/07/2023 16:07:40 WIB
48 Us Us Kurniwantoro	10/07/2023 16:08:10 WIB
49 Aldo Rizaldi	10/07/2023 16:08:11 WIB
50 Supriyanto M. Radjak	10/07/2023 16:08:12 WIB
51 Ida Bagus Putu Gede Sukrisna	10/07/2023 16:08:14 WIB
52 Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho	10/07/2023 16:08:15 WIB
53 Yunus Adhi Prabowo	10/07/2023 16:08:25 WIB
54 Mohamad Rivky Mohi	10/07/2023 16:08:27 WIB
55 Fong Tek Wing	10/07/2023 16:08:28 WIB
56 Ainur Rohman	10/07/2023 16:08:31 WIB
57 Jimmy Himawan	10/07/2023

	16:08:34 WIB
58 Adam Wijaya	10/07/2023 16:08:34 WIB
59 Oddy Gibson	10/07/2023 16:08:41 WIB
60 Ariyan Subakti	10/07/2023 16:08:51 WIB
61 Setiadi Indra Nugraha	10/07/2023 16:08:51 WIB
62 Efri Darlin Marto Dachi	10/07/2023 16:08:53 WIB
63 Muhammad Erwinsyah	10/07/2023 16:08:59 WIB
64 Zarkasih	10/07/2023 16:09:01 WIB
65 Turedo Sitindaon	10/07/2023 16:09:03 WIB
66 Yance Salambauw	10/07/2023 16:09:06 WIB
67 Astria Blandina Gaidaka	10/07/2023 16:09:07 WIB
68 Lusiana Irmalia	10/07/2023 16:09:07 WIB
69 Edianto	10/07/2023 16:09:07 WIB
70 Andhika Yudha Perwira	10/07/2023 16:09:08 WIB
71 Piterson Maumeta	10/07/2023 16:09:08 WIB
72 R. Arief Triyoga Utama	

	10/07/2023 16:09:08 WIB
73 Mohamad Yusup	10/07/2023 16:09:11 WIB
74 Rahmawati Sukri	10/07/2023 16:09:11 WIB
75 Yandri Sudarso	10/07/2023 16:09:11 WIB
76 Vike Verry Ponto	10/07/2023 16:09:17 WIB
77 Dicky Patadjenu	10/07/2023 16:09:18 WIB
78 Susanti Sembiring	10/07/2023 16:09:25 WIB
79 Said Ahmad Kosasi	10/07/2023 16:09:25 WIB
80 Ahmad Yani	10/07/2023 16:09:29 WIB
81 Anwar	10/07/2023 16:09:32 WIB
82 Jonveri	10/07/2023 16:09:36 WIB
83 Suratiny Sulesdianingrum	10/07/2023 16:09:38 WIB
84 Sharon S. Simamora	10/07/2023 16:09:39 WIB
85 Endang Kuswardani	10/07/2023 16:09:41 WIB
86 Urbanus Dhalu	10/07/2023 16:09:59 WIB

87 Melkias Kedepa	10/07/2023 16:10:12 WIB
88 Hermanto Hamdi	10/07/2023 16:11:25 WIB
89 Eni Kamal	10/07/2023 16:12:14 WIB
90 Dwi Fajar Rini	10/07/2023 16:13:01 WIB
91 L. Sitanggang	10/07/2023 16:15:51 WIB
92 Nurhidayat Umacina	10/07/2023 16:16:26 WIB
93 Nurhidayat Umacina	10/07/2023 16:16:30 WIB
94 Adhari Widya Prakarsa	10/07/2023 16:16:55 WIB
95 Nadya Prita Gemala D.	10/07/2023 16:17:32 WIB
96 Muhajir	10/07/2023 16:17:41 WIB
97 Ferry Firmansyah	10/07/2023 16:18:28 WIB
98 Suratno	10/07/2023 16:20:58 WIB
99 H. Lahaya	10/07/2023 16:25:01 WIB
100 Selestinus Paundanan	10/07/2023 16:25:34 WIB
101 Fransisko	10/07/2023

	16:26:07 WIB
102 Novianto Rahmantyo	10/07/2023 16:27:54 WIB
103 Zakarias Horota	10/07/2023 16:29:30 WIB
104 Dinda Wulan Ariani	10/07/2023 16:30:45 WIB
105 Hendry Rachmadani	10/07/2023 16:30:49 WIB
106 Hadi Sasmita	10/07/2023 16:32:54 WIB
107 Hidayatullah	10/07/2023 16:51:32 WIB
108 Ahmad Yani	10/07/2023 16:52:02 WIB
109 Junjati Patra	10/07/2023 18:46:04 WIB
110 Jackson Sahala Pakpahan	10/07/2023 18:47:19 WIB
111 Kevin A Th Pitoy	10/07/2023 18:57:01 WIB
112 Teuku Irmansyah	10/07/2023 18:58:24 WIB
113 Rachmaniar L.	10/07/2023 19:23:46 WIB
114 Mehbob	10/07/2023 19:28:04 WIB
115 Ricky Kurniawan Chairul	10/07/2023 19:28:41 WIB
116 Anastasia Henny	

	10/07/2023 19:29:21 WIB
117 Cepi Hendrayani	10/07/2023 19:31:05 WIB
118 TOHERI YUNITSOON HASSOR	10/07/2023 19:32:12 WIB
119 Tolib	10/07/2023 19:33:53 WIB
120 Herman Ade	10/07/2023 20:07:36 WIB
121 Qomaruddin	10/07/2023 20:14:06 WIB
122 Qomaruddin	10/07/2023 20:14:10 WIB
123 Sri Wijati	10/07/2023 20:17:27 WIB
124 Elmilya Ashyfa Hutomo	10/07/2023 20:20:26 WIB

## Pembukaan Kegiatan

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Fong Tek Wing	10/07/2023 16:30:17 WIB
2	Alfa Avesiana Romdhoni	10/07/2023 16:30:43 WIB
3	Alfa Avesiana Romdhoni	10/07/2023 16:30:43 WIB
4	Dinda Wulan Ariani	10/07/2023 16:30:48 WIB

5 Hendry Rachmadani	10/07/2023 16:30:51 WIB
6 Selestinus Paundanan	10/07/2023 16:31:51 WIB
7 Susanti Sembiring	10/07/2023 16:34:12 WIB
8 Eni Kamal	10/07/2023 16:34:24 WIB
9 L. Sitanggang	10/07/2023 16:35:23 WIB
10 Melkias Kedepa	10/07/2023 16:36:01 WIB
11 Said Ahmad Kosasi	10/07/2023 16:36:07 WIB
12 Nina Kurniasari Sutarman	10/07/2023 16:36:27 WIB
13 Zaenal Fandi	10/07/2023 16:37:43 WIB
14 Fransisko	10/07/2023 16:37:43 WIB
15 Leksadharma Kengsiswoyo	10/07/2023 16:38:25 WIB
16 Reza Puji Juliana	10/07/2023 16:38:40 WIB
17 Ikrar	10/07/2023 16:42:58 WIB
18 Bayu Listiawan	10/07/2023 16:49:10 WIB
19 Hidayatullah	10/07/2023

	16:51:36 WIB
20 Ahmad Yani	10/07/2023 16:52:06 WIB
21 Bujang Musa	10/07/2023 16:53:28 WIB
22 Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho	10/07/2023 16:54:03 WIB
23 Hermanto Hamdi	10/07/2023 16:54:47 WIB
24 Novianto Rahmantyo	10/07/2023 16:55:29 WIB
25 Wijaya Dewantara	10/07/2023 16:55:47 WIB
26 Rahmawati Sukri	10/07/2023 16:56:28 WIB
27 Dicky Patadjenu	10/07/2023 16:57:57 WIB
28 Eka Buana Putra	10/07/2023 16:58:18 WIB
29 Yance Salambauw	10/07/2023 16:59:36 WIB
30 Gregorius Retas Daeng	10/07/2023 17:00:43 WIB
31 Neng Yayat Nurhayati	10/07/2023 17:01:44 WIB
32 Oddy Gibson	10/07/2023 17:03:44 WIB
33 Aldo Rizaldi	10/07/2023 17:03:48 WIB
34 Vike Verry Ponto	

	10/07/2023 17:22:39 WIB
35 Turedo Sitindaon	10/07/2023 17:31:06 WIB
36 Mohamad Yusup	10/07/2023 17:32:49 WIB
37 Ariyan Subakti	10/07/2023 17:33:02 WIB
38 Muhammad Jamal	10/07/2023 17:42:45 WIB
39 Sapril Rahman	10/07/2023 17:44:15 WIB
40 Maulana Hasanudin	10/07/2023 17:45:32 WIB
41 Dwi Fajar Rini	10/07/2023 17:59:15 WIB
42 Ferry Firmansyah	10/07/2023 17:59:23 WIB
43 Setiadi Indra Nugraha	10/07/2023 18:30:47 WIB
44 Junjati Patra	10/07/2023 18:46:09 WIB
45 Jackson Sahala Pakpahan	10/07/2023 18:47:31 WIB
46 Kevin A Th Pitoy	10/07/2023 18:57:05 WIB
47 Teuku Irmansyah	10/07/2023 18:58:33 WIB
48 Andhika Yudha Perwira	10/07/2023 19:12:13 WIB

49 Oskhar Rawindra Sumual	10/07/2023 19:13:12 WIB
50 Nurhidayat Umacina	10/07/2023 19:14:07 WIB
51 Hery Purwanto	10/07/2023 19:17:13 WIB
52 Piterson Maumeta	10/07/2023 19:17:15 WIB
53 Khairul Anwar	10/07/2023 19:19:00 WIB
54 Pebri Yunanda	10/07/2023 19:19:10 WIB
55 MHD. Fadhi	10/07/2023 19:19:36 WIB
56 David Richard Steven Runtuwarouw	10/07/2023 19:19:54 WIB
57 Oyong Darwan	10/07/2023 19:21:02 WIB
58 Muhammad Erwinsyah	10/07/2023 19:21:35 WIB
59 Andy Wiyanto	10/07/2023 19:21:38 WIB
60 Urbanus Dhalu	10/07/2023 19:22:33 WIB
61 Mohamad Rivky Mohi	10/07/2023 19:23:02 WIB
62 Supriyanto M. Radjak	10/07/2023 19:23:21 WIB
63 M. Khoiri	10/07/2023

	19:23:33 WIB
64 Muh. Dirfan Akbar Za	10/07/2023 19:23:38 WIB
65 Adhari Widya Prakarsa	10/07/2023 19:23:46 WIB
66 Rachmaniar L.	10/07/2023 19:23:51 WIB
67 Edianto	10/07/2023 19:24:01 WIB
68 Zakarias Horota	10/07/2023 19:24:28 WIB
69 Lusiana Irmalia	10/07/2023 19:24:50 WIB
70 Akhmad Ryan Firmansyah	10/07/2023 19:25:13 WIB
71 R. Arief Triyoga Utama	10/07/2023 19:25:17 WIB
72 Yunus Adhi Prabowo	10/07/2023 19:25:18 WIB
73 Deri Hafizh	10/07/2023 19:25:20 WIB
74 Suratno	10/07/2023 19:25:42 WIB
75 Ai Hisanru Sebastian Manurung	10/07/2023 19:25:50 WIB
76 Made Sabda Adi Nugraha	10/07/2023 19:26:23 WIB
77 Aidin Rahmatullah	10/07/2023 19:26:41 WIB
78 Adam Wijaya	

	10/07/2023 19:26:43 WIB
79 Endang Kuswardani	10/07/2023 19:26:44 WIB
80 Ainur Rohman	10/07/2023 19:26:48 WIB
81 Anwar	10/07/2023 19:26:50 WIB
82 Herlita	10/07/2023 19:27:06 WIB
83 Ahmad Yani	10/07/2023 19:27:43 WIB
84 HM. Rusdy	10/07/2023 19:27:53 WIB
85 Ridwan Comeng	10/07/2023 19:27:58 WIB
86 Mehbob	10/07/2023 19:28:08 WIB
87 Astria Blandina Gaidaka	10/07/2023 19:28:35 WIB
88 Ricky Kurniawan Chairul	10/07/2023 19:28:46 WIB
89 Anastasia Henny	10/07/2023 19:29:29 WIB
90 Jimmy Himawan	10/07/2023 19:30:10 WIB
91 Ida Bagus Putu Gede Sukrisna	10/07/2023 19:30:27 WIB
92 Cepi Hendrayani	10/07/2023 19:31:10 WIB

93 Nadya Prita Gemala D.	10/07/2023 19:31:14 WIB
94 Rudy Fadillah	10/07/2023 19:31:28 WIB
95 TOHERI YUNITSOON HASSOR	10/07/2023 19:32:16 WIB
96 Tolib	10/07/2023 19:33:59 WIB
97 Imam Sofian	10/07/2023 19:35:49 WIB
98 Us Us Kurniwantoro	10/07/2023 19:35:50 WIB
99 Rizaldi Nazaruddin	10/07/2023 19:37:08 WIB
100 Yandri Sudarso	10/07/2023 19:38:30 WIB
101 Efri Darlin Marto Dachi	10/07/2023 19:39:11 WIB
102 Agatha A. Lidyawati Rafli	10/07/2023 19:41:53 WIB
103 Bambang Santoso	10/07/2023 19:43:50 WIB
104 Jonaidi	10/07/2023 19:44:42 WIB
105 Pangeran	10/07/2023 19:45:02 WIB
106 Muhajir	10/07/2023 19:48:32 WIB
107 M. Ardiyansyah	10/07/2023

	19:51:55 WIB
108 Hadi Sasmita	10/07/2023 19:58:46 WIB
109 M. Marwan Hamzah	10/07/2023 19:59:06 WIB
110 Herman Ade	10/07/2023 20:07:33 WIB
111 Jonveri	10/07/2023 20:08:28 WIB
112 Zarkasih	10/07/2023 20:09:36 WIB
113 Qomaruddin	10/07/2023 20:14:16 WIB
114 Sri Wijati	10/07/2023 20:17:31 WIB
115 Elmilya Ashyfa Hutomo	10/07/2023 20:20:31 WIB
116 Muhammad Muallimin	10/07/2023 21:06:45 WIB
117 N. Sulisty Setiawan	10/07/2023 21:14:36 WIB

## Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Bayu Listiawan	10/07/2023 19:04:30 WIB
2	Fransisko	10/07/2023 19:10:34 WIB

3 Rahmawati Sukri	10/07/2023 19:11:02 WIB
4 Fong Tek Wing	10/07/2023 19:11:28 WIB
5 Dicky Patadjenu	10/07/2023 19:11:58 WIB
6 Maulana Hasanudin	10/07/2023 19:12:05 WIB
7 Dwi Fajar Rini	10/07/2023 19:12:23 WIB
8 Zaenal Fandi	10/07/2023 19:12:42 WIB
9 Andhika Yudha Perwira	10/07/2023 19:13:10 WIB
10 Oskhar Rawindra Sumual	10/07/2023 19:13:42 WIB
11 Susanti Sembiring	10/07/2023 19:14:57 WIB
12 Teuku Irmansyah	10/07/2023 19:15:09 WIB
13 Nina Kurniasari Sutarman	10/07/2023 19:15:37 WIB
14 Bujang Musa	10/07/2023 19:16:08 WIB
15 Turedo Sitindaon	10/07/2023 19:16:12 WIB
16 Said Ahmad Kosasi	10/07/2023 19:16:27 WIB
17 Piterson Maumeta	10/07/2023

	19:17:23 WIB
18 Hery Purwanto	10/07/2023 19:17:30 WIB
19 Alfa Avesiana Romdhoni	10/07/2023 19:18:00 WIB
20 Muhammad Jamal	10/07/2023 19:18:16 WIB
21 Reza Puji Juliana	10/07/2023 19:18:26 WIB
22 L. Sitanggang	10/07/2023 19:18:26 WIB
23 Ferry Firmansyah	10/07/2023 19:18:34 WIB
24 Khairul Anwar	10/07/2023 19:19:08 WIB
25 Pebri Yunanda	10/07/2023 19:19:16 WIB
26 MHD. Fadhli	10/07/2023 19:19:38 WIB
27 David Richard Stheven Runtuwarouw	10/07/2023 19:19:58 WIB
28 Eka Buana Putra	10/07/2023 19:20:37 WIB
29 Eni Kamal	10/07/2023 19:20:39 WIB
30 Oyong Darwan	10/07/2023 19:21:07 WIB
31 Muhammad Erwinsyah	10/07/2023 19:21:37 WIB
32 Andy Wiyanto	

	10/07/2023 19:22:07 WIB
33 Leksadharna Kengsiswoyo	10/07/2023 19:22:19 WIB
34 Urbanus Dhalu	10/07/2023 19:22:31 WIB
35 Gregorius Retas Daeng	10/07/2023 19:22:54 WIB
36 Mohamad Rivky Mohi	10/07/2023 19:23:06 WIB
37 Oddy Gibson	10/07/2023 19:23:08 WIB
38 Vike Verry Ponto	10/07/2023 19:23:10 WIB
39 Hermanto Hamdi	10/07/2023 19:23:15 WIB
40 Supriyanto M. Radjak	10/07/2023 19:23:30 WIB
41 Suratiny Sulesdianingrum	10/07/2023 19:23:36 WIB
42 M. Khoiri	10/07/2023 19:23:40 WIB
43 Muh. Dirfan Akbar Za	10/07/2023 19:23:45 WIB
44 Adhari Widya Prakarsa	10/07/2023 19:23:49 WIB
45 Rachmaniar L.	10/07/2023 19:24:00 WIB
46 Edianto	10/07/2023 19:24:06 WIB

47 Neng Yayat Nurhayati	10/07/2023 19:24:07 WIB
48 Zakarias Horota	10/07/2023 19:24:19 WIB
49 Akhmad Ryan Firmansyah	10/07/2023 19:25:19 WIB
50 Yunus Adhi Prabowo	10/07/2023 19:25:22 WIB
51 Deri Hafizh	10/07/2023 19:25:26 WIB
52 Ariyan Subakti	10/07/2023 19:25:38 WIB
53 Lusiana Irmalia	10/07/2023 19:25:39 WIB
54 Lusiana Irmalia	10/07/2023 19:25:39 WIB
55 Suratno	10/07/2023 19:25:50 WIB
56 R. Arief Triyoga Utama	10/07/2023 19:26:00 WIB
57 Ai Hisanru Sebastian Manurung	10/07/2023 19:26:07 WIB
58 Novianto Rahmantyo	10/07/2023 19:26:08 WIB
59 Ahmad Yani	10/07/2023 19:26:43 WIB
60 Aidin Rahmatullah	10/07/2023 19:26:48 WIB
61 Made Sabda Adi Nugraha	10/07/2023

	19:26:49 WIB
62 Anwar	10/07/2023 19:26:55 WIB
63 Ainur Rohman	10/07/2023 19:26:58 WIB
64 Adam Wijaya	10/07/2023 19:26:58 WIB
65 Selestinus Paundanan	10/07/2023 19:27:03 WIB
66 Endang Kuswardani	10/07/2023 19:27:08 WIB
67 Hadi Sasmita	10/07/2023 19:27:12 WIB
68 Herlita	10/07/2023 19:27:19 WIB
69 Hidayatullah	10/07/2023 19:27:42 WIB
70 HM. Rusdy	10/07/2023 19:27:58 WIB
71 Ahmad Yani	10/07/2023 19:28:02 WIB
72 Sapril Rahman	10/07/2023 19:28:10 WIB
73 Mehbob	10/07/2023 19:28:11 WIB
74 Junjati Patra	10/07/2023 19:28:13 WIB
75 Ridwan Comeng	10/07/2023 19:28:16 WIB
76 Ikrar	

	10/07/2023 19:28:16 WIB
77 Astria Blandina Gaidaka	10/07/2023 19:28:38 WIB
78 Ricky Kurniawan Chairul	10/07/2023 19:28:57 WIB
79 Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho	10/07/2023 19:29:20 WIB
80 Anastasia Henny	10/07/2023 19:29:35 WIB
81 Jimmy Himawan	10/07/2023 19:30:18 WIB
82 Ida Bagus Putu Gede Sukrisna	10/07/2023 19:30:34 WIB
83 Nadya Prita Gemala D.	10/07/2023 19:31:21 WIB
84 Cepi Hendrayani	10/07/2023 19:31:24 WIB
85 Rudy Fadillah	10/07/2023 19:31:36 WIB
86 TOHERI YUNITSOON HASSOR	10/07/2023 19:32:19 WIB
87 Dinda Wulan Ariani	10/07/2023 19:33:01 WIB
88 Wijaya Dewantara	10/07/2023 19:33:09 WIB
89 Tolib	10/07/2023 19:33:46 WIB
90 Imam Sofian	10/07/2023 19:35:56 WIB

91 Us Us Kurniawantoro	10/07/2023 19:36:00 WIB
92 Rizaldi Nazaruddin	10/07/2023 19:37:20 WIB
93 Yandri Sudarso	10/07/2023 19:38:34 WIB
94 Efri Darlin Marto Dachi	10/07/2023 19:39:22 WIB
95 Agatha A. Lidyawati Rafli	10/07/2023 19:42:09 WIB
96 Bambang Santoso	10/07/2023 19:43:55 WIB
97 Jonaidi	10/07/2023 19:44:57 WIB
98 Pangeran	10/07/2023 19:45:06 WIB
99 Muhajir	10/07/2023 19:48:35 WIB
100 M. Ardiyansyah	10/07/2023 19:52:14 WIB
101 M. Marwan Hamzah	10/07/2023 19:59:17 WIB
102 Setiadi Indra Nugraha	10/07/2023 20:03:07 WIB
103 Setiadi Indra Nugraha	10/07/2023 20:03:08 WIB
104 Setiadi Indra Nugraha	10/07/2023 20:03:08 WIB
105 Setiadi Indra Nugraha	10/07/2023

		20:03:08 WIB
106 Herman Ade		10/07/2023 20:07:26 WIB
107 Jonveri		10/07/2023 20:09:43 WIB
108 Zarkasih		10/07/2023 20:09:59 WIB
109 Elmilya Ashyfa Hutomo		10/07/2023 20:13:52 WIB
110 Qomaruddin		10/07/2023 20:14:22 WIB
111 Sri Wijati		10/07/2023 20:17:35 WIB
112 Nurhidayat Umacina		10/07/2023 20:27:28 WIB
113 Afroni Imawan		10/07/2023 20:28:04 WIB
114 Kevin A Th Pitoy		10/07/2023 20:30:43 WIB
115 Melkias Kedepa		10/07/2023 21:03:52 WIB
116 Muhammad Kualimin		10/07/2023 21:06:51 WIB
117 N. Sulisty Setiawan		10/07/2023 21:14:41 WIB

**Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan**

**SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
----	------	-----

1 Achmad Gozali	11/07/2023 07:30:11 WIB
2 Zakarias Horota	11/07/2023 07:33:21 WIB
3 Jimmy Himawan	11/07/2023 07:35:22 WIB
4 Ariyan Subakti	11/07/2023 07:36:33 WIB
5 Agatha A. Lidyawati Rafli	11/07/2023 07:39:12 WIB
6 Adhari Widya Prakarsa	11/07/2023 07:40:13 WIB
7 Jonaidi	11/07/2023 07:42:44 WIB
8 Hermanto Hamdi	11/07/2023 07:42:48 WIB
9 Eka Buana Putra	11/07/2023 07:43:20 WIB
10 L. Sitanggang	11/07/2023 07:43:22 WIB
11 Hadi Sasmita	11/07/2023 07:43:28 WIB
12 Elmilya Ashyfa Hutomo	11/07/2023 07:43:42 WIB
13 Teuku Irmansyah	11/07/2023 07:43:59 WIB
14 Vike Verry Ponto	11/07/2023 07:44:07 WIB
15 Maulana Hasanudin	11/07/2023

	07:44:30 WIB
16 Ali Akbar	11/07/2023 07:44:57 WIB
17 Oyong Darwan	11/07/2023 07:45:20 WIB
18 Muhammad Jamal	11/07/2023 07:45:43 WIB
19 M. Tomi Samantha	11/07/2023 07:45:59 WIB
20 Muh. Dirfan Akbar Za	11/07/2023 07:46:00 WIB
21 Zarkasih	11/07/2023 07:46:02 WIB
22 Anwar	11/07/2023 07:46:03 WIB
23 Muji Rahayu	11/07/2023 07:46:25 WIB
24 Lusiana Irmalia	11/07/2023 07:46:35 WIB
25 R. Arief Triyoga Utama	11/07/2023 07:46:42 WIB
26 Said Ahmad Kosasi	11/07/2023 07:46:56 WIB
27 Zaenal Fandi	11/07/2023 07:47:07 WIB
28 Bayu Listiawan	11/07/2023 07:47:22 WIB
29 Ridwan Comeng	11/07/2023 07:47:26 WIB
30 Sapril Rahman	

	11/07/2023 07:47:26 WIB
31 MHD. Fadhli	11/07/2023 07:47:34 WIB
32 Jonveri	11/07/2023 07:47:41 WIB
33 Ferry Firmansyah	11/07/2023 07:47:42 WIB
34 Oddy Gibson	11/07/2023 07:47:50 WIB
35 Mehbob	11/07/2023 07:47:57 WIB
36 Khairul Anwar	11/07/2023 07:48:54 WIB
37 Astria Blandina Gaidaka	11/07/2023 07:49:09 WIB
38 Yandri Sudarso	11/07/2023 07:49:11 WIB
39 Pebri Yunanda	11/07/2023 07:49:19 WIB
40 Urbanus Dhalu	11/07/2023 07:49:20 WIB
41 Kevin A Th Pitoy	11/07/2023 07:49:27 WIB
42 Alfa Avesiana Romdhoni	11/07/2023 07:49:34 WIB
43 Rachmaniar L.	11/07/2023 07:49:55 WIB
44 Dwi Fajar Rini	11/07/2023 07:50:13 WIB

45 M. Khoiri	11/07/2023 07:50:18 WIB
46 Susanti Sembiring	11/07/2023 07:50:25 WIB
47 Melkias Kedepa	11/07/2023 07:50:28 WIB
48 Sharon S. Simamora	11/07/2023 07:50:30 WIB
49 Selestinus Paundanan	11/07/2023 07:50:37 WIB
50 Oskhar Rawindra Sumual	11/07/2023 07:50:38 WIB
51 Muhammad Erwinsyah	11/07/2023 07:50:48 WIB
52 Herlita	11/07/2023 07:51:06 WIB
53 Muhajir	11/07/2023 07:51:11 WIB
54 M. Marwan Hamzah	11/07/2023 07:51:49 WIB
55 Efri Darlin Marto Dachi	11/07/2023 07:51:52 WIB
56 Aidin Rahmatullah	11/07/2023 07:51:53 WIB
57 Leksadharna Kengsiswoyo	11/07/2023 07:51:55 WIB
58 Supriyanto M. Radjak	11/07/2023 07:52:06 WIB
59 Fong Tek Wing	11/07/2023

	07:52:20 WIB
60 Andhika Yudha Perwira	11/07/2023 07:52:23 WIB
61 Muhammad Muallimin	11/07/2023 07:52:28 WIB
62 Novianto Rahmanty	11/07/2023 07:52:34 WIB
63 Aldo Rizaldi	11/07/2023 07:52:35 WIB
64 Sri Wijati	11/07/2023 07:52:53 WIB
65 Ai Hisanru Sebastian Manurung	11/07/2023 07:53:02 WIB
66 HM. Rusdy	11/07/2023 07:53:33 WIB
67 Fransisko	11/07/2023 07:53:39 WIB
68 Gregorius Retas Daeng	11/07/2023 07:54:02 WIB
69 Qomaruddin	11/07/2023 07:54:05 WIB
70 Setiadi Indra Nugraha	11/07/2023 07:54:06 WIB
71 Tolib	11/07/2023 07:54:08 WIB
72 Andy Wiyanto	11/07/2023 07:54:12 WIB
73 Rudy Fadillah	11/07/2023 07:54:12 WIB
74 Ricky Kurniawan Chairul	

	11/07/2023 07:54:20 WIB
75 Suratiny Sulesdianingrum	11/07/2023 07:54:25 WIB
76 Cepi Hendrayani	11/07/2023 07:54:29 WIB
77 TOHERI YUNITSOON HASSOR	11/07/2023 07:54:33 WIB
78 Nurhidayat Umacina	11/07/2023 07:54:34 WIB
79 Adam Wijaya	11/07/2023 07:54:44 WIB
80 Reza Puji Juliana	11/07/2023 07:54:52 WIB
81 Yunus Adhi Prabowo	11/07/2023 07:54:57 WIB
82 Rahmawati Sukri	11/07/2023 07:55:09 WIB
83 Wijaya Dewantara	11/07/2023 07:55:09 WIB
84 Piterson Maumeta	11/07/2023 07:55:28 WIB
85 Mohamad Yusup	11/07/2023 07:55:33 WIB
86 Endang Kuswardani	11/07/2023 07:55:35 WIB
87 Suratno	11/07/2023 07:55:38 WIB
88 Dicky Patadjenu	11/07/2023 07:55:49 WIB

89 Sudarmanto	11/07/2023 07:56:58 WIB
90 Us Us Kurniwantoro	11/07/2023 07:57:39 WIB
91 Bujang Musa	11/07/2023 07:57:48 WIB
92 Ainur Rohman	11/07/2023 07:57:58 WIB
93 Dinda Wulan Ariani	11/07/2023 07:58:06 WIB
94 Endang Kuswardani	11/07/2023 07:58:44 WIB
95 Edianto	11/07/2023 07:59:36 WIB
96 Jackson Sahala Pakpahan	11/07/2023 07:59:41 WIB
97 Turedo Sitindaon	11/07/2023 08:00:05 WIB
98 Imam Sofian	11/07/2023 08:00:47 WIB
99 Neng Yayat Nurhayati	11/07/2023 08:00:50 WIB
100 Ahmad Yani	11/07/2023 08:01:53 WIB
101 Junjati Patra	11/07/2023 08:02:51 WIB
102 David Richard Stheven Runtuwarouw	11/07/2023 08:04:51 WIB
103 M. Ardiyansyah	11/07/2023

	08:04:53 WIB
104 Mohamad Rivky Mohi	11/07/2023 08:05:26 WIB
105 Ahmad Yani	11/07/2023 08:05:38 WIB
106 Eni Kamal	11/07/2023 08:08:11 WIB
107 Nurul Auliah	11/07/2023 08:08:48 WIB
108 Ikrar	11/07/2023 08:09:10 WIB
109 Rizaldi Nazaruddin	11/07/2023 08:09:56 WIB
110 Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho	11/07/2023 08:10:33 WIB
111 Hendry Rachmadani	11/07/2023 08:10:41 WIB
112 Hidayatullah	11/07/2023 08:13:46 WIB
113 Akhmad Ryan Firmansyah	11/07/2023 08:14:04 WIB
114 Apedius I. Mote	11/07/2023 08:16:02 WIB
115 N. Sulisty Setiawan	11/07/2023 08:17:30 WIB
116 Anastasia Henny	11/07/2023 08:30:20 WIB
117 Hery Purwanto	11/07/2023 08:30:53 WIB
118 Ida Bagus Putu Gede Sukrisna	

	11/07/2023 08:46:45 WIB
119 Pangeran	11/07/2023 08:48:35 WIB
120 Made Sabda Adi Nugraha	11/07/2023 08:52:14 WIB
121 Bambang Santoso	11/07/2023 09:00:24 WIB
122 Nadya Prita Gemala D.	11/07/2023 09:06:10 WIB

## Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Maulana Hasanudin	11/07/2023 10:03:49 WIB
2	Nina Kurniasari Sutarman	11/07/2023 10:03:58 WIB
3	Melkias Kedepa	11/07/2023 10:05:28 WIB
4	Suratno	11/07/2023 10:12:43 WIB
5	Hendry Rachmadani	11/07/2023 10:14:28 WIB
6	Tolib	11/07/2023 10:15:05 WIB
7	Apedius I. Mote	11/07/2023 10:15:55 WIB
8	Supriyanto M. Radjak	

	11/07/2023 10:20:16 WIB
9 Akhmad Ryan Firmansyah	11/07/2023 10:20:18 WIB
10 Urbanus Dhalu	11/07/2023 10:20:34 WIB
11 Alfa Avesiana Romdhoni	11/07/2023 10:20:35 WIB
12 M. Khoiri	11/07/2023 10:20:42 WIB
13 Lusiana Irmalia	11/07/2023 10:21:27 WIB
14 Anwar	11/07/2023 10:21:33 WIB
15 Gregorius Retas Daeng	11/07/2023 10:21:38 WIB
16 Khairul Anwar	11/07/2023 10:21:58 WIB
17 Ainur Rohman	11/07/2023 10:22:01 WIB
18 Herlita	11/07/2023 10:22:04 WIB
19 Jonveri	11/07/2023 10:22:14 WIB
20 Cepi Hendrayani	11/07/2023 10:22:20 WIB
21 Muhajir	11/07/2023 10:22:31 WIB
22 Dwi Fajar Rini	11/07/2023 10:22:33 WIB

23 Andhika Yudha Perwira	11/07/2023 10:22:35 WIB
24 Fransisko	11/07/2023 10:22:36 WIB
25 Made Sabda Adi Nugraha	11/07/2023 10:22:44 WIB
26 Sharon S. Simamora	11/07/2023 10:22:47 WIB
27 Dicky Patadjenu	11/07/2023 10:22:54 WIB
28 Agatha A. Lidyawati Rafli	11/07/2023 10:23:02 WIB
29 Vike Verry Ponto	11/07/2023 10:23:09 WIB
30 Oyong Darwan	11/07/2023 10:23:09 WIB
31 Oskhar Rawindra Sumual	11/07/2023 10:23:16 WIB
32 Adhari Widya Prakarsa	11/07/2023 10:23:24 WIB
33 Ferry Firmansyah	11/07/2023 10:23:28 WIB
34 Zarkasih	11/07/2023 10:23:42 WIB
35 Neng Yayat Nurhayati	11/07/2023 10:23:42 WIB
36 Ahmad Yani	11/07/2023 10:23:44 WIB
37 Susanti Sembiring	11/07/2023

	10:23:49 WIB
38 Hidayatullah	11/07/2023 10:23:49 WIB
39 Muhammad Muallimin	11/07/2023 10:23:55 WIB
40 Endang Kuswardani	11/07/2023 10:23:58 WIB
41 Edianto	11/07/2023 10:24:00 WIB
42 Yance Salambauw	11/07/2023 10:24:01 WIB
43 Nurhidayat Umacina	11/07/2023 10:24:07 WIB
44 Pebri Yunanda	11/07/2023 10:24:10 WIB
45 Rahmawati Sukri	11/07/2023 10:24:18 WIB
46 Sapril Rahman	11/07/2023 10:24:23 WIB
47 Bujang Musa	11/07/2023 10:24:24 WIB
48 Endang Kuswardani	11/07/2023 10:24:29 WIB
49 Zaenal Fandi	11/07/2023 10:24:38 WIB
50 Fong Tek Wing	11/07/2023 10:24:39 WIB
51 Rudy Fadillah	11/07/2023 10:24:47 WIB
52 Novianto Rahmantyo	

	11/07/2023 10:24:50 WIB
53 Piterson Maumeta	11/07/2023 10:25:01 WIB
54 David Richard Stheven Runtuwarouw	11/07/2023 10:25:05 WIB
55 MHD. Fadhli	11/07/2023 10:25:27 WIB
56 Mohamad Rivky Mohi	11/07/2023 10:25:37 WIB
57 Wijaya Dewantara	11/07/2023 10:25:48 WIB
58 Eni Kamal	11/07/2023 10:26:01 WIB
59 Said Ahmad Kosasi	11/07/2023 10:26:07 WIB
60 Ricky Kurniawan Chairul	11/07/2023 10:26:20 WIB
61 Jimmy Himawan	11/07/2023 10:26:38 WIB
62 Hermanto Hamdi	11/07/2023 10:26:40 WIB
63 HM. Rusdy	11/07/2023 10:26:52 WIB
64 Muh. Dirfan Akbar Za	11/07/2023 10:26:59 WIB
65 Mehbob	11/07/2023 10:27:00 WIB
66 Setiadi Indra Nugraha	11/07/2023 10:27:01 WIB

67 Teuku Irmansyah	11/07/2023 10:27:09 WIB
68 M. Marwan Hamzah	11/07/2023 10:27:10 WIB
69 Oddy Gibson	11/07/2023 10:27:15 WIB
70 Turedo Sitindaon	11/07/2023 10:27:21 WIB
71 Ai Hisanru Sebastian Manurung	11/07/2023 10:27:25 WIB
72 Muhammad Jamal	11/07/2023 10:27:28 WIB
73 Hery Purwanto	11/07/2023 10:28:01 WIB
74 Astria Blandina Gaidaka	11/07/2023 10:28:03 WIB
75 Andy Wiyanto	11/07/2023 10:28:07 WIB
76 Muhammad Erwinsyah	11/07/2023 10:28:09 WIB
77 M. Ardiyansyah	11/07/2023 10:28:35 WIB
78 Yandri Sudarso	11/07/2023 10:29:05 WIB
79 Jonaidi	11/07/2023 10:29:11 WIB
80 R. Arief Triyoga Utama	11/07/2023 10:29:39 WIB
81 Ahmad Yani	11/07/2023

	10:29:57 WIB
82 Akbar F.A. Salampessy	11/07/2023 10:30:57 WIB
83 Kevin A Th Pitoy	11/07/2023 10:31:34 WIB
84 Selestinus Paundanan	11/07/2023 10:31:51 WIB
85 Reza Puji Juliana	11/07/2023 10:31:58 WIB
86 Jackson Sahala Pakpahan	11/07/2023 10:32:53 WIB
87 Us Us Kurniwantoro	11/07/2023 10:35:21 WIB
88 Imam Sofian	11/07/2023 10:35:31 WIB
89 Afriyandi Chair Samallo	11/07/2023 10:35:34 WIB
90 Suratiny Sulesdianingrum	11/07/2023 10:35:36 WIB
91 Aldo Rizaldi	11/07/2023 10:35:37 WIB
92 Suratiny Sulesdianingrum	11/07/2023 10:35:39 WIB
93 Ikrar	11/07/2023 10:35:47 WIB
94 Ali Akbar	11/07/2023 10:38:31 WIB
95 Mohamad Yusup	11/07/2023 10:38:37 WIB
96 Ariyan Subakti	

	11/07/2023 10:38:52 WIB
97 M. Tomi Samantha	11/07/2023 10:39:17 WIB
98 Sri Wijati	11/07/2023 10:41:49 WIB
99 Junjati Patra	11/07/2023 10:45:56 WIB
100 Anastasia Henny	11/07/2023 10:52:34 WIB
101 Ida Bagus Putu Gede Sukrisna	11/07/2023 10:54:03 WIB
102 Hadi Sasmita	11/07/2023 10:58:03 WIB
103 L. Sitanggang	11/07/2023 11:01:49 WIB
104 L. Sitanggang	11/07/2023 11:03:15 WIB
105 Adam Wijaya	11/07/2023 11:03:22 WIB
106 L. Sitanggang	11/07/2023 11:03:25 WIB
107 L. Sitanggang	11/07/2023 11:03:33 WIB
108 H. Lahaya	11/07/2023 11:03:34 WIB
109 L. Sitanggang	11/07/2023 11:03:43 WIB
110 Pangeran	11/07/2023 11:08:08 WIB

111 Dinda Wulan Ariani	11/07/2023 11:09:05 WIB
112 Qomaruddin	11/07/2023 11:09:42 WIB
113 Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho	11/07/2023 11:10:20 WIB
114 Bambang Santoso	11/07/2023 11:14:59 WIB
115 Bayu Listiawan	11/07/2023 11:16:08 WIB
116 Aidin Rahmatullah	11/07/2023 11:18:29 WIB
117 Rachmaniar L.	11/07/2023 11:26:10 WIB
118 Ridwan Comeng	11/07/2023 11:33:24 WIB
119 Rizaldi Nazaruddin	11/07/2023 11:34:55 WIB
120 N. Sulisty Setiawan	11/07/2023 11:45:51 WIB

## Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Susanti Sembiring	11/07/2023 13:00:16 WIB
2	Us Us Kurniwantoro	11/07/2023 13:00:25 WIB
3	Agatha A. Lidyawati Rafli	

	11/07/2023 13:00:25 WIB
4 Nurhidayat Umacina	11/07/2023 13:00:26 WIB
5 Teuku Irmansyah	11/07/2023 13:00:40 WIB
6 Oyong Darwan	11/07/2023 13:00:42 WIB
7 L. Sitanggang	11/07/2023 13:00:48 WIB
8 Eni Kamal	11/07/2023 13:00:55 WIB
9 Eni Kamal	11/07/2023 13:00:55 WIB
10 Turedo Sitindaon	11/07/2023 13:01:14 WIB
11 Bayu Listiawan	11/07/2023 13:01:20 WIB
12 Sapril Rahman	11/07/2023 13:01:36 WIB
13 Supriyanto M. Radjak	11/07/2023 13:01:51 WIB
14 Ricky Kurniawan Chairul	11/07/2023 13:02:47 WIB
15 Tolib	11/07/2023 13:02:55 WIB
16 Aidin Rahmatullah	11/07/2023 13:02:58 WIB
17 Junjati Patra	11/07/2023 13:03:01 WIB

18 Oskhar Rawindra Sumual	11/07/2023 13:03:13 WIB
19 Neng Yayat Nurhayati	11/07/2023 13:03:15 WIB
20 Muhammad Erwinsyah	11/07/2023 13:03:23 WIB
21 Rudy Fadillah	11/07/2023 13:03:36 WIB
22 Jimmy Himawan	11/07/2023 13:03:39 WIB
23 Fransisko	11/07/2023 13:04:02 WIB
24 M. Khoiri	11/07/2023 13:04:03 WIB
25 Oddy Gibson	11/07/2023 13:04:03 WIB
26 Yandri Sudarso	11/07/2023 13:04:04 WIB
27 Dwi Fajar Rini	11/07/2023 13:04:09 WIB
28 Jonveri	11/07/2023 13:04:10 WIB
29 Cepi Hendrayani	11/07/2023 13:04:11 WIB
30 Sri Wijati	11/07/2023 13:04:22 WIB
31 Novianto Rahmanty	11/07/2023 13:04:29 WIB
32 Hermanto Hamdi	11/07/2023

	13:04:35 WIB
33 Pebri Yunanda	11/07/2023 13:04:36 WIB
34 Muhammad Muallimin	11/07/2023 13:04:37 WIB
35 Edianto	11/07/2023 13:04:42 WIB
36 Adam Wijaya	11/07/2023 13:04:47 WIB
37 Selestinus Paundanan	11/07/2023 13:04:53 WIB
38 Piterson Maumeta	11/07/2023 13:04:57 WIB
39 Apedius I. Mote	11/07/2023 13:04:57 WIB
40 Hadi Sasmita	11/07/2023 13:05:08 WIB
41 M. Ardiyansyah	11/07/2023 13:05:15 WIB
42 Mohamad Rivky Mohi	11/07/2023 13:05:23 WIB
43 Adhari Widya Prakarsa	11/07/2023 13:05:53 WIB
44 Fong Tek Wing	11/07/2023 13:06:20 WIB
45 Muhajir	11/07/2023 13:06:23 WIB
46 Ahmad Yani	11/07/2023 13:06:44 WIB
47 Astria Blandina Gaidaka	

	11/07/2023 13:06:52 WIB
48 Ahmad Yani	11/07/2023 13:07:05 WIB
49 Said Ahmad Kosasi	11/07/2023 13:07:05 WIB
50 HM. Rusdy	11/07/2023 13:07:18 WIB
51 HM. Rusdy	11/07/2023 13:07:19 WIB
52 R. Arief Triyoga Utama	11/07/2023 13:07:22 WIB
53 Andhika Yudha Perwira	11/07/2023 13:07:36 WIB
54 Mehbob	11/07/2023 13:07:42 WIB
55 Jonaidi	11/07/2023 13:08:19 WIB
56 Khairul Anwar	11/07/2023 13:08:22 WIB
57 Endang Kuswardani	11/07/2023 13:08:24 WIB
58 Ai Hisanru Sebastian Manurung	11/07/2023 13:08:25 WIB
59 Endang Kuswardani	11/07/2023 13:08:40 WIB
60 Nina Kurniasari Sutarman	11/07/2023 13:09:20 WIB
61 Anwar	11/07/2023 13:09:25 WIB

62 Bujang Musa	11/07/2023 13:09:43 WIB
63 Bambang Santoso	11/07/2023 13:10:07 WIB
64 Akbar F.A. Salampessy	11/07/2023 13:10:15 WIB
65 Leksadharna Kengsiswoyo	11/07/2023 13:10:44 WIB
66 Suratno	11/07/2023 13:10:49 WIB
67 Ali Akbar	11/07/2023 13:11:27 WIB
68 Ferry Firmansyah	11/07/2023 13:11:29 WIB
69 Urbanus Dhalu	11/07/2023 13:11:35 WIB
70 Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho	11/07/2023 13:11:42 WIB
71 Ridwan Comeng	11/07/2023 13:11:56 WIB
72 Zarkasih	11/07/2023 13:11:57 WIB
73 Ainur Rohman	11/07/2023 13:12:00 WIB
74 Reza Puji Juliana	11/07/2023 13:12:09 WIB
75 Gregorius Retas Daeng	11/07/2023 13:12:24 WIB
76 Alfa Avesiana Romdhoni	11/07/2023

	13:12:25 WIB
77 Rachmaniar L.	11/07/2023 13:12:48 WIB
78 Ariyan Subakti	11/07/2023 13:12:49 WIB
79 MHD. Fadhi	11/07/2023 13:12:51 WIB
80 Suratiny Sulesdianingrum	11/07/2023 13:13:26 WIB
81 Maulana Hasanudin	11/07/2023 13:14:05 WIB
82 Vike Verry Ponto	11/07/2023 13:14:21 WIB
83 Afriyandi Chair Samallo	11/07/2023 13:15:27 WIB
84 Aldo Rizaldi	11/07/2023 13:15:46 WIB
85 Wijaya Dewantara	11/07/2023 13:16:09 WIB
86 Zaenal Fandi	11/07/2023 13:16:11 WIB
87 Kevin A Th Pitoy	11/07/2023 13:16:24 WIB
88 Dicky Patadjenu	11/07/2023 13:16:40 WIB
89 Mohamad Yusup	11/07/2023 13:16:59 WIB
90 Sudarmanto	11/07/2023 13:17:00 WIB
91 Akhmad Ryan Firmansyah	

	11/07/2023 13:17:17 WIB
92 Ikrrar	11/07/2023 13:17:24 WIB
93 Rahmawati Sukri	11/07/2023 13:18:46 WIB
94 Imam Sofian	11/07/2023 13:18:50 WIB
95 Muhammad Jamal	11/07/2023 13:19:05 WIB
96 Setiadi Indra Nugraha	11/07/2023 13:19:39 WIB
97 Anastasia Henny	11/07/2023 13:20:13 WIB
98 Ida Bagus Putu Gede Sukrisna	11/07/2023 13:20:37 WIB
99 M. Marwan Hamzah	11/07/2023 13:21:43 WIB
100 Muh. Dirfan Akbar Za	11/07/2023 13:22:09 WIB
101 Muh. Dirfan Akbar Za	11/07/2023 13:22:09 WIB
102 Hery Purwanto	11/07/2023 13:22:51 WIB
103 Eka Buana Putra	11/07/2023 13:23:59 WIB
104 Hidayatullah	11/07/2023 13:25:00 WIB
105 Rizaldi Nazaruddin	11/07/2023 13:25:10 WIB

106 David Richard Steven Runtuwarouw	11/07/2023 13:25:33 WIB
107 Ahmad Yani	11/07/2023 13:26:45 WIB
108 Made Sabda Adi Nugraha	11/07/2023 13:26:51 WIB
109 Hendry Rachmadani	11/07/2023 13:27:18 WIB
110 Andy Wiyanto	11/07/2023 13:28:53 WIB
111 Dinda Wulan Ariani	11/07/2023 13:29:25 WIB
112 Yunus Adhi Prabowo	11/07/2023 13:31:28 WIB
113 Sharon S. Simamora	11/07/2023 13:31:48 WIB
114 Qomaruddin	11/07/2023 13:35:41 WIB
115 Lusiana Irmalia	11/07/2023 13:38:10 WIB
116 Herlita	11/07/2023 13:42:01 WIB
117 Pangeran	11/07/2023 13:43:12 WIB
118 Melkias Kedepa	11/07/2023 13:49:54 WIB
119 Nadya Prita Gemala D.	11/07/2023 14:02:58 WIB
120 Achmad Rifai	11/07/2023

		14:08:54 WIB
121 N. Sulisty Setiawan	11/07/2023	14:10:00 WIB
122 Jackson Sahala Pakpahan	11/07/2023	14:10:16 WIB
123 Elmilya Ashyfa Hutomo	11/07/2023	14:11:16 WIB
124 M. Tomi Samantha	11/07/2023	14:19:23 WIB
125 Zakarias Horota	11/07/2023	14:38:02 WIB
126 Roland Y.S. Yarolo	11/07/2023	15:16:00 WIB

## Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Eni Kamal	12/07/2023 08:31:01 WIB
2	Muhammad Erwinsyah	12/07/2023 08:32:00 WIB
3	Muh. Dirfan Akbar Za	12/07/2023 08:32:24 WIB
4	Sapril Rahman	12/07/2023 08:32:33 WIB
5	R. Arief Triyoga Utama	12/07/2023 08:32:37 WIB
6	Endang Kuswardani	12/07/2023

	08:33:32 WIB
7 Yandri Sudarso	12/07/2023 08:33:54 WIB
8 M. Khoiri	12/07/2023 08:34:00 WIB
9 Mehbob	12/07/2023 08:34:00 WIB
10 Ahmad Yani	12/07/2023 08:35:04 WIB
11 Nurhidayat Umacina	12/07/2023 08:35:14 WIB
12 Astria Blandina Gaidaka	12/07/2023 08:35:34 WIB
13 Khairul Anwar	12/07/2023 08:35:48 WIB
14 Fransisko	12/07/2023 08:36:05 WIB
15 Oskhar Rawindra Sumual	12/07/2023 08:36:27 WIB
16 Teuku Irmansyah	12/07/2023 08:36:40 WIB
17 Zaenal Fandi	12/07/2023 08:37:37 WIB
18 Ricky Kurniawan Chairul	12/07/2023 08:37:46 WIB
19 Cepi Hendrayani	12/07/2023 08:38:13 WIB
20 Agatha A. Lidyawati Rafli	12/07/2023 08:38:16 WIB
21 Muhajir	

	12/07/2023 08:38:25 WIB
22 Dicky Patadjenu	12/07/2023 08:38:53 WIB
23 Junjati Patra	12/07/2023 08:39:05 WIB
24 Jimmy Himawan	12/07/2023 08:39:17 WIB
25 Ainur Rohman	12/07/2023 08:39:36 WIB
26 Said Ahmad Kosasi	12/07/2023 08:39:36 WIB
27 Achmad Gozali	12/07/2023 08:39:56 WIB
28 Susanti Sembiring	12/07/2023 08:40:05 WIB
29 Andhika Yudha Perwira	12/07/2023 08:40:11 WIB
30 Ahmad Yani	12/07/2023 08:40:27 WIB
31 Hadi Sasmita	12/07/2023 08:40:36 WIB
32 Hidayatullah	12/07/2023 08:40:49 WIB
33 Hendry Rachmadani	12/07/2023 08:41:15 WIB
34 Jonveri	12/07/2023 08:41:22 WIB
35 Jonveri	12/07/2023 08:41:23 WIB

36 Supriyanto M. Radjak	12/07/2023 08:41:27 WIB
37 Jonaidi	12/07/2023 08:41:28 WIB
38 Anwar	12/07/2023 08:41:28 WIB
39 Sri Wijati	12/07/2023 08:41:33 WIB
40 L. Sitanggang	12/07/2023 08:41:36 WIB
41 Oddy Gibson	12/07/2023 08:41:40 WIB
42 L. Sitanggang	12/07/2023 08:41:42 WIB
43 Ai Hisanru Sebastian Manurung	12/07/2023 08:41:42 WIB
44 Neng Yayat Nurhayati	12/07/2023 08:41:50 WIB
45 L. Sitanggang	12/07/2023 08:42:02 WIB
46 L. Sitanggang	12/07/2023 08:42:03 WIB
47 L. Sitanggang	12/07/2023 08:42:06 WIB
48 L. Sitanggang	12/07/2023 08:42:07 WIB
49 Gregorius Retas Daeng	12/07/2023 08:42:12 WIB
50 Jackson Sahala Pakpahan	12/07/2023

	08:42:16 WIB
51 Elmilya Ashyfa Hutomo	12/07/2023 08:42:44 WIB
52 Novianto Rahmantyo	12/07/2023 08:42:45 WIB
53 Fong Tek Wing	12/07/2023 08:42:53 WIB
54 Eka Buana Putra	12/07/2023 08:42:56 WIB
55 Roland Y.S. Yarolo	12/07/2023 08:43:30 WIB
56 N. Sulistyo Setiawan	12/07/2023 08:43:44 WIB
57 Muhammad Muallimin	12/07/2023 08:43:45 WIB
58 Alfa Avesiana Romdhoni	12/07/2023 08:43:47 WIB
59 Nina Kurniasari Sutarman	12/07/2023 08:43:49 WIB
60 Rahmawati Sukri	12/07/2023 08:43:56 WIB
61 Adam Wijaya	12/07/2023 08:44:02 WIB
62 Deri Hafizh	12/07/2023 08:44:08 WIB
63 TOHERI YUNITSOON HASSOR	12/07/2023 08:44:14 WIB
64 Oyong Darwan	12/07/2023 08:44:28 WIB
65 Lusiana Irmalia	

	12/07/2023 08:45:21 WIB
66 Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho	12/07/2023 08:45:41 WIB
67 Vike Verry Ponto	12/07/2023 08:45:43 WIB
68 Ferry Firmansyah	12/07/2023 08:46:09 WIB
69 Herlita	12/07/2023 08:46:13 WIB
70 Reza Puji Juliana	12/07/2023 08:46:29 WIB
71 Suratiny Sulesdianingrum	12/07/2023 08:46:30 WIB
72 Ali Akbar	12/07/2023 08:46:35 WIB
73 Aidin Rahmatullah	12/07/2023 08:46:36 WIB
74 Rudy Fadillah	12/07/2023 08:46:37 WIB
75 Hermanto Hamdi	12/07/2023 08:46:39 WIB
76 Muhammad Jamal	12/07/2023 08:46:40 WIB
77 Bujang Musa	12/07/2023 08:46:43 WIB
78 Bujang Musa	12/07/2023 08:46:43 WIB
79 Sharon S. Simamora	12/07/2023 08:46:44 WIB

80 Bayu Listiawan	12/07/2023 08:46:46 WIB
81 Rizaldi Nazaruddin	12/07/2023 08:46:48 WIB
82 Dwi Fajar Rini	12/07/2023 08:46:48 WIB
83 M. Tomi Samantha	12/07/2023 08:46:49 WIB
84 Akhmad Ryan Firmansyah	12/07/2023 08:46:50 WIB
85 Suratno	12/07/2023 08:47:18 WIB
86 Yance Salambauw	12/07/2023 08:47:24 WIB
87 Akbar F.A. Salampessy	12/07/2023 08:47:31 WIB
88 Leksadharna Kengsiswoyo	12/07/2023 08:47:49 WIB
89 Nurul Auliah	12/07/2023 08:48:03 WIB
90 MHD. Fadhli	12/07/2023 08:48:19 WIB
91 Yunus Adhi Prabowo	12/07/2023 08:48:21 WIB
92 Muji Rahayu	12/07/2023 08:48:34 WIB
93 Setiadi Indra Nugraha	12/07/2023 08:48:39 WIB
94 Melkias Kedepa	12/07/2023

	08:48:47 WIB
95 HM. Rusdy	12/07/2023 08:49:08 WIB
96 Adhari Widya Prakarsa	12/07/2023 08:49:30 WIB
97 Kevin A Th Pitoy	12/07/2023 08:49:31 WIB
98 Andy Wiyanto	12/07/2023 08:49:48 WIB
99 Turedo Sitindaon	12/07/2023 08:50:01 WIB
100 Rachmaniar L.	12/07/2023 08:51:05 WIB
101 Edianto	12/07/2023 08:51:10 WIB
102 Mohamad Yusup	12/07/2023 08:51:22 WIB
103 Hery Purwanto	12/07/2023 08:51:42 WIB
104 Bambang Santoso	12/07/2023 08:51:47 WIB
105 Dinda Wulan Ariani	12/07/2023 08:51:57 WIB
106 Ridwan Comeng	12/07/2023 08:52:18 WIB
107 Tolib	12/07/2023 08:52:29 WIB
108 Imam Sofian	12/07/2023 08:53:19 WIB
109 Us Us Kurniwantoro	

	12/07/2023 08:53:31 WIB
110 Mohamad Rivky Mohi	12/07/2023 08:53:50 WIB
111 Afriyandi Chair Samallo	12/07/2023 08:53:56 WIB
112 Aldo Rizaldi	12/07/2023 08:57:34 WIB
113 Wijaya Dewantara	12/07/2023 08:57:48 WIB
114 Anastasia Henny	12/07/2023 08:59:05 WIB
115 Apedius I. Mote	12/07/2023 09:00:26 WIB
116 M. Ardiyansyah	12/07/2023 09:00:41 WIB
117 Zarkasih	12/07/2023 09:02:41 WIB
118 Maulana Hasanudin	12/07/2023 09:03:02 WIB
119 Selestinus Paundanan	12/07/2023 09:03:04 WIB
120 Piterson Maumeta	12/07/2023 09:03:30 WIB
121 David Richard Stheven Runtuwarouw	12/07/2023 09:04:16 WIB
122 Pebri Yunanda	12/07/2023 09:07:20 WIB
123 Efri Darlin Marto Dachi	12/07/2023 09:07:58 WIB

124 Zakarias Horota	12/07/2023 09:08:11 WIB
125 Pangeran	12/07/2023 09:08:33 WIB
126 Urbanus Dhalu	12/07/2023 09:17:02 WIB
127 M. Marwan Hamzah	12/07/2023 09:17:03 WIB
128 Ikrar	12/07/2023 09:19:16 WIB
129 Ariyan Subakti	12/07/2023 09:23:24 WIB
130 Achmad Rifai	12/07/2023 09:24:30 WIB
131 Ida Bagus Putu Gede Sukrisna	12/07/2023 09:28:31 WIB
132 Made Sabda Adi Nugraha	12/07/2023 09:28:56 WIB
133 Febronesco Ferdinand Takaendengan	12/07/2023 09:30:49 WIB
134 H. Lahaya	12/07/2023 09:31:15 WIB
135 Sudarmanto	12/07/2023 10:07:11 WIB
136 Nadya Prita Gemala D.	12/07/2023 10:07:29 WIB

**Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait  
dalam PPHU Tahun 2024**

**SUDAH ABSEN**

<b>NO</b>	<b>NAME</b>	<b>TTD</b>
1	M. Marwan Hamzah	12/07/2023 10:01:08 WIB
2	Fong Tek Wing	12/07/2023 10:04:03 WIB
3	Anastasia Henny	12/07/2023 10:04:18 WIB
4	Novianto Rahmantyo	12/07/2023 10:07:04 WIB
5	Sudarmanto	12/07/2023 10:07:16 WIB
6	Bujang Musa	12/07/2023 10:07:17 WIB
7	Astria Blandina Gaidaka	12/07/2023 10:08:14 WIB
8	Junjati Patra	12/07/2023 10:08:22 WIB
9	Akhmad Ryan Firmansyah	12/07/2023 10:09:14 WIB
10	Hidayatullah	12/07/2023 10:10:09 WIB
11	Piterson Maumeta	12/07/2023 10:11:10 WIB
12	Hermanto Hamdi	12/07/2023 10:18:30 WIB
13	Cepi Hendrayani	12/07/2023 10:25:04 WIB
14	Eni Kamal	12/07/2023

	10:25:37 WIB
15 Oyong Darwan	12/07/2023 10:27:10 WIB
16 Agatha A. Lidyawati Rafli	12/07/2023 10:27:47 WIB
17 Muhammad Jamal	12/07/2023 10:28:08 WIB
18 Maulana Hasanudin	12/07/2023 10:28:54 WIB
19 Zaenal Fandi	12/07/2023 10:29:29 WIB
20 Ricky Kurniawan Chairul	12/07/2023 10:29:38 WIB
21 Neng Yayat Nurhayati	12/07/2023 10:29:49 WIB
22 Dinda Wulan Ariani	12/07/2023 10:30:12 WIB
23 Herlita	12/07/2023 10:30:14 WIB
24 Vike Verry Ponto	12/07/2023 10:30:28 WIB
25 Dwi Fajar Rini	12/07/2023 10:30:37 WIB
26 Andhika Yudha Perwira	12/07/2023 10:30:38 WIB
27 Lusiana Irmalia	12/07/2023 10:30:39 WIB
28 Bayu Listiawan	12/07/2023 10:31:19 WIB
29 Yandri Sudarso	

	12/07/2023 10:31:27 WIB
30 Sapril Rahman	12/07/2023 10:31:29 WIB
31 Setiadi Indra Nugraha	12/07/2023 10:31:40 WIB
32 Oskhar Rawindra Sumual	12/07/2023 10:31:44 WIB
33 Jimmy Himawan	12/07/2023 10:31:55 WIB
34 Khairul Anwar	12/07/2023 10:31:56 WIB
35 Susanti Sembiring	12/07/2023 10:32:02 WIB
36 Rahmawati Sukri	12/07/2023 10:32:19 WIB
37 Elmilya Ashyfa Hutomo	12/07/2023 10:32:20 WIB
38 Gregorius Retas Daeng	12/07/2023 10:32:23 WIB
39 Eka Buana Putra	12/07/2023 10:32:26 WIB
40 Sharon S. Simamora	12/07/2023 10:32:35 WIB
41 Rizaldi Nazaruddin	12/07/2023 10:32:50 WIB
42 Yunus Adhi Prabowo	12/07/2023 10:32:58 WIB
43 Dicky Patadjenu	12/07/2023 10:33:17 WIB

44 Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho	12/07/2023 10:33:39 WIB
45 Herman Ade	12/07/2023 10:33:47 WIB
46 Edianto	12/07/2023 10:33:49 WIB
47 HM. Rusdy	12/07/2023 10:33:56 WIB
48 Imam Sofian	12/07/2023 10:34:04 WIB
49 Turedo Sitindaon	12/07/2023 10:34:14 WIB
50 Oddy Gibson	12/07/2023 10:34:24 WIB
51 M. Ardiyansyah	12/07/2023 10:34:37 WIB
52 Roland Y.S. Yarolo	12/07/2023 10:35:02 WIB
53 Akbar F.A. Salampessy	12/07/2023 10:35:33 WIB
54 Fransisko	12/07/2023 10:35:37 WIB
55 Bambang Santoso	12/07/2023 10:36:04 WIB
56 Jonveri	12/07/2023 10:36:05 WIB
57 Ida Bagus Putu Gede Sukrisna	12/07/2023 10:36:22 WIB
58 Jackson Sahala Pakpahan	12/07/2023

	10:36:22 WIB
59 Ahmad Yani	12/07/2023 10:36:28 WIB
60 N. Sulisty Setiawan	12/07/2023 10:37:47 WIB
61 Andy Wiyanto	12/07/2023 10:38:34 WIB
62 Sri Wijati	12/07/2023 10:39:03 WIB
63 Reza Puji Juliana	12/07/2023 10:40:36 WIB
64 M. Khoiri	12/07/2023 10:41:53 WIB
65 Muhammad Erwinsyah	12/07/2023 10:43:59 WIB
66 Wijaya Dewantara	12/07/2023 10:44:04 WIB
67 Melkias Kedepa	12/07/2023 10:45:34 WIB
68 Adam Wijaya	12/07/2023 10:45:37 WIB
69 Aidin Rahmatullah	12/07/2023 10:47:13 WIB
70 Muhammad Muallimin	12/07/2023 10:51:17 WIB
71 Us Us Kurniwantoro	12/07/2023 10:52:28 WIB
72 Pangeran	12/07/2023 10:58:55 WIB
73 Ali Akbar	

	12/07/2023 11:09:50 WIB
74 R. Arief Triyoga Utama	12/07/2023 11:25:28 WIB
75 Qomaruddin	12/07/2023 11:54:42 WIB
76 Achmad Rifai	12/07/2023 12:00:39 WIB
77 Rudy Fadillah	12/07/2023 12:08:27 WIB
78 Urbanus Dhalu	12/07/2023 12:17:10 WIB
79 Alfa Avesiana Romdhoni	12/07/2023 12:19:22 WIB
80 Supriyanto M. Radjak	12/07/2023 12:36:45 WIB
81 Ariyan Subakti	12/07/2023 12:42:28 WIB
82 Nina Kurniasari Sutarman	12/07/2023 12:47:15 WIB
83 Ferry Firmansyah	12/07/2023 13:06:15 WIB
84 Afriyandi Chair Samallo	12/07/2023 13:54:54 WIB
85 Rachmaniar L.	12/07/2023 13:58:40 WIB
86 Febronesco Ferdinand Takaendengan	12/07/2023 13:59:43 WIB
87 Deri Hafizh	12/07/2023 14:11:49 WIB

88 Pebri Yunanda	12/07/2023 14:15:06 WIB
89 Made Sabda Adi Nugraha	12/07/2023 14:16:01 WIB
90 Mohamad Rivky Mohi	12/07/2023 14:16:38 WIB
91 Nadya Prita Gemala D.	12/07/2023 14:19:04 WIB
92 Said Ahmad Kosasi	12/07/2023 14:20:31 WIB
93 H. Lahaya	12/07/2023 14:20:54 WIB
94 Mehbob	12/07/2023 14:25:42 WIB
95 Hendry Rachmadani	12/07/2023 14:33:49 WIB
96 Hery Purwanto	12/07/2023 14:40:37 WIB
97 MHD. Fadhli	12/07/2023 14:43:18 WIB
98 Suratno	12/07/2023 14:44:03 WIB
99 Apedius I. Mote	12/07/2023 14:54:46 WIB
100 Endang Kuswardani	12/07/2023 14:56:03 WIB
101 Endang Kuswardani	12/07/2023 14:59:31 WIB
102 Jonaidi	12/07/2023

	15:01:57 WIB
103 Ridwan Comeng	12/07/2023
	15:02:38 WIB
104 Anwar	12/07/2023
	15:17:11 WIB

## Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

### SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ali Akbar	13/07/2023 08:03:12 WIB
2	Achmad Gozali	13/07/2023 08:03:40 WIB
3	Vike Verry Ponto	13/07/2023 08:04:23 WIB
4	Neng Yayat Nurhayati	13/07/2023 08:04:23 WIB
5	Eni Kamal	13/07/2023 08:04:43 WIB
6	Ahmad Yani	13/07/2023 08:04:56 WIB
7	Adhari Widya Prakarsa	13/07/2023 08:05:11 WIB
8	Fong Tek Wing	13/07/2023 08:05:38 WIB
9	Anastasia Henny	13/07/2023 08:06:09 WIB
10	Endang Kuswardani	13/07/2023 08:06:24 WIB
11	Cepi Hendrayani	

	13/07/2023 08:06:56 WIB
12 Ferry Firmansyah	13/07/2023 08:08:04 WIB
13 Muhammad Jamal	13/07/2023 08:09:10 WIB
14 M. Tomi Samantha	13/07/2023 08:09:17 WIB
15 Dwi Fajar Rini	13/07/2023 08:09:49 WIB
16 Fransisko	13/07/2023 08:10:12 WIB
17 Muhammad Erwinsyah	13/07/2023 08:10:22 WIB
18 Muji Rahayu	13/07/2023 08:10:25 WIB
19 Mohamad Yusup	13/07/2023 08:12:04 WIB
20 Jackson Sahala Pakpahan	13/07/2023 08:12:11 WIB
21 Jimmy Himawan	13/07/2023 08:12:24 WIB
22 Yandri Sudarso	13/07/2023 08:12:37 WIB
23 Suratno	13/07/2023 08:13:06 WIB
24 Susanti Sembiring	13/07/2023 08:13:27 WIB
25 Teuku Irmansyah	13/07/2023 08:13:29 WIB

26 Hermanto Hamdi	13/07/2023 08:13:35 WIB
27 Rizaldi Nazaruddin	13/07/2023 08:13:36 WIB
28 Herlita	13/07/2023 08:14:00 WIB
29 Lusiana Irmalia	13/07/2023 08:14:00 WIB
30 Zaenal Fandi	13/07/2023 08:14:12 WIB
31 Elmilya Ashyfa Hutomo	13/07/2023 08:14:42 WIB
32 Hidayatullah	13/07/2023 08:14:43 WIB
33 Bujang Musa	13/07/2023 08:14:49 WIB
34 Andhika Yudha Perwira	13/07/2023 08:15:06 WIB
35 Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho	13/07/2023 08:15:26 WIB
36 Aidin Rahmatullah	13/07/2023 08:15:37 WIB
37 Gregorius Retas Daeng	13/07/2023 08:16:03 WIB
38 Afriyandi Chair Samallo	13/07/2023 08:16:17 WIB
39 Sapril Rahman	13/07/2023 08:16:22 WIB
40 Sharon S. Simamora	13/07/2023

	08:16:25 WIB
41 Ai Hisanru Sebastian Manurung	13/07/2023 08:16:46 WIB
42 Zarkasih	13/07/2023 08:17:09 WIB
43 Said Ahmad Kosasi	13/07/2023 08:17:09 WIB
44 Ikrar	13/07/2023 08:17:16 WIB
45 Aldo Rizaldi	13/07/2023 08:18:07 WIB
46 Khairul Anwar	13/07/2023 08:18:11 WIB
47 Tolib	13/07/2023 08:18:33 WIB
48 Nadya Prita Gemala D.	13/07/2023 08:19:02 WIB
49 Wijaya Dewantara	13/07/2023 08:19:12 WIB
50 Junjati Patra	13/07/2023 08:20:15 WIB
51 Anwar	13/07/2023 08:20:30 WIB
52 Anwar	13/07/2023 08:20:31 WIB
53 Jonveri	13/07/2023 08:20:31 WIB
54 Oskhar Rawindra Sumual	13/07/2023 08:20:39 WIB
55 Oyong Darwan	

	13/07/2023 08:20:48 WIB
56 R. Arief Triyoga Utama	13/07/2023 08:20:49 WIB
57 Us Us Kurniwantoro	13/07/2023 08:20:59 WIB
58 Oddy Gibson	13/07/2023 08:21:08 WIB
59 Sri Wijjati	13/07/2023 08:21:31 WIB
60 M. Khoiri	13/07/2023 08:21:35 WIB
61 Alfa Avesiana Romdhoni	13/07/2023 08:21:43 WIB
62 Alfa Avesiana Romdhoni	13/07/2023 08:21:43 WIB
63 TOHERI YUNITSOON HASSOR	13/07/2023 08:21:45 WIB
64 Eka Buana Putra	13/07/2023 08:22:01 WIB
65 Akbar F.A. Salampessy	13/07/2023 08:22:04 WIB
66 Rachmaniar L.	13/07/2023 08:23:25 WIB
67 David Richard Steven Runtuwarouw	13/07/2023 08:23:35 WIB
68 Dinda Wulan Ariani	13/07/2023 08:23:58 WIB
69 Bayu Listiawan	13/07/2023 08:24:24 WIB

70 Deri Hafizh	13/07/2023 08:25:07 WIB
71 Melkias Kedepa	13/07/2023 08:25:10 WIB
72 Muh. Dirfan Akbar Za	13/07/2023 08:25:25 WIB
73 Apedius I. Mote	13/07/2023 08:25:38 WIB
74 Febronesco Ferdinand Takaendengan	13/07/2023 08:25:50 WIB
75 Dicky Patadjenu	13/07/2023 08:26:20 WIB
76 Akhmad Ryan Firmansyah	13/07/2023 08:26:50 WIB
77 Muhammad Muallimin	13/07/2023 08:27:12 WIB
78 Roland Y.S. Yarolo	13/07/2023 08:27:35 WIB
79 Ridwan Comeng	13/07/2023 08:27:51 WIB
80 Mehbob	13/07/2023 08:28:32 WIB
81 Jonaidi	13/07/2023 08:28:43 WIB
82 Hendry Rachmadani	13/07/2023 08:29:18 WIB
83 Ricky Kurniawan Chairul	13/07/2023 08:29:26 WIB
84 Rudy Fadillah	13/07/2023

	08:29:37 WIB
85 MHD. Fadhli	13/07/2023 08:29:38 WIB
86 Edianto	13/07/2023 08:30:13 WIB
87 Agatha A. Lidyawati Rafli	13/07/2023 08:30:36 WIB
88 Maulana Hasanudin	13/07/2023 08:30:39 WIB
89 Astria Blandina Gaidaka	13/07/2023 08:30:47 WIB
90 Zakarias Horota	13/07/2023 08:31:28 WIB
91 Reza Puji Juliana	13/07/2023 08:31:45 WIB
92 Rahmawati Sukri	13/07/2023 08:31:45 WIB
93 Turedo Sitindaon	13/07/2023 08:31:50 WIB
94 Mohamad Rivky Mohi	13/07/2023 08:32:38 WIB
95 HM. Rusdy	13/07/2023 08:33:36 WIB
96 Pangeran	13/07/2023 08:33:37 WIB
97 L. Sitanggang	13/07/2023 08:34:11 WIB
98 Bambang Santoso	13/07/2023 08:34:27 WIB
99 L. Sitanggang	

	13/07/2023 08:34:45 WIB
100 L. Sitanggang	13/07/2023 08:34:56 WIB
101 L. Sitanggang	13/07/2023 08:35:11 WIB
102 Qomaruddin	13/07/2023 08:35:39 WIB
103 Kevin A Th Pitoy	13/07/2023 08:40:29 WIB
104 Setiadi Indra Nugraha	13/07/2023 08:40:53 WIB
105 Leksadharna Kengsiswoyo	13/07/2023 08:41:40 WIB
106 Piterson Maumeta	13/07/2023 08:43:26 WIB
107 Muhajir	13/07/2023 08:43:29 WIB
108 Sudarmanto	13/07/2023 08:43:36 WIB
109 Supriyanto M. Radjak	13/07/2023 08:44:45 WIB
110 Urbanus Dhalu	13/07/2023 08:44:57 WIB
111 Made Sabda Adi Nugraha	13/07/2023 08:46:23 WIB
112 N. Sulisty Setiawan	13/07/2023 08:46:23 WIB
113 Efri Darlin Marto Dachi	13/07/2023 08:46:45 WIB

114 Ariyan Subakti	13/07/2023 08:48:11 WIB
115 Hery Purwanto	13/07/2023 08:50:10 WIB
116 Ainur Rohman	13/07/2023 08:50:12 WIB
117 Hadi Sasmita	13/07/2023 08:50:13 WIB
118 M. Marwan Hamzah	13/07/2023 08:50:33 WIB
119 Yunus Adhi Prabowo	13/07/2023 08:53:07 WIB
120 Yance Salambauw	13/07/2023 08:55:49 WIB
121 Ida Bagus Putu Gede Sukrisna	13/07/2023 08:55:51 WIB
122 Novianto Rahmantyo	13/07/2023 08:55:55 WIB
123 Ahmad Yani	13/07/2023 08:57:32 WIB
124 Ahmad Yani	13/07/2023 08:58:04 WIB
125 Achmad Rifai	13/07/2023 08:58:44 WIB
126 Imam Sofian	13/07/2023 08:59:24 WIB
127 Herman Ade	13/07/2023 08:59:35 WIB
128 Andy Wiyanto	13/07/2023

	09:05:51 WIB
129 Pebri Yunanda	13/07/2023 09:06:20 WIB
130 M. Ardiyansyah	13/07/2023 09:28:57 WIB
131 Adam Wijaya	13/07/2023 09:31:11 WIB
132 Nurhidayat Umacina	13/07/2023 10:11:52 WIB
133 Selestinus Paundanan	13/07/2023 10:14:51 WIB

## Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Hadi Sasmita	13/07/2023 10:30:17 WIB
2	Oskhar Rawindra Sumual	13/07/2023 10:30:17 WIB
3	Dicky Patadjenu	13/07/2023 10:30:21 WIB
4	Ricky Kurniawan Chairul	13/07/2023 10:30:34 WIB
5	Said Ahmad Kosasi	13/07/2023 10:30:44 WIB
6	Muhajir	13/07/2023 10:30:45 WIB
7	Agatha A. Lidyawati Rafli	13/07/2023 10:30:58 WIB
8	Rahmawati Sukri	

	13/07/2023 10:31:09 WIB
9 Hidayatullah	13/07/2023 10:31:18 WIB
10 Turedo Sitindaon	13/07/2023 10:31:24 WIB
11 Fong Tek Wing	13/07/2023 10:31:28 WIB
12 M. Tomi Samantha	13/07/2023 10:31:36 WIB
13 Sapril Rahman	13/07/2023 10:32:11 WIB
14 Leksadharna Kengsiswoyo	13/07/2023 10:32:19 WIB
15 Maulana Hasanudin	13/07/2023 10:32:27 WIB
16 Astria Blandina Gaidaka	13/07/2023 10:32:40 WIB
17 Andy Wiyanto	13/07/2023 10:33:28 WIB
18 Wijaya Dewantara	13/07/2023 10:33:30 WIB
19 Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho	13/07/2023 10:33:52 WIB
20 Ferry Firmansyah	13/07/2023 10:34:11 WIB
21 Edianto	13/07/2023 10:34:56 WIB
22 Roland Y.S. Yarolo	13/07/2023 10:34:59 WIB

23 Made Sabda Adi Nugraha	13/07/2023 10:35:07 WIB
24 Teuku Irmansyah	13/07/2023 10:35:48 WIB
25 Teuku Irmansyah	13/07/2023 10:35:49 WIB
26 Deri Hafizh	13/07/2023 10:36:44 WIB
27 R. Arief Triyoga Utama	13/07/2023 10:36:59 WIB
28 Akhmad Ryan Firmansyah	13/07/2023 10:37:01 WIB
29 Eni Kamal	13/07/2023 10:37:11 WIB
30 Apedius I. Mote	13/07/2023 10:37:19 WIB
31 Rizaldi Nazaruddin	13/07/2023 10:37:20 WIB
32 Dwi Fajar Rini	13/07/2023 10:37:32 WIB
33 Vike Verry Ponto	13/07/2023 10:37:51 WIB
34 Teuku Irmansyah	13/07/2023 10:37:51 WIB
35 Ida Bagus Putu Gede Sukrisna	13/07/2023 10:38:56 WIB
36 Jimmy Himawan	13/07/2023 10:39:20 WIB
37 Afriyandi Chair Samallo	13/07/2023

	10:39:25 WIB
38 Muhammad Muallimin	13/07/2023 10:39:37 WIB
39 Ahmad Yani	13/07/2023 10:39:47 WIB
40 Pebri Yunanda	13/07/2023 10:40:20 WIB
41 Zaenal Fandi	13/07/2023 10:40:27 WIB
42 Neng Yayat Nurhayati	13/07/2023 10:40:39 WIB
43 Febronesco Ferdinand Takaendengan	13/07/2023 10:41:17 WIB
44 Piterson Maumeta	13/07/2023 10:41:20 WIB
45 Bayu Listiawan	13/07/2023 10:41:21 WIB
46 Pangeran	13/07/2023 10:41:23 WIB
47 Junjati Patra	13/07/2023 10:41:36 WIB
48 Nurul Auliah	13/07/2023 10:41:52 WIB
49 Gregorius Retas Daeng	13/07/2023 10:42:07 WIB
50 Oddy Gibson	13/07/2023 10:42:38 WIB
51 Andhika Yudha Perwira	13/07/2023 10:42:45 WIB
52 Aldo Rizaldi	

	13/07/2023 10:42:58 WIB
53 Muhammad Jamal	13/07/2023 10:43:02 WIB
54 David Richard Stheven Runtuwarouw	13/07/2023 10:43:19 WIB
55 Hermanto Hamdi	13/07/2023 10:43:54 WIB
56 Bujang Musa	13/07/2023 10:44:03 WIB
57 Ai Hisanru Sebastian Manurung	13/07/2023 10:44:41 WIB
58 Oyong Darwan	13/07/2023 10:44:55 WIB
59 Sri Wijati	13/07/2023 10:45:31 WIB
60 Jonaidi	13/07/2023 10:45:34 WIB
61 HM. Rusdy	13/07/2023 10:46:18 WIB
62 Suratno	13/07/2023 10:48:18 WIB
63 Mehbob	13/07/2023 10:50:09 WIB
64 Ikrar	13/07/2023 10:50:18 WIB
65 Ariyan Subakti	13/07/2023 10:51:00 WIB
66 Efri Darlin Marto Dachi	13/07/2023 10:51:14 WIB

67 Jackson Sahala Pakpahan	13/07/2023 10:51:27 WIB
68 Muhammad Erwinsyah	13/07/2023 10:51:36 WIB
69 Lusiana Irmalia	13/07/2023 10:52:26 WIB
70 Sudarmanto	13/07/2023 10:53:26 WIB
71 Muji Rahayu	13/07/2023 10:53:31 WIB
72 Herlita	13/07/2023 10:53:49 WIB
73 Muh. Dirfan Akbar Za	13/07/2023 10:54:11 WIB
74 Elmilya Ashyfa Hutomo	13/07/2023 10:54:14 WIB
75 Dinda Wulan Ariani	13/07/2023 10:54:34 WIB
76 Fransisko	13/07/2023 10:55:17 WIB
77 Achmad Gozali	13/07/2023 11:01:37 WIB
78 N. Sulisty Setiawan	13/07/2023 11:02:33 WIB
79 Aidin Rahmatullah	13/07/2023 11:03:35 WIB
80 Zakarias Horota	13/07/2023 11:07:09 WIB
81 Qomaruddin	13/07/2023



SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN  
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT  
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN  
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

**[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**



*Username :*  
**Pusdiklat\_MKRI**

*password :* **pusdikmk**

*Username :*  
**GK3\_PUSDIKLAT**

*password :* **pusdikmkri**

# Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



**Tugas Praktik dikirim ke e-mail:**

**tugasbimtek1@gmail.com**

**Subject e-mail:**

**<No. Registrasi> \_ <Nama Peserta> \_ <Jenis Tugas>**

**Contoh: 10\_Lionel Messi\_Permohonan Perseorangan**

**Nama File Ms. Word:**

**<No. Registrasi> \_ <Nama Peserta> \_ <Jenis Tugas>**

**Contoh: 10\_Lionel Messi\_Permohonan Partai Politik**



# KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu  
Pengumpulan Tugas  
Praktik Pukul 17.00  
WIB Hari Rabu,  
12 Juli 2023**

**\*Apabila melewati  
batas waktu, kami  
anggap peserta tidak  
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg  
Dikumpulkan Wajib  
Orisinal  
(dibuat asli oleh  
Masing-Masing  
Peserta) serta sesuai  
dengan Soal yang  
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal  
adalah 60, Nilai di Bawah 60  
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

**\*Peserta yg Tugas Praktiknya  
sama (*Copy Paste*), Baik yg  
Mencontek maupun yg  
Dicontek, Otomatis Nilainya di  
Bawah 60**

**\*Template Tugas Praktik  
harus diisi secara lengkap,  
dari Identitas sampai ke  
Petitum**

# Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI DEMOKRAT**

**KELAS 1**

Narasumber

: Hani Adhani

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Hadi Sasmita, S.H.	DPD Bengkulu	60	60	60	60
2	2	Dr. Ir. H. Eni Kamal, M.Sc.	DPD Sumatera Barat	60	60	60	60
3	4	Drs. H. Lahaya, S.H., M.H.	DPD Sulawesi Selatan	60	60	60	60
4	5	Ahmad Yani, S.E., S.H.	DPD DKI Jakarta	60	60	60	60
5	6	Suratiny Sulesdianingrum, S.IP.	DPD Riau	60	60	60	60
6	8	Adam Wijaya, S.H.	DPD Kalimantan Timur	60	60	60	60
7	11	Said Ahmad Kosasi, S.H., M.H.	DPP	60	60	60	60
8	13	Us Us Kurniawantoro, S.H., M.H.	DPD Jawa Tengah	60	60	60	60
9	17	Nurhayati	DPD Banten	60	60	60	60
10	18	Ai Hisanru Sebastian Manurung, S.H.	DPP	60	60	60	60
11	19	Efri Darlin Marto Dachi, S.E., S.H.,M.H.	DPP	60	60	60	60
12	20	HM. Rusdy, S.H., M.H.	DPP	60	60	60	60
13	21	Selestinus Paundanan, S.E.	DPD Papua Barat Daya	60	60	60	60
14	22	M. Khoiri, S.H., M.H.	DPP	60	60	60	60
15	23	Muhammad Muallimin, S.H., M.H.	DPP	60	60	60	60
16	24	Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM.	DPP				0
17	25	Muhammad Jamal	DPD Kepulauan Riau	60	60	60	60
18	28	M. Marwan Hamzah, S.H.	DPD Maluku Utara	60	60	60	60
19	29	Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.Hum	DPP	70	70	60	68
20	30	Cepi Hendrayani, S.H., M.H.	DPP	60	60	60	60
21	31	Kevin A Th Pitoy	DPP				0
22	40	N. Sulisty Setiawan, S.T.	DPD DI Yogyakarta	60	60	60	60
23	46	Supriyanto M. Radjak, S.Sos.	DPD Gorontalo	60	60	60	60
24	47	Fransisko, S.Pt.	DPD Papua	60	60	60	60
25	48	Muhammad Erwinsyah	DPD Kalimantan Utara	60	60	60	60
26	50	Zaenal Fandi, S.H., M.H.	DPD Jawa Timur	60	60	60	60
27	51	David Richard Stheven Runtuwarouw, S.E.	DPD Sulawesi Utara	60	60	60	60
28	58	Anastasia Henny, S.H, M.Th., M.Sc.	DPD Bali	60	60	60	60
29	59	Muji Rahayu, S.E.	DPD Aceh	60	60	60	60
30	61	Melkias Kedepa, S.T.	DPD Papua Tengah	60	60	60	60
31	63	Wijaya Dewantara, S.IP.	DPD Nusa Tenggara Barat	60	60	60	60
32	67	Pangeran, S.E., MSP.	DPD Sumatera Utara	60	60	60	60
33	68	Leksadharna Kengsiswoyo, S.H., M.H.	DPD Jawa Barat	60	60	60	60
34	76	Ferry Firmansyah, S.H.	DPD Bangka Belitung	60	60	60	60



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI DEMOKRAT**

**KELAS 2**

Narasumber

: Dian Chusnul Chatimah

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	7	Setiadi Indra Nugraha, S.H.	DPD Sumatera Barat	20	57	17	41.6
2	10	Fong Tek Wing	DPD Kalimantan Timur	20	57	17	41.6
3	15	Ridwan Comeng, S.H., M.H.	DPD Riau	20	57	18	41.8
4	26	Pebri Yunanda, S.H., CPL.	DPD Kepulauan Riau	20	58	18	42.4
5	32	Dr. Muhajir, S.H., M.H.	DPP	20	59	19	43.2
6	33	Agatha Lidyawati Rafli, BSC, S.H., M.H.	DPP	20	57	19	42
7	36	Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN.	DPP	20	58	16	42
8	37	Novianto Rahmantyo, S.H., M.H.	DPP	20	57	17	41.6
9	38	Nurhidayat Umacina, S.E.	DPP	20	56	16	40.8
10	39	Afroni Imawan	DPP	20	57	19	42
11	41	Ricky Kurniawan Chairul, S.E.	DPP	20	57	19	42
12	42	Deri Hafizh, S.H., M.M., M.H., M.Kn., CLA	DPP	20	59	19	43.2
13	43	Aidin Rahmatullah	DPP	18	56	17	40.6
14	44	Achmad Gozali	DPP	20	56	18	41.2
15	45	Sharon S. Simamora, S.H.	DPP	20	58	18	42.4
16	62	Made Sabda Adi Nugraha, S.H.	DPD Bali	20	56	16	40.8
17	69	Jonaidi, S.H., M.H.	DPD Sumatera Utara	20	56	16	40.8
18	73	Hery Purwanto, S.E.	DPD Kalimantan Tengah	20	57	18	41.8
19	78	Oyong Darwan, S.H., M.H.	DPP	20	58	18	42.4
20	80	Dwi Fajar Rini	DPD Bangka Belitung	20	57	18	41.8
21	87	Herlita	DPD Kalimantan Selatan	20	57	18	41.8
22	88	Dicky Patadjenu, S.H., M.H.	DPD Sulawesi Tengah	20	57	18	41.8
23	93	Lusiana Irmalia, S.E.	DPD Kalimantan Barat	20	57	18	41.8
24	96	Piterson Maumeta, S.H.	DPD Nusa Tenggara Timur	20	57	18	41.8
25	99	Edianto, S.E.	DPD Jambi	20	56	16	40.8
26	102	Ariyan Subakti, S.H.	DPD Banten	20	58	18	42.4
27	105	Roland Y.S. Yarolo	DPD Papua Barat	20	56	16	40.8
28	111	Dra. Rachmaniar L.	DPD Sulawesi Barat	20	56	18	41.2
29	116	Aldo Rizaldi	DPD Lampung	20	59	19	43.2
30	117	Oddy Gibson	DPD Sumatera Selatan	20	59	19	43.2
31	121	Hendri Rachmadani, S.H.	DPD Aceh	20	58	19	42.6
32	125	Herman Ade, S.IP.	DPD Papua Selatan	20	57	18	41.8
33	132	Afriyandi Chair Samallo, S.H.	DPD Maluku	20	59	18	43



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI DEMOKRAT**

**KELAS 3**

Narasumber

: Mohammad Mahrus Ali

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	3	L. Sitanggang, B.Sc.	DPD Bengkulu	60	60	60	60
2	9	Susanti Sembiring, S.E., S.H., M.Hum.	DPD Sumatera Barat	61	61	61	61
3	12	Oskhar Rawindra Sumual, S.H.	DPD Kalimantan Timur	74	74	74	74
4	14	R. Arief Triyoga Utama, A.Md., S.H.	DPD Jawa Tengah	62	62	62	62
5	16	Eka Buana Putra, S.H., M.H.	DPD Riau	74	74	74	74
6	27	MHD. Fadhli, S.H., M.H., CML., CPAdj., CPM.	DPD Kepulauan Riau	74	74	74	74
7	35	Yunus Adhi Prabowo, S.H., M.H., Adv., M.Kn.	DPD DKI Jakarta	72	72	72	72
8	53	Turedo Sitindaon, S.H.	DPP	70	70	70	70
9	55	Ainur Rohman, S.H.I	DPP	65	65	65	65
10	56	Yandri Sudarso, S.H., M.H.	DPP	73	73	73	73
11	57	Andhika Yudha Perwira, S.H.	DPP	70	70	70	70
12	60	Teuku Irmansyah, S.H., M.H.	DPP	70	70	70	70
13	64	TOHERI YUNITSOON HASSOR	DPD Papua Tengah	60	60	60	60
14	65	Ida Bagus Putu Gede Sukrisna	DPD Bali	60	60	60	60
15	66	Jimmy Himawan, S.H.	DPP	74	74	74	74
16	71	Bambang Santoso, S.H., M.H.	DPD Sumatera Utara	70	70	70	70
17	72	Nina Kurniasari Sutarman, S.H.	DPD Jawa Barat	65	65	65	65
18	74	Alfa Avesiana Romdhoni, S.H.	DPP	70	70	70	70
19	75	Khairul Anwar, S.H., M.H.	DPP	74	74	74	74
20	77	Reza Puji Juliana, S.H.	DPP	73	70	73	71.2
21	81	Dr. Imam Sofian, S.H., M.H.	DPD Nusa Tenggara Barat	74	74	74	74
22	89	Rizaldi Nazaruddin, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Selatan	64	64	64	64
23	91	Rahmawati Sukri, S.H.	DPD Sulawesi Tengah	74	74	74	74
24	92	Ikrar (PT Perseorangan)	DPD Sulawesi Selatan	75	75	75	75
25	94	Anwar, S.H.	DPD Kalimantan Barat	70	69	70	69.4
26	97	Astria Blandina Gaidaka, S.Kep, Ns, M.Si	DPD Nusa Tenggara Timur	74	74	74	74
27	101	Suratno, S.H.	DPD Jambi	74	74	74	74
28	104	Mohamad Yusup, S.H., LL.M.	DPD Banten	74	74	74	74
29	106	Zakarias Horota	DPD Papua Barat	70	70	70	70
30	108	Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, S.H.	DPD Kalimantan Utara	64	64	64	64
31	118	Junjati Patra, S.H., M.H	DPD Sumatera Selatan	63	63	63	63
32	123	Hidayatullah, S.H.	DPD Aceh	74	74	74	74
33	127	M. Tomi Samantha, S.H.	DPD Lampung	70	70	70	70



**FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK**  
**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**BAGI PARTAI DEMOKRAT**

**KELAS 4**

Narasumber

: M. Lutfi Chakim

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	34	M. Ardiyansyah, S.T.	DPD Maluku Utara	70	70	60	68
2	49	Mohamad Rivky Mohi, S.H.	DPD Gorontalo	70	70	65	69
3	52	Vike Verry Ponto, S.H.	DPD DKI Jakarta	65	60	65	62
4	54	Sapril Rahman, S.H.	DPD Jawa Timur	65	60	60	61
5	70	Rudy Fadillah, S.H.	DPD DI Yogyakarta	65	65	65	65
6	79	Andy Wiyanto, S.H., M.H.	DPP	65	70	70	69
7	82	Bujang Musa, S.H., M.H.	DPD Bangka Belitung	65	60	65	62
8	83	Bayu Listiawan, S.H.	DPP	65	60	65	62
9	84	Maulana Hasanudin, S.H., M.H.	DPD Jawa Barat	70	70	70	70
10	85	Gregorius Retas Daeng, S.H.	DPP	70	65	70	67
11	86	Yance Salambauw, S.H., M.H.	DPD Papua Barat Daya	75	75	75	75
12	90	Akhmad Ryan Firmansyah, S.H.	DPD Kalimantan Selatan	65	65	65	65
13	95	Jonveri, S.E.	DPD Kalimantan Barat	65	65	65	65
14	98	Urbanus Dhalu, S.H., M.H.	DPD Nusa Tenggara Timur	70	70	70	70
15	100	Adhari Widya Prakarsa, S.H.	DPP	70	65	70	67
16	103	Endang Kuswardani, S.H.	DPD Jambi	60	60	65	61
17	107	Sri Wijati	DPD Papua Barat	60	60	60	60
18	109	Zarkasih, S.H.	DPD Sulawesi Tengah	70	70	65	69
19	110	Hermanto Hamdi, S.Pi., S.H., M.H.	DPD Kalimantan Utara	65	70	65	68
20	112	Febronesco Ferdinand T.	DPD Sulawesi Utara	65	65	65	65
21	113	Muh. Dirfan Akbar Za, S.H.	DPD Sulawesi Selatan	65	60	65	62
22	114	Tolib	DPP	65	60	60	61
23	115	Elmilya Ashyfa Hutomo	DPD Banten	65	60	65	62
24	119	Jackson Sahala Pakpahan, S.H.	DPD Sumatera Selatan	65	60	65	62
25	120	Dinda W. Ariani, S.H.	DPP	70	70	70	70
26	122	Gomaruddin, S.E., M.K.Sos	DPP	60	60	60	60
27	124	Ahmad Yani, S.H., M.H.	DPD Aceh	65	60	65	62
28	126	Apedius I. Mote, S.T.	DPD Papua	65	65	65	65
29	128	Ali Akbar, S.H., M.H.	DPD Lampung	60	60	60	60
30	129	Nurul Auliah, S.Pd.	DPP	60	60	65	61
31	130	Ahmad Rifai	DPP	70	75	70	73
32	131	Sudarmanto	DPP	65	60	60	61
33	133	Akbar F.A. Salampessy, S.H.	DPD Maluku	65	65	65	65

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRAT

NAMA NARASUMBER : HANI ADHANI

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara garis besar para peserta sepertinya tidak serius mengerjakan tugas permohonan.
	Beberapa peserta cenderung tidak membaca soal secara seksama.
	Ke depan agar diinfokan bahwa fokus permohonan berpatokan ke soal yang ada.
	Mohon agar narsum fasilitator dan narsum PP tingkat 1 menekankan hal tsb
2	Harus ada dua orang peserta yang dapat mengerjakan dengan nilai minimal 70.
	Informasikan kepada peserta bahwa yang dinilai itu ada 3 hal yaitu sistematika, substansi dan kerapihan.
	Kalo seandainya tidak bisa mengawal seluruh peserta agar bagus tugasnya minimal ada 2 orang yang maksimal mengerjakan.
3	
4	
5	

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRAT

NAMA NARASUMBER : DIAN CHUSNUL CHATIMAH

KELAS : KELAS 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Untuk penyusunan permohonan, peserta mayoritas sudah paham, hanya terkait
	beberapa hal saja yang kurang paham.
2	Seluruh peserta aktif dalam kelas dan kelas lebih banyak diskusi
3	
4	
5	

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRAT

NAMA NARASUMBER : Mohammad Mahrus Ali

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	<p>Peserta perlu mencermati tata cara menyusun substansi/esensi Keterangan Pihak Terkait</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Keterangan Pihak Terkait tidak sama dengan Permohonan Pemohon</li><li>• Keterangan Pihak Terkait bertujuan untuk “mempertahankan” diri sebagai peraih suara terbanyak (pemenang) = defensif</li><li>• Sedangkan Permohonan adalah upaya “menggugat” pihak yang menang = offensif</li><li>• Penggunaan Eksepsi harus cermat dan tepat. Tidak semua harus dieksepsi. Eksepsi adalah alternatif.</li></ul>
2	<p>Peserta perlu mencermati tata cara menyusun Teknis Penulisan/Penyusunan sesuai PMK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penulisan Perihal harus jelas (Keterangan Pihak Terkait) atas permohonan yang diajukan oleh partai/perseorangan</li><li>• Sesuai soal, Adalah Kuasa Hukum Pihak Terkait</li><li>• SK KPU harus dicantumkan</li><li>• Uraian bahwa dalil Pemohon tidak benar/tidak berdasar harus disertai bukti yang relevan</li><li>• Daftar Alat Bukti perlu dicantumkan</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peserta perlu cermat dalam menuliskan: perihal keterangan pihak terkait yang dimohonkan oleh yang dimohonkan oleh Pemohon</li><li>• Dalam penyusunan eksepsi, Peserta harus lebih cermat, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon Tenggang Waktu Pengajuan dan Permohonan telah jelas, maka Tidak Perlu Mengajukan Eksepsi Pihak Terkait langsung menanggapi/menyanggah Pokok Perkara</li></ul>
4.	<p>Peserta perlu memahami dan mencermati :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pihak Terkait pada umumnya akan sama posisinya dengan KPU/Termohon (membantah dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon)</li><li>• Dalil-dalil Pihak Terkait harus argumentatif dan berlandaskan alat bukti (Jika</li></ul>

	<p>dalil Pemohon tidak benar, lalu yang benar menurut Pihak Terkait seperti apa)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pihak Terkait juga dapat mengajukan saksi (jika diperlukan)</li><li>• Petitum Pihak Terkait lazimnya meminta Penetapan Suara yang benar menurut KPU (Termohon)</li></ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRAT

<b>Sesi I</b>	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
<b>Narasumber</b>	1. YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH., MA 2. YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum
<b>Moderator</b>	<b>Ardiansyah Salim</b>

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Rizal_Kalsel : terkait putusan putusan yg ultra petita, artinya ada putusan yg terjadi di luar tuntutan pemohon misalkan pd gugatan PPHU ada muncul dugaan dugaan pelanggaran dlm petitum ingin membatalkan si calon namun di dlm hasil dlm persidangan ada beberapa putusan yg menyatakan PSU artinya hasil ini diluar ultra petita mungkin bagai mana pendapat hakim terhadap pengalaman pengalaman yg lalu?
2.	Yance_Papua Barat Daya : kami dlm sengketa itu dibebankan dg beban pembuktian yg berat sementara sarana pembuktian itu di persempit contohnya saksi di batasi 3 saksi utk kabupaten sedangkan beban pembuktian atas dalil dalil itu cukup banyak, kenapa MK tidak menerima testimony yang ril?
3.	Ridwan_Riau : masalah kewenangan MK terkait dg Hasil namun tidak tertutup kemungkinan terkait kecurangan yg terjadi dlm proses sebelum perhitungan suara itu di lakukan oleh pihak terkait padahal kecurangan itu menjadi kewenangan BAWASLU jadi mohon ketegasan ini kecurangan seperti apa yg bisa dikategorikan bisa dimasukkan ke permohonan kita materi permohonan terkait perhitungan suara tadi?

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRAT

<b>Sesi II</b>	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
<b>Narasumber</b>	Pan Mohamad Faiz, Ph.D
<b>Moderator</b>	Edwin Aditya

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Hendri_Aceh : apakah boleh MK memutuskan bahwasannya di putusan sela itu di terima tapi di putusan akhir di tolak?
2.	Dicky_Sulteng : apa yg menjadi pertimbangan MK bahwa selisih yg jauh dari aturan tetap di masukan ke persidangan?
3.	Muhammad Yusuf_Banten : Tentang terminology bagai mana MK berangkat dari keadilan prosudural menjadi keadilan substantif?

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRAT

<b>Sesi III</b>	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
<b>Narasumber</b>	Ida Ria Tambunan, SH., MH.
<b>Moderator</b>	Bambang Sukmadi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Junaedi_Sumatera Utara : ada Substansi yg tidak bisa dirubah tolong minta penjelasannya tentang substansi yg tidak bisa dirubah?
2.	Lahaya_Sulsel : penarikan kembali permohonan setelah deregister pd sidang terakhir, yg mana yg dimaksud sidang terakhir?
3.	Dicky_Sulsel : masalah 3 x 24 Jam, apakah itu terhitung 1 hari ketika besoknya kami melakukan permohonan terus ketika sudah melakukan permohonan apakah dibutuhkan 3 hari lagi atau terhitung sudah satu hari untuk perbaikan?

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI DEMOKRAT

<b>Sesi IV</b>	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
<b>Narasumber</b>	1. Nur Rakhman, S.Kom 2. Rachman Karim
<b>Moderator</b>	Nanda Adytiansyah

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Apedius_Papua : apakah dlm putusan itu beda tidak karna dlm manual menghadir kan fisiknya dan mendalilkan apa yg dia mau dan kalo secara online khusus di papua belum tentu bisa hadirdi dlm sidang itu? Aplikasi yg tadi di jelaskan itu ada 2 yang 1 test MKRI yg 1 untuk umum tolong jelaskan?



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Tata Tertib Peserta

## Bimbingan Teknis

### Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik

 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi

 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**

 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

# ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



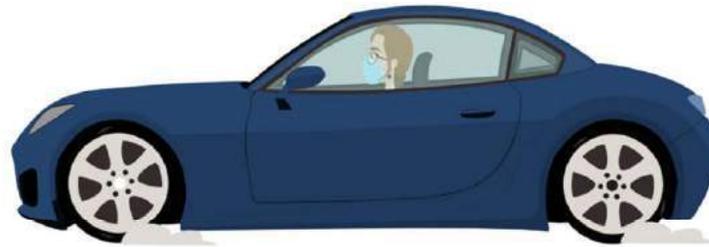
Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas  $37,5^{\circ}\text{C}$ ), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

# REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

# PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan  
Pusdik akan dibersihkan dengan  
menggunakan disinfektan

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DARI PANITIA PARTAI DEMOKRAT  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan	Asal DPP/ DPD Prov.	Jabatan
1	Dr.Mehbob,SH.MH,CN	Laki-laki	S3	DPP	Kepala BHPP
2	Dr.Muhajir,SH,MH	Laki-laki	S3	DPP	Deputi BHPP
3	Yandri Sudarso, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPP	Sekretaris BHPP
4	Dormauli Silalahi, SH.,MH	Perempuan	S2	DPP	Deputi BHPP
5	DR. Papang Sapari, SH.,MH.,CM	Laki-laki	S3	DPP	Anggota BHPP
6	Cepi Hendrayani, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPP	Anggota BHPP
7	Novianto Rahmanty, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPP	Anggota BHPP
8	Jimmy Himawan, SH.,	Laki-laki	S1	DPP	Anggota BHPP
9	Reinhard Romulo, SH	Laki-laki	S1	DPP	Anggota BHPP
10	Dinda W.Ariani, SH	Perempuan	S1	DPP	Anggota BHPP
11	Nurhidayat Umacina,	Laki-laki	S1	DPP	Anggota BHPP
12	Muhammad Muallimin, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPP	Anggota BHPP
13	M.Khoiri, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPP	Anggota BHPP
14	Agatha A.Lidyawati Rafli SH.,MH	Perempuan	S2	DPP	Mahkamah Partai
15	Ainur Rohman, SH	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
16	Hafidz Tony Fachruddin	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
17	Afroni Imawan	Laki-laki	S1	DPP	Staff DE
18	Kevin Pitoy	Laki-laki	S1	DPP	Staff DE
19	Turedo Sitindaon, SH	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
20	Sharon S. Simamora	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
21	Aidin Rahmatullah	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
22	Achmad Gozali	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
23	HM.Rusdi, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPP	BHPP
24	Khairul Anwar, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPP	BHPP
25	Andi Wiyanto, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPP	BHPP
26	Ai Hisanru Sebastian Manurung, SH	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
27	Adhari Widya Prakarsa, SH	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
28	Dedy Arman, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPP	BHPP
29	Said Ahmad Kosasih, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPP	BHPP
30	Tolib	Laki-laki		DPP	BHPP
31	Bayu Listiawan SH	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
32	Andhika Yudha Perwira	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
33	Alva Alfesiana R., SH	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
34	Eko Prayitno SH.,MH	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
35	Ricky Kurniawan Chairul, SE	Laki-laki	S1	DPP	Bakomstra
36	Mohammad Faisol	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
37	Fariz Aldiano P, SH.	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
38	Ricca Amelia	Perempuan	S1	DPP	BHPP
39	Dr. Nadya Prita Gemala D, SH	Perempuan	S3	DPP	BHPP
40	Oyong Darwan	Laki-laki	S1	DPP	BHPP
41	Hendri Rachmadani, SH	Laki-laki	S1	DPD Aceh	Kepala BHPP - DA

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan	Asal DPP/ DPD Prov.	Jabatan
42	Hidayatullah, SH	Laki-laki	S1	DPD Aceh	Kader
43	Muji Rahayu, SE	Laki-laki	S1	DPD Aceh	DE - DA
44	Jonaidi SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Sumatera Utara	Sekretaris BHPP - DA
45	Pangeran, SE, MSP	Laki-laki	S2	DPD Sumatera Utara	DE - DA
46	Bambang Santoso, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Sumatera Utara	Waka 1 BHPP-DA
47	Susanti Sembiring, SE.,SH.,M.Hum	Perempuan	S2	DPD Sumatera Barat	Kepala BHPP - DA
48	Setiadi Indra Nugraha	Laki-laki	S1	DPD Sumatera Barat	Anggota BHPP - DA
49	H. Eni Kamal	Laki-laki	S1	DPD Sumatera Barat	DE - DA
50	Suratiny Sulesdianingrum,S.IP	Perempuan	S1	DPD Riau	DE - DA
51	Ridwan, SH.,MH	Laki-laki	S1	DPD Riau	Waka BHPP-DA
52	Eka Buana Putra, SH.MH	Laki-laki	S2	DPD Riau	Satgas Pengamanan Pemilu 2024 Partai Demokrat Prov. Riau
53	Suratno, SH	Laki-laki	S1	DPD Jambi	Kepala BHPP-DA
54	Endang Kuswardani, SH	Perempuan	S1	DPD Jambi	Sekretaris BHPP - DA
55	Edianto, SE	Laki-laki	S1	DPD Jambi	DE - DA
56	Junjati Patra, SH	Laki-laki	S1	DPD Sumatera Selatan	Waka BHPP-DA
57	Jackson S. Pakpahan SH	Laki-laki	S1	DPD Sumatera Selatan	Anggota BHPP - DA
58	Oddy Gibson	Laki-laki	S1	DPD Sumatera Selatan	Waka DE - DA
59	Hadi Sasmita, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Bengkulu	Waka 2 BHPP-DA
60	Ismi Indri Ningsih, S.SI	Perempuan	S1	DPD Bengkulu	Sekretaris BHPP - DA
61	L.Sitanggang, B.Sc	Laki-laki	S1	DPD Bengkulu	DE - DA
62	Ali Akbar SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Lampung	Waka 1 BHPP-DA
63	M.Tomi Samantha, SH	Laki-laki	S1	DPD Lampung	Waka 3 BHPP-DA
64	Aldo Rizaldi	Laki-laki	S1	DPD Lampung	Staff DE - DA
65	Bujang Musa, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Bangka Belitung	Kepala BHPP - DA
66	Ferry Firmansyah, SH	Laki-laki	S1	DPD Bangka Belitung	Waka BPOKK - DA
67	Dwi Fajar Rini	Perempuan	S1	DPD Bangka Belitung	DE - DA
68	MHD Fadli SH.MH	Laki-laki	S2	DPD Kepri	Kepala BHPP - DA
69	Pebry Yunanda, SH,CPL	Laki-laki	S1	DPD Kepri	Waka BHPP-DA
70	Muhammad Jamal	Laki-laki		DPD Kepri	DE - DA
71	Mohamad Yusuf SH.,LLM	Laki-laki	S2	DPD Banten	Kepala BHPP-DA
72	Ariyan Subakti SH	Laki-laki	S1	DPD Banten	Waka BHPP-DA
73	Neng Yayat Nurhayati	Perempuan	S1	DPD Banten	DE - DA
74	Yunus Adhi Prabowo, SH.,MH,Adv.,Mkn	Laki-laki	S1	DPD DKI Jakarta	Kepala BHPP-DA
75	Ahmad Yani SE.,SH	Laki-laki	S1	DPD DKI Jakarta	Waka BHPP-DA
76	Vike Verry Ponto, SH	Laki-laki	S1	DPD DKI Jakarta	DE - DA
77	Leksadharma Kengsiswoyo, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Jawa Barat	Kepala BHPP - DA
78	Nina Kurniasari, SH	Perempuan	S1	DPD Jawa Barat	Sekretaris BHPP - DA
79	Maulana Hasanudin, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Jawa Barat	DE - DA
80	Us Us Kurniwantoro, SH., MH.	Laki-laki	S2	DPD Jawa Tengah	Kepala BHPP - DA
81	R. Arief Triyoga Utama, Amd., SH.	Laki-laki	S1	DPD Jawa Tengah	Waka BHPP-DA
82	Ali Mas'adi, ST.	Laki-laki	S1	DPD Jawa Tengah	DE - DA
83	Noval Satriawan SH	Laki-laki	S1	DPD DIY	Kepala BHPP - DA
84	Rudy Fadillah, SH	Laki-laki	S1	DPD DIY	Wakil BHPP-DA

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan	Asal DPP/ DPD Prov.	Jabatan
85	N.Sulistyo Setiawan ST	Laki-laki	S1	DPD DIY	DE - DA
86	Zaenal Fandi, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Jawa Timur	Kepala BHPP - DA
87	Zainuddin, SH.I	Laki-laki	S1	DPD Jawa Timur	Anggota BHPP - DA
88	Sapril Ramhan, SH	Laki-laki	S1	DPD Jawa Timur	Waka DE - DA
89	Made Sabda Adi Nugraha, SH	Laki-laki	S1	DPD Bali	Waka BHPP-DA
90	Anastasia Henny, SH	Perempuan	S1	DPD Bali	Waka BHPP-DA
91	Ida Bagus Putu Gede Sukrisna	Laki-laki	S1	DPD Bali	Waka DE - DA
92	Dr. Imam Sofian, SH.,MH	Laki-laki	S3	DPD NTB	Kepala BHPP - DA
93	Hijrat Priyatno,SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD NTB	Anggota BHPP - DA
94	Wijaya Dewantara, S.IP	Laki-laki	S1	DPD NTB	DE - DA
95	Mario Aprioalmit Lawung, SH.,MH	Laki-laki	S1	DPD NTT	Sekretaris BHPP - DA
96	Astria Blandina Gaidaka, S.Kep,Ns,M.Si	Perempuan	S2	DPD NTT	DE - DA
97	Piterson Maumeta, SH	Laki-laki	S1	DPD NTT	Anggota BHPP - DA
98	Andel, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Kalimantan Barat	Kepala BHPP - DA
99	Anwar, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Kalimantan Barat	Waka I BHPP-DA
100	Lusiana Irmalia, SE	Perempuan	S1	DPD Kalimantan Barat	Waka DE - DA
101	Benny Pakpahan, SH.	laki-laki	S1	DPD Kalimantan Tengah	Kepala BHPP - DA
102	Adi, SH	Laki-laki	S1	DPD Kalimantan Tengah	Anggota BHPP - DA
103	Hery Purwanto, SE.	Laki-laki	S1	DPD Kalimantan Tengah	DE - DA
104	Rizaldi Nazaruddin, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Kalimantan Selatan	Kepala BHPP - DA
105	Akhmad Ryan Firmansyah, SH	Laki-laki	S1	DPD Kalimantan Selatan	Waka 3 BHPP - DA
106	Herlita	Perempuan	S1	DPD Kalimantan Selatan	Sekretaris DE - DA
107	Adam Wijaya, SH	Laki-laki	S1	DPD Kalimantan Timur	Kepala BHPP - DA
108	Oskhar Rawindra Sumual, SH	Laki-laki	S1	DPD Kalimantan Timur	Wakil BHPP - DA
109	Tri Sukma Putra, S.Pi	Laki-laki	S1	DPD Kalimantan Timur	DE - DA
110	Theodorus G.E.Bartho, SH	Laki-laki	S1	DPD Kalimantan Utara	Sekretaris BHPP - DA
111	Hermanto Hamdi, S.Pi, SH.,MH	Laki-laki	S1	DPD Kalimantan Utara	Anggota BHPP - DA
112	Muhammad Erwinsyah, M.Kom	Laki-laki	S2	DPD Kalimantan Utara	DE - DA
113	Febronesco Ferdinand T.	Laki-laki	S1	DPD Sulawesi Utara	Kepala BHPP - DA
114	David Richard Stheven R	Laki-laki	S1	DPD Sulawesi Utara	DE - DA
115	Dicky Patadjenu, SH.,MH	Laki-laki	S1	DPD Sulawesi Tengah	Kepala BHPP - DA
116	Rahmawati Sukri, SH	Perempuan	S1	DPD Sulawesi Tengah	Sekretaris BHPP - DA
117	Zarkasih, SH	Laki-laki	S1	DPD Sulawesi Tengah	DE - DA
118	Drs. H. Lahaya, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Sulawesi Selatan	Kepala BHPP - DA
119	Muh. Dirfan Akbar, SH	Laki-laki	S1	DPD Sulawesi Selatan	Anggota BHPP - DA
120	Ikrar	Laki-laki	S1	DPD Sulawesi Selatan	DE - DA
121	S.Budhi Prasodjo, S.Pi.SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Sulawesi Tenggara	Sekretaris DPD
122	Nur Rahmat Karno, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Sulawesi Tenggara	Kepala Bappilu - DA
123	M.Ridzmi Rafsanjani, SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Sulawesi Tenggara	Sekretaris DE - DA
124	Mohamad Rivky Mohi, SH	Laki-laki	S1	DPD Gorontalo	Kepala BHPP - DA
125	Mohamad Nasir Halida, SH.,Mkn	Laki-laki	S2	DPD Gorontalo	Waka BHPP - DA
126	Supriyanto Radjak, S,Sos.	Laki-laki	S1	DPD Gorontalo	DE - DA
127	ABD.Wahab. SH.,MH	Laki-laki	S2	DPD Sulawesi Barat	Sekretaris BHPP - DA
128	Muhammad Ali Akbar, SH	Laki-laki	S1	DPD Sulawesi Barat	Staff BHPP - DA

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan	Asal DPP/ DPD Prov.	Jabatan
129	Dra Rachmaniar L	Perempuan	S1	DPD Sulawesi Barat	DE - DA
130	Afriandi CH Samallo, SH	Laki-laki	S1	DPD Maluku	DE - DA
131	Akbar F.A.Salampessy, SH	Laki-laki	S1	DPD Maluku	Wakil BHPP - DA
132	M. Marwan Hamzah SH	Laki-laki	S1	DPD Maluku Utara	Kepala BHPP - DA
133	M. Ardiyansyah, ST	Laki-laki	S1	DPD Maluku Utara	DE - DA
134	Apedius I. Mote, ST	Laki-laki	S1	DPD Papua	Sekretaris DPD - DA
135	Fransisko,Spt	Laki-laki	S1	DPD Papua	DE - DA
136	Benyamin Gurik, S.Sos	Laki-laki	S1	DPD Papua	BHPP - DA
137	Sirajuddin, SH.	Laki-laki	S1	DPD Papua Barat	Kepala BHPP - DA
138	Zakarias Horota	Laki-laki	S1	DPD Papua Barat	Waka Bappilu - DA
139	Ayub Msiren, SH	Laki-laki	S1	DPD Papua Barat	DE - DA
140	Melkias Kedepa, ST	Laki-laki	S1	DPD Papua Tengah	DE - DA
141	Toheri Yunitsoon Sassor	Laki-laki	S1	DPD Papua Tengah	Waka 1 Balitbang - DA
142	Anduru Bahabol	Laki-laki	S1	DPD Papua Pegunungan	Kepala BHPP - DA
143	Semby Wattimena	Laki-laki	S1	DPD Papua Pegunungan	DE - DA
144	Korfan Bahabol	Laki-laki	S1	DPD Papua Pegunungan	Waka DE - DA
145	Taufik Darus, SH	Laki-laki	S1	DPD Papua Selatan	Kader
146	Wilhelmus Mahuze, SE	Laki-laki	S1	DPD Papua Selatan	Waka DE - DA
147	Herman Ade, S.Ip	Laki-laki	S1	DPD Papua Selatan	Sekretaris DPD - DA
148	Selestinus Paundan, SE	Laki-laki	S1	DPD Papua Barat Daya	DE - DA
149	Benediktus Jombang, SH,MH	Laki-laki	S2	DPD Papua Barat Daya	Bidang Hukum - DA
150	Yance Salambauw, SH	Laki-laki	S1	DPD Papua Barat Daya	Ketua DPC Sorsel

**DAFTAR PESERTA KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAGI PARTAI DEMOKRAT**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Hadi Sasmita, S.H.	Laki-laki	DPD Bengkulu	BENGKULU	S1
2	Dr. Ir. H. Eni Kamal, M.Sc.	Laki-laki	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S3
3	L. Sitanggang, B.Sc.	Laki-laki	DPD Bengkulu	BENGKULU	S1
4	Drs. H. Lahaya, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S2
5	Ahmad Yani, S.E., S.H.	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
6	Suratiny Sulesdianingrum, S.I	Perempuan	DPD Riau	RIAU	S1
7	Setiadi Indra Nugraha, S.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
8	Adam Wijaya, S.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
9	Susanti Sembiring, S.E., S.H.,	Perempuan	DPD Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S2
10	Fong Tek Wing	Laki-laki	DPD Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
11	Said Ahmad Kosasi, S.H., M.H	Laki-laki	DPP	RIAU	S2
12	Oskhar Rawindra Sumual, S.H	Laki-laki	DPD Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
13	Us Us Kurniwantoro, S.H., M.	Laki-laki	DPD Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
14	R. Arief Triyoga Utama, A.Md	Laki-laki	DPD Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
15	Ridwan Comeng, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Riau	RIAU	S2
16	Eka Buana Putra, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Riau	RIAU	S2
17	Neng Yayat Nurhayati	Perempuan	DPD Banten	BANTEN	S1
18	Ai Hisanru Sebastian Manuru	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
19	Efri Darlin Marto Dachi, S.E.,	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
20	HM. Rusdy, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
21	Selestinus Paundanan, S.E.	Laki-laki	DPD Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1
22	M. Khoiri, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA TIMUR	S2
23	Muhammad Mualimin, S.H.,	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
24	Dr. Papang Sapari, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S3
25	Muhammad Jamal	Laki-laki	DPD Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	DIII
26	Pebri Yunanda, S.H., CPL.	Laki-laki	DPD Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
27	MHD. Fadhli, S.H., M.H., CML	Laki-laki	DPD Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S2
28	M. Marwan Hamzah, S.H.	Laki-laki	DPD Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
29	Dr. Nadya Prita Gemala D., S.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S3
30	Cepi Hendrayani, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
31	Kevin A Th Pitoy	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
32	Dr. Muhajir, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S3
33	Agatha A. Lidyawati Rafli, B.S	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
34	M. Ardiyansyah, S.T.	Laki-laki	DPD Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
35	Yunus Adhi Prabowo, S.H., M	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
36	Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S3
37	Novianto Rahmantyo, S.H., M	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
38	Nurhidayat Umacina, S.E.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
39	Afroni Imawan	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
40	N. Sulistyo Setiawan, S.T.	Laki-laki	DPD DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
41	Ricky Kurniawan Chairul, S.E.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
42	Deri Hafizh, S.H., M.M., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
43	Aidin Rahmatullah	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	DIII

44	Achmad Gozali	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	DIII
45	Sharon S. Simamora, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
46	Supriyanto M. Radjak, S.Sos.	Laki-laki	DPD Gorontalo	GORONTALO	S1
47	Fransisko, S.Pt.	Laki-laki	DPD Papua	PAPUA	S1
48	Muhammad Erwinsyah, S.Kor	Laki-laki	DPD Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S2
49	Mohamad Rivky Mohi, S.H.	Laki-laki	DPD Gorontalo	GORONTALO	S1
50	Zaenal Fandi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
51	David Richard Stheven Runtu	Laki-laki	DPD Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
52	Vike Verry Ponto, S.H.	Laki-laki	DPD DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
53	Turedo Sitindaon, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
54	Sapril Rahman, S.H.	Laki-laki	DPD Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
55	Ainur Rohman, S.H.I	Laki-laki	DPP	JAWA TIMUR	S1
56	Yandri Sudarso, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
57	Andhika Yudha Perwira, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
58	Pdt. Anastasia Henny, S.H, M	Perempuan	DPD Bali	BALI	S2
59	Muji Rahayu, S.E.	Perempuan	DPD Aceh	ACEH	S1
60	Teuku Irmansyah, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
61	Melkias Kedepa, S.T.	Laki-laki	DPD Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
62	Made Sabda Adi Nugraha, S.H	Laki-laki	DPD Bali	BALI	S1
63	Wijaya Dewantara, S.IP.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara B	NUSA TENGGARA BARU	S1
64	TOHERI YUNITSOON HASSOR	Laki-laki	DPD Papua Tengah	PAPUA TENGAH	SMA
65	Ida Bagus Putu Gede Sukrisna	Laki-laki	DPD Bali	BALI	SMA
66	Jimmy Himawan, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
67	Pangeran, S.E., MSP.	Laki-laki	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S2
68	Leksadharma Kengsiswoyo, S	Laki-laki	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
69	Jonaidi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S2
70	Rudy Fadillah, S.H.	Laki-laki	DPD DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
71	Bambang Santoso, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S2
72	Nina Kurniasari Sutarman, S.H	Perempuan	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
73	Hery Purwanto, S.E.	Laki-laki	DPD Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
74	Alfa Avesiana Romdhoni, S.H	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
75	Khairul Anwar, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S2
76	Ferry Firmansyah, S.H.	Laki-laki	DPD Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
77	Reza Puji Juliana, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
78	Oyong Darwan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
79	Andy Wiyanto, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S2
80	Dwi Fajar Rini	Perempuan	DPD Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
81	Dr. Imam Sofian, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara B	NUSA TENGGARA BARU	S3
82	Bujang Musa, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S2
83	Bayu Listiawan, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
84	Maulana Hasanudin, S.H., M.	Laki-laki	DPD Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
85	Gregorius Retas Daeng, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
86	Yance Salambauw, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Papua Barat Day	PAPUA BARAT	S2
87	Herlita	Perempuan	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
88	Dicky Patadjenu, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S2
89	Rizaldi Nazaruddin, S.H., M.H	Laki-laki	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
90	Akhmad Ryan Firmansyah, S.	Laki-laki	DPD Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
91	Rahmawati Sukri, S.H.	Perempuan	DPD Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
92	Ikrar	Laki-laki	DPD Partai Demokrat	SULAWESI SELATAN	S1
93	Lusiana Irmalia, S.E.	Perempuan	DPD Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1

94	Anwar, S.H.	Laki-laki	DPD Kalimantan Bara	KALIMANTAN BARAT	S1
95	Jonveri, S.E.	Laki-laki	DPD Kalimantan Bara	KALIMANTAN BARAT	S1
96	Piterson Maumeta, S.H.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara T	NUSA TENGGARA TIM	S1
97	Astria Blandina Gaidaka, S.Ke	Perempuan	DPD Nusa Tenggara T	NUSA TENGGARA TIM	S2
98	Urbanus Dhalu, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Nusa Tenggara T	NUSA TENGGARA TIM	S2
99	Edianto, S.E.	Laki-laki	DPD Jambi	JAMBI	S1
100	Adhari Widya Prakarsa, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
101	Suratno, S.H.	Laki-laki	DPD Jambi	JAMBI	S1
102	Ariyan Subakti, S.H.	Laki-laki	DPD Banten	BANTEN	S1
103	Endang Kuswardani, S.H.	Perempuan	DPD Jambi	JAMBI	S1
104	Mohamad Yusup, S.H., LL.M.	Laki-laki	DPD Banten	BANTEN	S2
105	Roland Y.S. Yarolo	Laki-laki	DPD Papua Barat	PAPUA BARAT	SMA
106	Zakarias Horota	Laki-laki	DPD Papua Barat	PAPUA BARAT	SMA
107	Sri Wijati	Perempuan	DPD Papua Barat	PAPUA BARAT	DIII
108	Theodorus Gunatur Emmano	Laki-laki	DPD Kalimantan Utar	KALIMANTAN UTARA	S1
109	Zarkasih, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1
110	Hermanto Hamdi, S.Pi., S.H.,	Laki-laki	DPD Kalimantan Utar	KALIMANTAN UTARA	S2
111	Dra. Rachmaniar L.	Perempuan	DPD Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
112	Febronesco Ferdinand Takae	Laki-laki	DPD Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1
113	Muh. Dirfan Akbar Za, S.H.	Laki-laki	DPD Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
114	Tolib, S.Ak.	Laki-laki	DPP	BANTEN	S1
115	Elmilya Ashyfa Hutomo	Perempuan	DPD Banten	BANTEN	SMA
116	Aldo Rizaldi	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	SMA
117	Oddy Gibson, A.Md	Laki-laki	DPD Sumatera Selata	SUMATERA SELATAN	DIII
118	Junjati Patra, S.H., M.H	Laki-laki	DPD Sumatera Selata	SUMATERA SELATAN	S2
119	Jackson Sahala Pakpahan, S.H	Laki-laki	DPD Sumatera Selata	SUMATERA SELATAN	S1
120	Dinda Wulan Ariani, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
121	Hendry Rachmadani, S.H.	Laki-laki	DPD Aceh	ACEH	S1
122	Qomaruddin, S.E., M.Kesos.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
123	Hidayatullah, S.H.	Laki-laki	DPD Aceh	ACEH	S1
124	Ahmad Yani, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Aceh	ACEH	S2
125	Herman Ade, S.IP.	Laki-laki	DPD Papua Selatan	PAPUA SELATAN	S1
126	Apedius I. Mote, S.T.	Laki-laki	DPD Papua	PAPUA	S1
127	M. Tomi Samantha, S.H.	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	S1
128	Ali Akbar, S.H., M.H.	Laki-laki	DPD Lampung	LAMPUNG	S2
129	Nurul Auliah, S.Pd., M.A.P.	Perempuan	DPP	BANTEN	S2
130	Achmad Rifai, S.H., M.A.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
131	Sudarmanto, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	-
132	Afriyandi Chair Samallo, S.H.	Laki-laki	DPD Demokrat Maluku	MALUKU	S1
133	Akbar F.A. Salampessy, S.H.,	Laki-laki	DPD Maluku	MALUKU	S1